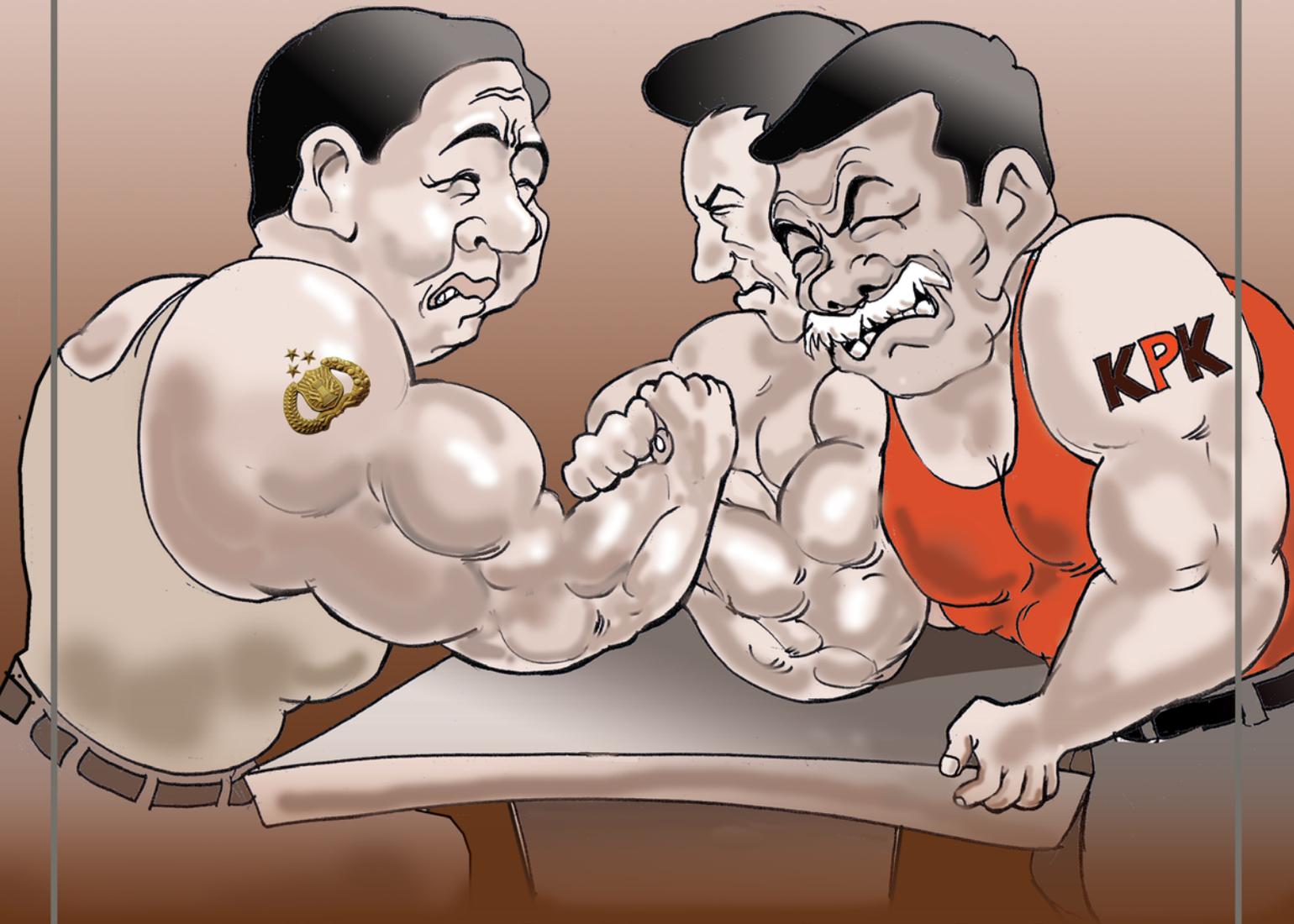


AL-ZAYTUN AKTIF HIASI DUNIA

BERITA INDONESIA[®]

EDISI 72 TAHUN V ★ NOVEMBER 2009

Rp 16.000 (Luar Jabodetabek Rp 17.500)



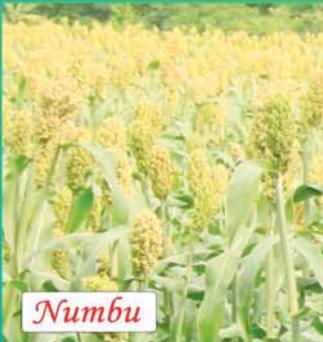
KRIMINALISASI vs POLITISASI

KPK-POLRI

PELAJARAN BUAT KPK, POLRI DAN KEJAKSAAN

Tersedia

BIBIT SORGUM VARIETAS NASIONAL DI AL-ZAYTUN

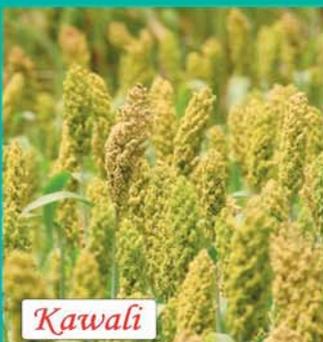


VARIETAS : NUMBU

Umur : 105 - 110 hari

Harga :

1. Packing 5 kg : Rp. 100.000
2. Packing 1 kg : Rp. 30.000
3. Packing 250 gr : Rp. 15.000
4. Packing 100 gr : Rp. 10.000

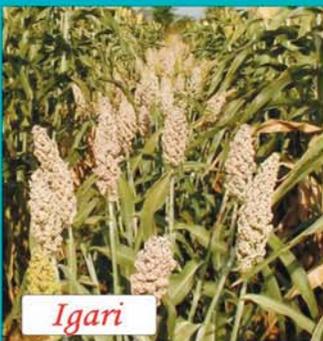


VARIETAS : KAWALI

Umur : 110 Hari

Harga :

1. Packing 5 kg : Rp. 100.000
2. Packing 1 kg : Rp. 30.000
3. Packing 250 gr : Rp. 15.000
4. Packing 100 gr : Rp. 10.000



VARIETAS : IGARI

Umur : 75 - 80 hari

Harga :

1. Packing 5 kg : Rp. 100.000
2. Packing 1 kg : Rp. 30.000
3. Packing 250 gr : Rp. 15.000
4. Packing 100 gr : Rp. 10.000



Sampul
desain:esero
karikatur:dendey

Edisi No.72/Th.V/November 2009

DARI REDAKSI 4
 VISI BERITA 5
 BERITA TERDEPAN 6
 BUNG WARTO 8
 HIGHLIGHT/KARIKATUR BERITA 9

BERITA UTAMA

KRIMINALISASI KPK VERSUS POLITISASI HUKUM | 12

Kekisruhan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi amat memusingkan publik dalam bulan-bulan terakhir ini. Kontroversi berpuncak tatkala dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Bibit dan Chandra) ditahan Polri (Kamis 29/10/2009) terkait sangkaan terlibat kasus pidana korupsi (pemerasan/penyuapan) dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini dianggap sebagai upaya mengkriminalisasi KPK.



Rekomendasi Tim Delapan 16
 Bibit-Chandra Tidak ke Pengadilan 17
 Pelajaran Buat KPK, Polri dan Kejaksaan 18
 Markus Merambat ke KPK 21
 Menanti Gebrakan 100 Hari KIB II 24
 Infrastruktur Jadi Prioritas 26
 Profil dan Program Anggota Kabinet 28
 Lima Wakil Menteri 33

LENTERA



AL-ZAYTUN AKTIF HIASI DUNIA

Pusat pendidikan terpadu Al-Zaytun berpartisipasi aktif menghiasi dunia melalui program terpadu yang dinamai program pemuliaan tanaman hias. Diawali dengan pembudidayaan di laboratorium kultur jaringan, menanam dan mengembangkan di lahan yang disediakan, kemudian mengolah hasil tanaman agar lebih bermanfaat. Dan yang lebih penting lagi, menyemaikan ilmu dan minat menanam itu kepada generasi muda.....34

BERITA WAWANCARA

Tanamkan Terus Nilai-Nilai Dasar Negara 46



BERITA KHAS

Lagu Lama Byarpet Listrik 48

BERITA POLITIK

Demi Yang Terbaik 50

BERITA MEDIA

Kekuatan Baru dari Dunia Maya 51



BERITA TOKOH

Alex Noerdin 52
 Prof. Dr. Mohammad Mahfud 52
 Regenerasi Tiga Pemimpin TNI 52
 Nila Djuwita Moeloek 53
 Tiga Pahlawan Nasional Baru 53

BERITA EKONOMI

Pat-gulipat di Bank Century 54

BERITA HUMANIORA

PR di Bidang Pendidikan 56

BERITA DAERAH

Permainan Tender di Purwakarta 57
 Agathis Menjadi Pilihan 58
 Jambi Mampu, Maju dan Mandiri 58

BERITA PUBLIK

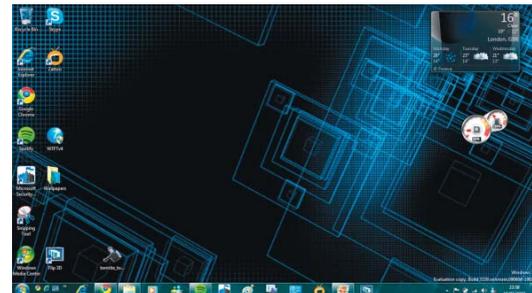
Menuju Hikkapi Profesional 59
 Modernisasi Persinyalan Kereta 60
 Pengurus Aspeknas Banyuasin 60

BERITA ADVERTORIAL

Tak Sekadar Melindungi 61

BERITA IPTEK

Panduan Sebelum Hijrah ke Windows 7 62



Membaca Cepat ala Google Fast Flip 64
 Android Mulai Mengebrak 64
 HTC HD2 – Sentuhan Berkualitas Tinggi 64
 Remaja 16 tahun Saingi Obama di Twitter 64
 Microsoft Merilis Antivirus Gratisan 64

BERITA HIBURAN

Setumpuk Berkah di Pulau Dewata 65

BERITA LINGKUNGAN

Pilih Hutan Kota Atau Beton? 66

► Demokrasi, Toleransi dan Perdamaian**PEMIMPIN UMUM:**

Syaykh Dr AS Panji Gumilang

PEMIMPIN REDAKSI:

Ch Robin Simanullang

REDAKTUR SENIOR:MYR Agung Sidayu
Imam Prawoto
Dendy Hendrias
Suryo Pranoto**IN HEADNEWS (LIPUTAN, LITBANG & PUSDAT):**

Mangatur Lorielcide Paniroy (Redaktur Eksekutif)

REDAKTUR:

Samsuri, Marjuka Situmorang, Dian Gina Rahayu

SEKRETARIS REDAKSI

Bantu Hotsan

STAF REDAKSI:Nawawi, Ikhwan Triatmo, Sarjiman,
Doan Adikara Pudan, Budi Rahardjo**WARTAWAN FOTO:**

Wilson Edward

KARIKATURIS:

Dendy Hendrias

KONTRIBUTOR:Syahbuddin Hamzah, Anis Fuadi, Chusnato,
Retno Handayani**DESAIN GRAFIS:**

ESERO Design, Arief Maulana

BIRO REDAKSI:Medan: Bontor Simanullang, Palembang: Sri
Windayani, Jawa Barat: Ade Wiharyana (Kepala),
Bernard Sihite, Tarakan: Sudirman Leonard Pohan,
Amerika Serikat: Mibsam Bahanan (Maryland),
Rukyal Basri (Philadelphia)**PENERBIT:**

PT Berita Satria Wiratama

Bekerjasama dengan Yayasan Pesantren Indonesia dan PT. Asasira

KOMISARIS:

Syaykh Dr AS Panji Gumilang

DIREKTUR/PEMIMPIN PERUSAHAAN:

Ch Robin Simanullang

WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN:

Samsuri

IKLAN DAN PROMOSI:

Imam Prawoto, Dian Gina Rahayu, Budi Rahardjo

KEUANGAN DAN UMUM:

Mangatur Lorielcide Paniroy

SIRKULASI DAN DISTRIBUSI:

Abdul Halim, Marjuka Situmorang, Bantu Hotsan

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA:Jl. Bukit Duri Tanjakan IX No. 8A Jakarta Selatan.
Telp. (021) 8292735, 8293113, 70930474
Fax. (021) 83787235**E-MAIL:**

redaksi@berindo.com - iklan@berindo.com

WEBSITE:

www.beritaindonesia.co.id

ISSN: 1907-977X

MEREK: Ditjen HAKI Sertifikat IDM No. 000.108.028

PERCETAKAN:

PT Gramedia (Isi di luar tanggung jawab percetakan)



Hujan yang turun sehari-hari membuat sejumlah wilayah di ibukota Jakarta tergenang

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Salam Sejahtera,

Sidang Pembaca,

Akhir-akhir ini kita disuguhkan berita kekisruhan penegakan hukum yang banyak mendapat perhatian publik. Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tiga institusi penegak hukum yang seharusnya bersatu padu memberantas korupsi, menegakkan hukum di negeri ini, malah saling berjibaku saling menyudutkan. KPK dianggap telah dikriminalisasi dengan dijadikannya oknum pimpinan KPK sebagai tersangka pembunuhan, pemerasan dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Publik membela dan mengagungkan KPK sebagai pahlawan pemberantasan korupsi. Apalagi pemutaran rekaman di Mahkamah Konstitusi, semakin meyakinkan opini publik adanya upaya kriminalisasi terhadap KPK.

Terlepas dari kekisruhan itu, ada satu kenyataan yang tak terbantahkan bahwa kepolisian, kejaksaan bahkan KPK sudah disusupi oleh Markus-Markus (makelar kasus) yang bergerak dengan sistematis membentuk mafia peradilan. Oleh sebab itu, kami mengangkat tema ini dalam rubrik Berita Utama kali ini. Masih dalam Berita Utama namun dengan tema yang berbeda, kami mengulas program 100 hari kerja Kabinet Indonesia Bersatu. Kira-kira janji-janji apa saja yang dilontarkan oleh para menteri di Kabinet yang baru ini.

Dalam rubrik *Lentera* yang kita nanti-nantikan, kami mengulas lengkap dalam bentuk wawancara tentang seni manajemen ala Al-Zaytun yang mengedepankan kebersamaan, dimana segala sesuatu yang telah dilakukan dan akan dilakukan selalu dipikirkan bersama, dibuat bersama dan dikerjakasikan. Pada bagian lain, pembaca juga disuguhkan dengan ulasan tentang Al-Zaytun sebagai laboratorium alam, juga terus aktif menghiasi dunia melalui program terpadu pemuliaan tanaman hias yang sedang dikembangkan di laboratorium kultur jaringan Mahad Al-Zaytun.

Sementara itu dalam *Rubrik Wawancara*, bersama tokoh pembawa obor toleransi dan perdamaian Syaykh AS Panji Gumilang, kembali ditegaskan bahwa rujukan bernegara adalah Undang-Undang Dasar yang diilhami nilai-nilai dasar yang harus terus-menerus disuarakan dan ditanamkan, tapi tidak harus merupakan doktrin yang kaku.

Tidak lupa kami juga menyajikan rubrik-rubrik menarik lainnya seperti Berita Iptek yang mengulas tentang hal-hal apa saja yang perlu Anda ketahui sebelum hijrah ke Windows 7 ; Berita Ekonomi tentang kisruh dana talangan untuk Bank Century (sekarang berganti nama menjadi Bank Mutiara) ; Berita Tokoh, dan sebagainya.

Akhir kata, kami ucapkan selamat membaca, semoga pembaca berkenan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Berbenah, Walau Terasa Pahit

Kekisruhan penegakan hukum telah menimbulkan kegalauan, hingga mencapai ubun-ubun, dalam satu bulan terakhir ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap telah dikriminalisasi dengan dijadikannya oknum pimpinan KPK sebagai tersangka pembunuhan, pemerasan dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Publik membela dan mengagungkan KPK sebagai pahlawan pemberantasan korupsi. Tetapi, di pihak lain secara bersamaan, justru terasa adanya politisasi penegakan hukum.

Keberpihakan suara publik yang cenderung membela KPK, tentulah lahir dari perbandingan rasional atas kenyataan prestasi KPK dalam memberantas korupsi yang dinilai sangat berhasil dibandingkan dengan prestasi polisi dan kejaksaan yang dinilai kurang berhasil.

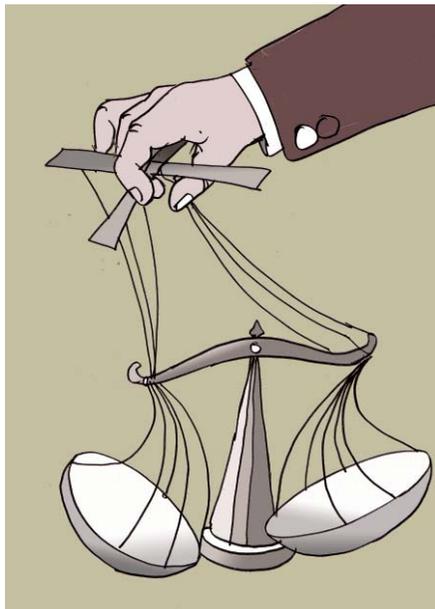
Semua rakyat Indonesia pasti ingin menjadikan Indonesia bebas dari korupsi. Maka kehadiran KPK, sebagai badan ad-hoc untuk menerobos kebuntuan pemberantasan korupsi sangat didukung seluruh elemen rakyat. Maka siapapun pasti tidak ingin terjadi kriminalisasi atau rekayasa pelemahan atas KPK.

Demokrasi yang sudah terbangun dalam sepuluh tahun terakhir telah membuka hak dasar bersuara bagi rakyat. Suatu kemajuan yang patut terus digalang dan disyukuri. Namun demokrasi haruslah diletakkan di atas landasan hukum, sebagai suatu sistem aturan main. Dalam demokrasi, hukumlah yang jadi panglima. Jangan malah sebaliknya, politik jadi panglima.

Dalam kaitan ini, kita ingin kekisruhan penegakan hukum ini segera dapat diakhiri. Sebab kontroversi penegakan hukum (pemberantasan korupsi), ini telah menyita banyak energi bangsa ini. Bahkan hiruk-pikuk kasus ini telah menenggelamkan informasi Rembuk Nasional yang digelar pemerintah membahas agenda pembangunan bangsa. Program 100 hari pemerintah pun sudah tertelan lebih 30 hari sejak Presiden dilantik.

Masalah ini sangat mungkin dapat diatasi lebih cepat, jika Polri dan kejaksaan dapat menyelesaikan tugasnya dengan lebih profesional dan mandiri dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, sekaligus mempertimbangkan moralitas dan rasa keadilan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Presiden ketika menyampaikan pidato menyikapi kasus ini, Senin 23/11/2009 agar Polri dan kejaksaan tidak membawa kasus Bibit-Chandra ke pengadilan.

Jika memang Polri dan kejaksaan tidak menemukan bukti yang kuat dan meyakinkan, demi kepastian hukum tidak perlu ragu untuk menghentikan kasus Bibit dan Chandra ini. Sebab, ada sebuah prinsip dalam penegakan hukum dan keadilan, bahwa lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum seorang yang tidak bersalah.



Walaupun memang sebaliknya, jika Polri dan kejaksaan menemukan bukti yang kuat dan meyakinkan, demi kepastian hukum pula, tidak perlu ragu untuk melanjutkan kasus Bibit dan Chandra ini ke pengadilan. Sebab dalam hal prinsip kepastian hukum, biarpun langit runtuh, keadilan harus ditegakkan. Prinsip ini menuntut keberanian tanpa pamrih, dan tidak takut kehilangan jabatan. Maka, dari sudut pandang ini, biarlah pengadilan yang memutuskan secara adil. Namun, sebagaimana dikemukakan Presiden, perlu adanya kearifan untuk tidak melanjutkan kasus ini ke pengadilan.

Sangat mungkin memang KPK benar. Tetapi, penyidik Polri juga belum tentu seratus persen salah. Namun kejadian ini mengisyaratkan, KPK juga harus berbenah diri. Baik dalam proses birokrasi penegakan hukum maupun dalam mencegah persekongkolan dengan Markus-Markus.

Sebab, tindak pidana pemerasan yang dilakukan oknum penyidik KPK, sudah pernah terjadi pada Maret 2006. Dua orang Markus yang menaruh sebagai penyidik KPK (gadungan) juga sudah pernah ditangkap (2 September 2007). Rekaman sadapan pembicaraan telepon Anggodo yang membuat publik terkejut, sedih, marah dan galau, selain mengindikasikan telah adanya skenario (rekayasa) pengkriminalisasian oknum pimpinan KPK, memberi petunjuk bahwa para Markus juga telah ikut berperan (memengaruhi) proses penegakan hukum di KPK.

Semua ini memperlihatkan, kiranya KPK harus lebih meningkatkan komitmen pada prinsip *zero tolerance* terhadap hal-hal yang terkait dengan tindak pidana korupsi, supaya diterapkan dengan tegas, termasuk kepada (di dalam) KPK sendiri.

Dengan demikian, dukungan publik yang demikian besar, yang disertai dengan akseptasi (harapan) yang juga demikian besar, tidak sampai kehilangan kepercayaan kepada KPK. Saat ini, KPK masih dipandang oleh publik sebagai lembaga hukum pemberantas korupsi yang patut dipercaya dan didukung sepenuhnya.

Sehingga, walau terasa pahit, apa yang dialami KPK dalam beberapa bulan terakhir ini, KPK (juga Polri dan Kejaksaan) sepatutnya menjadikan momentum ini untuk berbenah diri. Tidak cukup dengan melakukan reaksi bantah dan membantah seperti lazim dilakukan para pejabat pemerintah di negeri ini, tetapi sama sekali tidak berusaha membenahi birokrasi dan sistem penegakan hukum.

Komitmen reformasi peradilan sungguh tengah diuji. Kiranya kekisruhan ini justru dapat memberikan jawaban (momentum) atas apa yang terjadi dan menjadi solusi membenahan birokrasi dan sistem penegakan hukum, sehingga dapat berguna mengakselerasi pencapaian tujuan menyejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa ini.

Redaksi

Surat atau komentar tentang apa saja baik berkenaan dengan isi majalah Berita Indonesia maupun ide/gagasan/pandangan tentang isu-isu aktual dapat dikirimkan ke Redaksi Berita Indonesia, dengan alamat sebagai berikut:

- email : redaksi@berindo.com
- surat : Jl. Bukit Duri Tanjakan IX No. 8A Jakarta Selatan 12840
Telp. (021) 8292735, 8293113, 70930474
Fax. (021) 83787235

Beri Kesempatan Kabinet Baru Bekerja

Pro kontra dan kritik tajam dilayangkan kepada komposisi Kabinet Indonesia Bersatu II bentukannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Boediono. Ada yang menilai kapabilitas dan kinerja sejumlah menteri masih diragukan. Meskipun tidak sempurna seperti yang diharapkan masyarakat Indonesia, sebaiknya menghormati keputusan presiden dan itu adalah hak prerogatif presiden. Biarlah para menteri bekerja dulu, karena tidak adil menilai tim yang belum mulai bekerja. Meski masih merekrut wajah-wajah lama, Presiden SBY melakukan perubahan masif dalam komposisi kabinetnya. Dan masyarakatpun diberi hak untuk mengevaluasi kinerja para menteri secara bertahap, mulai 100 hari, satu tahun, dan lima tahun. Dari sana baru bisa dinilai bagaimana kerja para anggota kabinet, berdasar pada paramater yang ditetapkan. Kalau perlu dikritik habis-

habisan. Sebaliknya kalau kinerja kabinet bagus jangan pelit untuk memberikan pujian.

Farah Hanafiah
farah_han@plasa.com

Perhatikan Pendidikan Rakyat

SBY-Boediono resmi memimpin negeri ini selama 2009-2014. Fokus pada pendidikan sebagai pilar membangun generasi bangsa berpuluh-puluh tahun mendatang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk melahirkan generasi yang baik. Pemerintah diharapkan dapat menjalankan program pendidikan yang merakyat dan menciptakan pendidikan untuk semua (*education for all*). Masyarakat bisa mengakses pendidikan bermutu dan layak, tanpa harus dibedakan. Serta menjamin masyarakat yang secara ekonomi masih lemah. Pemimpin nasional harus menentang keras pendidikan yang beraroma kapitalistik dan neoliberal. Dengan selalu mengingat perjuangan Hasyim Asy'arie Ahmad Dahlan, Ki Hajar Dewantara, dan bapak bangsa lainnya yang berjuang bagi masyarakat di negeri ini agar memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Saatnya pendidikan memihak rakyat!

Hendara Sugiantoro
hendra_lenteraindonesia@yahoo.co.id

Rencana Penaikan Gaji Menteri

Sejumlah pihak mengancam rencana kenaikan gaji Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II yang saat ini sedang dirumuskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan). Mulai dari gaji presiden hingga ke struktur paling bawah lembaga negara. Sesungguhnya wacana

penaikan gaji pejabat negara dinilai sebagai hal yang wajar karena Indonesia tidak mengalami krisis yang terlalu parah. Penaikan gaji adalah hal yang logis jika para menteri memiliki target dan kinerja yang tinggi. Di sisi lain, SBY dan KIB I dinilai sudah bekerja dengan baik selama lima tahun pertama, wajar bila gaji dinaikkan. Mengingat porsi tanggungjawab menteri yang begitu besar, diperlukan kearifan semua pihak. Jika dibandingkan dengan negara lain, gaji para menteri di Indonesia relatif jauh lebih kecil. Sementara kapasitas kerja dan kontribusi tenaga dan pikiran yang diberikan para menteri tidak bisa dipandang sebelah mata. Wajar bila gaji menteri ditinjau kembali. Penaikan gaji menteri memang tidak mudah karena merupakan hal yang sensitif. Sebab jika gaji menteri dinaikkan, gaji pejabat negara lain juga harus naik, termasuk presiden, wakil presiden, dan pejabat negara lainnya.

Ade Rachman
aderachman_bgr@plasa.com

Menghambat Pemberantasan Korupsi

Perseteraan antara Polri dan KPK yang berlangsung belakangan ini cukup banyak menyita energi, akibat polemik dan berbagai tanggapan di media massa yang terus berkembang. Terlebih setelah kedua pimpinan KPK tersebut ditetapkan kepolisian menjadi tersangka dan ditahan dan dilakukan beberapa jam setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan sela, agar pemerintah menunda pemberhentian mereka sampai ada putusan akhir MK. Dalam sidang lanjutan MK juga meminta semua bukti termasuk transkrip dan rekaman diserahkan. Sebagai negara hukum Indonesia, segala sengketa dan setiap kasus, hendaknya diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku. Siapapun orangnya tak terkecuali penyelesaian perseteruan antara Polri dan KPK. Sehingga kasus yang menimpa aparat penegak hukum dapat terselesaikan, dan penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Sebab dikhawatirkan, perseteruan di antara aparat penegak hukum akan menjadi hambatan dalam upaya memberantas korupsi. Mari kita hormati proses hukum dengan tidak membuat opini yang memperkeruh suasana dan bias kasusnya. Kembalikan semua masalahnya pada mekanisme hukum karena negara kita merupakan negara hukum.

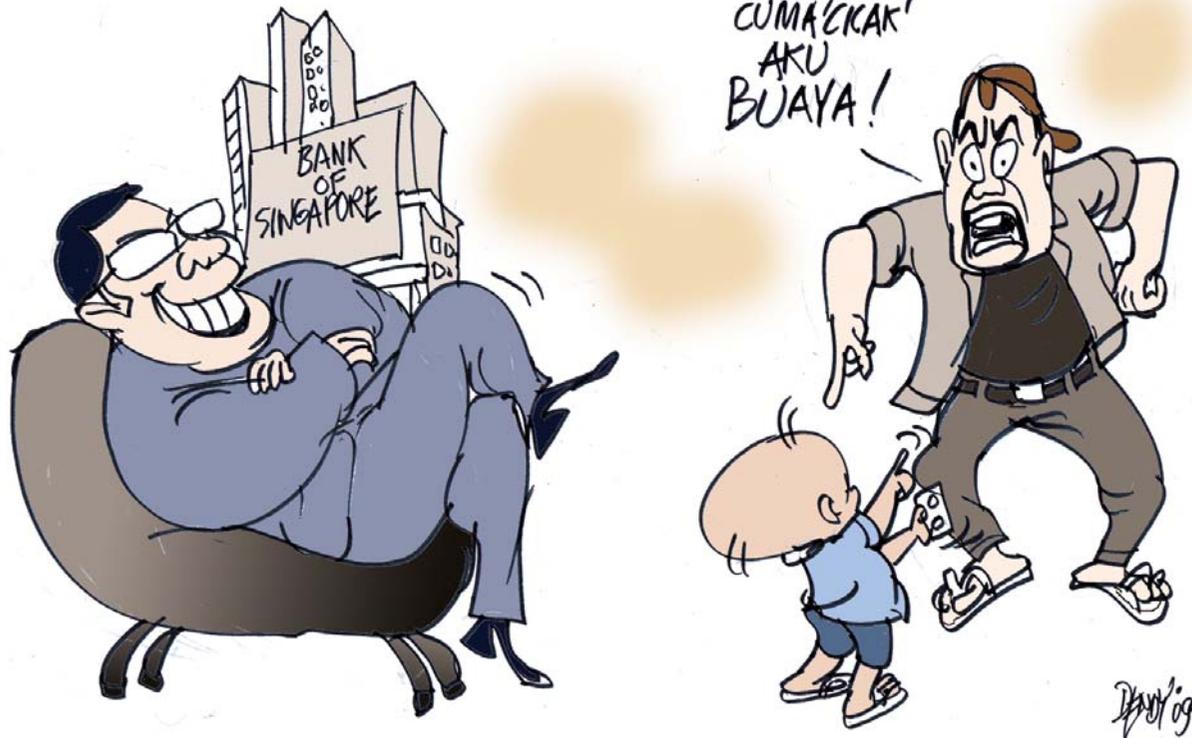
Dini Kinanthi
dhinikina@plasa.com

PASTIKAN TARIF IKLAN **BERITA INDONESIA**

Halaman	Ukuran	Harga
Jacket Cover	204 x 268 mm	Rp. 40.000.000
Cover 2	204 x 268 mm	Rp. 20.000.000
Cover 2 Plus	408 x 268 mm	Rp. 35.000.000
Cover 3	204 x 268 mm	Rp. 17.000.000
Cover 3 Plus	408 x 268 mm	Rp. 30.000.000
Cover 4 (Kulit Belakang Luar)	204 x 268 mm	Rp. 25.000.000
1 Him Dalam (Full Page)	204 x 268 mm	Rp. 12.000.000
1 Him Dalam Berhadapan (Facial Page)	408 x 268 mm	Rp. 25.000.000
1 Him Dalam Tengah (Center Page)	408 x 268 mm	Rp. 32.000.000
Advertorial / Pariwara	204 x 268 mm	Rp. 12.000.000
2/3 Him Vertical Trimed	204 x 213 mm	Rp. 9.000.000
2/3 Him Horizontal Trimed	153 x 268 mm	Rp. 8.000.000
1/2 Him Horizontal Trimed	102 x 268 mm	Rp. 7.000.000
1/2 Him Vertical Trimed	204 x 134 mm	Rp. 6.000.000
1/3 Him Vertical Trimed	204 x 67 mm	Rp. 4.000.000
1/3 Him Horizontal Trimed	51 x 268 mm	Rp. 3.000.000

Iklan kupung (kanan & kiri) minimal lima kali pemuatan @ Rp. 5.000.000

PEMASANGAN IKLAN:
Telp. (021) 83701736, 8292735, 70930474
Fax. (021) 83787235



Tempat Anda untuk Berlangganan Majalah BERITAINDONESIA

Anda yang berada di luar Pulau Jawa dapat menghubungi alamat di bawah ini :

BANDA ACEH : BTN Ajuen, Lr Melati No. 118 Kec, Peukan Bada, Banda Aceh 23351. Tlp (0651)41093, **MEDAN** : Komplek Vila Palm Kencana Blok R No. 10 KM 12, Medan-Binjai 20351. Tlp (061)8460646, **SIANTAR** : Jl. Rambung No. 18, Pematang Siantar, **LABUHAN BATU** : Jl. Padang Bulan No. 28, Rantau Prapat. **KARO** : Jl. Sangab Enlau No. 51 Kaler Jahe. **RIAU** : Jl. Ababil No. 15B Rt 07 Rw. 07, Kel. Kampung Melayu, Kec. Sukajadi Pekanbaru 28124, Riau. Telp (02761) 26578, **RIAU UTARA** : Perum Beringin Patra Gg. Poros No. 3 Rt 02/09, Bukit Datuk, Dumai 28825. Telp (0765)36219. **RIAU SELATAN** : Jl. Pattimura No. 28C Rt. 06/02, Kel. Skip Hilir, Rengat Timur, INHU, Riau. Telp (0769)21932, **RIAU KEPULAUAN** : Jl. Sri Pulau Gg. Kayu Manis No. 129W Rt. 03/02, Kel. Bengkalis Riau. Telp (0766)22924, **PADANG** : Jl. Pamancangan I No. 1Rt. 006/02 Kel. Pasar Gadang, Padang Selatan, Sum-Bar 25210. Telp (0751)27289, **JAMBI** : Jl. Depati Purbo, Komplek Karya Telawai Permai II No. 06 B, Kel. Pematang Sulur RT 16, Kec. Telanaipura, Kota Jambi. Telp 081366106709, **BENGKULU** : Jl. Kemang Manis No. 8 Rt. 08/Rw. 2, Kel. Sawah Lebar, Kec. Gading Cempaka, Kodya Bengkulu 38228. Telp (0736)20663, **PALEMBANG** : Perum Mas Karebet Blok A1 No. 15 Palembang 30154. Telp (0711)416545, **MUARA ENIM** : Perum Gunung Ibul Blok C2 No. 8 Kab. Prabumulih Sumatera Selatan Telp (0713)322420, **PANGKAL PINANG**: Achmad Effendi, Jl. Sriwijaya RT.001/001, Gedung Nasional, Taman Sari. **LAMPUNG** : Jl. Wiraswasta No. 23 Rt. 02 Lk. I Kel. Gedong Meneng, Kec. Kedaton, Bandar Lampung 35145. Telp (0721)701281, **KOTABUMI** : Jl. Jend. Sudirman No. 49 Kota Gapura Kotabumi Lampung Utara. Telp (0724)328369, **PONTIANAK** : Jl. Karimata No. 19, Kelurahan Sui Bangkong Pontianak 78116, **SINGKAWANG** : Jl. Pembangunan Gg. Sukaramah No. 27A Singkawang Kal-Bar, **SINTANG** : Jl. Imam Bonjol No. 54 Sintang 78611. Telp (0562)21544, **KETAPANG** : Jl. Kol. Sugiono No. 48 Ketapang, **BALIKPAPAN** : Jl. Sepinggan XI, Rt 33 No. 6, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kodya Balikpapan 76115. Telp (0542) 764365, **PASIR** : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 12 Rt. 05 Rw. 02 Tanah Grobot Kab. Pasir, Kal-Tim. Telp (0543)22335, **SAMARINDA** : Jl. Latsitarada III, Perum Bukit Indah Blok B No. 6, Kel. Sel Kunjang Samarinda. Telp (0541)273035, **BERAU** : Jl. SM Aminuddin No. 749 Tanjungredep Kab. Berau Kal-Tim. Tlp (0554)23130, **BANJARMASIN** : Komplek Kayu Tangi I No. 28 Rt. 45, Kec. Banjar Utara Banjarmasin 70123. Telp (0511)304396, **PALANGKARAYA** : Jl. Karanggan No. 1 Kelurahan Tanjung Pinang, Kec. Pahandut, Kodya Palangkaraya 73113, Kalimantan Tengah. Telp (0536)38958, **PANGKALAN BUN** : Jl. Perwira No. 1 Rt/Rw 05, Kel. Mendawai, Kec. Arsel, Pangkalan Bun Kal-Teng. Telp (0532)24452, **KAPUAS** : Jl. Seroja No. 2 Selat Dalam, Kuala Kapuas, Kal-Teng. Telp (0513)24082, **BUNTOK** : Jl. Ampah Buntok, No. 24 Rt. 40. Ampah, Barito Selatan, Kal-Teng. Telp (0622)31334, **MANADO** : BTN Nusantara Permai Blok C No. 11 Mapanget Barat, Manado 9524, **MAKASSAR** : Komplek Mangasa Permai Jl. Tallasalapang II Blok J1 No. 12, Makassar, Sul-Sel. Telp (0411)863655, **PAREPARE** : Jl. Wakke'e No. 5 Parepare Sul-Sel. Telp (0421)22785, **GOWA** : Jl. Syekh Yusuf V/I Gowa. Telp (0411)861661, **BONE** : Jl. Hussain Jeddawi Baru No. 9A, Bone, Sul-Sel. Telp (0481)2000041, **PALOPO** : Jl. Imam Bonjol No. 3 Palopo. Telp (0471)24310, **PALU** : Jl. Tulip II No. 1, Perumnas Balaroa, Palu, Sul-Teng. Telp (0451)460717, Fax. (0451)460717, E-mail: ypi_calebaswustho@yahoo.com. **KENDARI** : Jl. A. Yani 204 Kendari, Telp (0401) 390913, HP. 081320696320 a/n. S. Edi Nurrahman. **BUTON** : Jl. MH. Thamrin No. 32A, **AMBON** : BTN Kanawa Indah Blok C-3 No. 12 Air Kuning, Ds. Batumerah Kodya Ambon, Maluku 97128. Telp (0911)310427, **TIMIKA** : Jl. Pendidikan No. 10, Desa Kopra Kopa, Kec. Mimika Baru, Kab. Mimika/Timika, Irian Jaya, **KUPANG** : Jl. Trikora No. 16 Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Air Mata, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang NTT 85000, **BELU** : Perum Ray Belu Permai A/9, Belu. Telp (0389)22408, **MATARAM** : Jl. R. Suprpto No. 37 Ampenan, Kodya Mataram 83000. Telp (0370)632331, **LOMBOK** : Jl. Pejanggih No. 66 Pancor. Lombok. Telp (0376)21718, **SUMBAWA** : Jl. Hasanuddin Gg. Teratai, Sumbawa. Telp (0371)21070, **BALI** : Jl. Buana Raya Gg. Buana Kerti No. 3 Pd.Sambian Denpasar Barat 80117. Telp (0361)485890, **MALAYSIA** : 32 Jalan Tengku Ampuan Zabedah 9/A, 40100 Shah Alam, Selangor. Telp (03)55137009, **NEW ZEALAND** : Ikhwani Triatmo. **JAWA BARAT** : Ade Wiharyana, Jl. Purnawarman No.5, Bandung – **TARAKAN** : S.L. Pohan, Jl. Gereja Rt.17 No.59, Markoni, Tarakan - Kaltim 771211 – **PURWAKARTA** : Bernard Sihite, Kantor Perwakilan PWI, Jl. KK Singawinata No.23, Purwakarta, Tlp. (0264) 205081

Asal Jangan Jadi Serep

Jika tidak diiringi dengan pembagian tugas yang jelas, keberadaan wakil menteri dikhawatirkan hanya sebagai ban serep saja.

Indonesia pertama kali memiliki Wakil Menteri September tahun lalu. Saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengangkat Triyono Wibowo sebagai wakil Menlu membantu tugas Menlu Hasan Wirayuda, sebelum digantikan Marty Natalegawa. Wakil menteri diperlukan karena adanya peningkatan aktivitas Menlu ke beberapa negara dalam rangka meningkatkan diplomasi luar negeri Indonesia.

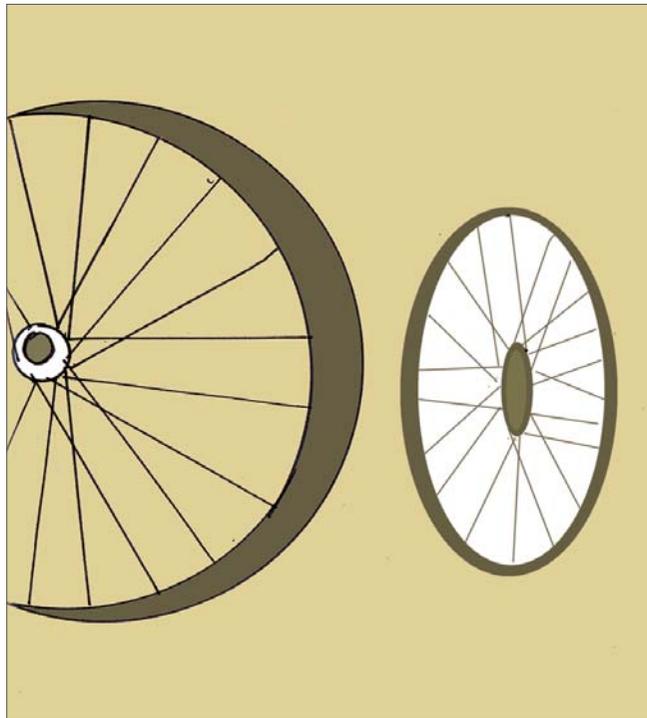
Dalam pemerintahan SBY periode kedua ini akan ada 11 pos wakil menteri yang akan diangkat, 5 di antaranya telah dilantik pada 11 November 2009 di Istana negara, Jakarta. Di antaranya Wakil Menteri Pertanian, Dr Bayu Krishnamurti; Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Dr Hermanto Dardak; Wakil Menteri Perhubungan, Dr Bambang Susantono; Wakil Menteri Perindustrian, Ir Alex Retraubun; Wakil Menteri Perdagangan, Dr Mahendra Siregar. Semuanya berasal dari kalangan profesional dan eselon I, setelah melalui uji kelayakan dan kepatuhan.

Keberadaan mereka sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pada penjelasan Pasal 10 UU No 39/2008, dinyatakan bahwa wakil menteri adalah pejabat karier. Dengan kata lain tidak memberikan ruang bagi wakil menteri dari kalangan partai politik. Walaupun untuk memilih wakil menteri adalah hak prerogatif Presiden, namun presiden seperti yang konsisten berpijak pada undang-undang tersebut.

Jika dilihat dari latar belakang para wakil menteri, mayoritas memiliki pengalaman dalam pelayanan publik. Perimbangan presiden dinilai sangat tepat untuk mendampingi para menteri dalam menjalankan dan mensosialisasikan pelaksanaan program setiap kementerian. Sebagaimana kita ketahui, mayoritas menteri pada kabinet Presiden SBY mayoritas dari partai yang minim pengalaman dalam pelayanan publik. Dalam arahnya, Presiden mengingatkan kepa-

da para wakil menteri terpilih untuk tidak saling menyaingi tetapi untuk membantu tugas menteri.

Di satu sisi, keberadaan wakil menteri ini bisa dipahami untuk membantu meringankan beban tugas menteri yang berat. Namun, di sisi lain, muncul beberapa pertanyaan bahkan protes karena menurut



sebagian kalangan, 11 wakil menteri merupakan pemborosan anggaran negara. Para pengamat juga melihat wakil menteri hanya akan menimbulkan dualisme kepemimpinan dalam departemen sebab kedudukan wakil menteri tidak memiliki wewenang yang jelas. Direktur Eksekutif Lingkaran Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti misalnya, membandingkan hal itu seperti masalah antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla saat masih menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang berbeda pendapat dalam kasus Bank Century. Hal itu dikatakannya karena menteri sudah memiliki bawahan sekjen, staf ahli dan sekretaris pribadi dinilai cukup untuk membantu kerja menteri.

Senada dengan Rangkuti, ekonom Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), Aviliani, menilai ja-

batan wakil menteri tak diperlukan. Pemerintah seharusnya menyiapkan perwakilan kementerian di daerah agar pelaksanaan proyek-proyek untuk perekonomian benar-benar terlaksana. Selama ini program pembangunan tersendat di daerah. Peranan gubernur yang seharusnya menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, juga tak berjalan. Ia menegaskan, pemerintah seharusnya lebih memikirkan jika benar-benar ingin pembangunan efektif, dengan menunjuk seorang yang bisa menjadi perwakilan pusat di daerah untuk memastikan pembangunan berjalan.

Di samping sebagai fungsi pengawasan pembangunan di daerah, selama ini konsentrasi departemen selalu ada di pusat, sudah saatnya ada penyebaran, sehingga ledakan penduduk di Ibu Kota bisa berkurang. Dan tidak tertutup kemungkinan yang lainnya juga akan ikut, sehingga tercipta pola pembangunan yang merata. Contohnya, dengan penempatan perwakilan menteri di daerah, setidaknya akan ada kantor baru di daerah, akan menyerap SDM lokal, dan akan memiliki efek yang berkelanjutan.

Apalagi menteri tidak mempunyai tugas yang spesifik, di sana wakil menteri akan semakin tertantang untuk menciptakan program-program untuk pembangunan. Jika tidak, keberadaan wakil menteri hanya akan menambah gemuk organisasi negara yang justru harus dirampingkan.

Kalaupun penyebaran perwakilan menteri di daerah belum bisa dilakukan, setidaknya tugas antara menteri dan wakil harus diperjelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis mengatakan, wakil menteri jangan hanya dijadikan ban serep, tapi juga dapat semakin mempertajam visi dan misi kerja setiap kementerian yang memiliki tugas berat. Menteri akan semakin lebih kreatif lagi untuk mengembangkan perencanaan-perencanaan ke depannya, yang lebih progresif untuk mempercepat pencapaian target.

Untuk melihat apakah ada efektivitas koordinasi antara menteri dan wakil menteri, presiden sebaiknya mengevaluasi secara berkala kinerja para menteri. Jangan sampai wakil menteri hanya menjadi awak dan sikil. ■ HTS, NIR

Gaji Pejabat Diusulkan Naik

23/10 - Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di bawah Menteri EE Mangindaan tengah menggodok kenaikan gaji pejabat negara untuk tahun 2010, termasuk presiden dan menteri yang baru dibentuk dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Jika disetujui, diperkirakan 7.000 lebih pejabat negara di seluruh Indonesia akan menerima kenaikan gaji tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 mengenai Pokok-Pokok Kepegawaian, yang termasuk dalam kategori pejabat negara adalah presiden/wakil presiden dan para menteri, pimpinan DPR dan pimpinan lembaga tinggi negara lainnya, kepala daerah beserta wakilnya, dan hakim pengadilan. Menanggapi rencana itu, Fraksi PDI-Perjuangan DPR menyatakan tidak setuju. "Fokus program Presiden adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, kenapa yang diutamakan peningkatan gaji pejabat?" kata Ketua F-PDIP Tjahjo Kumolo. Menurutnya, seharusnya yang diprioritaskan pemerintahan SBY-Boediono adalah program di bidang pertanian agar kesejahteraan petani meningkat atau peningkatan kesejahteraan buruh.

RI Daftar 23 Produk Budaya Unesco

27/10 - Sejak diakuinya batik sebagai warisan dunia oleh UNESCO, pemerintah Indonesia kembali mendaftarkan 23 produk budaya dan alam Nusantara ke lembaga PBB, UNESCO. Sampai saat ini tiga peninggalan budaya Indonesia telah diakui oleh UNESCO yakni Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Situs Sangiran. Sedangkan produk budaya yang lain, seperti Tana Toraja, dalam proses pendaftaran dan telah mendapat nomor antrian 10.038 untuk kategori gabungan alam dan budaya. Bali *landscape* yang sempat dikembalikan karena persyaratannya kurang lengkap, setelah dilengkapi kini dikirim-



kan kembali ke UNESCO untuk *Cultural Landscape of Bali Province* pada September. Sementara itu, Kota Gede (DI Jogjakarta), Kota Lama Banten (*tentative list*), Muara Takus (Jambi), Leangleang (Sulawesi Selatan), dan Bengteng Bandanaira di Pulau Banda sedang dalam proses. Perlu diketahui, keuntungan jika mendapat pengakuan UNESCO adalah sebagai salah satu upaya mempromosikan negara yang akan menguntungkan pariwisata, kemudian mendapat kepastian perlindungan dari UNESCO bila produk budaya yang didaftarkan mengalami kerusakan.

Sumpah Pemuda Alami Pendangkalan Makna

28/10 - Hilangnya semangat kekuatan dalam keberagaman membuat Sumpah

Pemuda mulai mengalami pendangkalan makna. Padahal seperti disebutkan sejarahwan Taufik Abdullah dari LIPI, para pemimpin bangsa seharusnya menyadari bahwa sumpah pemuda merupakan momen simbolik paling

Karikatur Berita



penting dalam perjalanan bangsa selain proklamasi kemerdekaan. Menanggapi masalah ini, Ketua KNPI Azis Syamsuddin mengatakan, Sumpah Pemuda harus terus dipelihara dan ditingkatkan untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Menurutnya, kalau dulu semangat Sumpah Pemuda dikobarkan untuk melawan penjajah, sekarang semangat tersebut harus digelorkan untuk melawan kemiskinan, korupsi, ketidakadilan, dan ideologi-ideologi yang bisa memecah persatuan bangsa dan negara. Sementara itu, Menegpora Andi Alfian Mallarangeng mengatakan, semangat Sumpah Pemuda yang dibangun oleh pemuda-pemuda pada 1928, sekarang harus ditanamkan melalui kegiatan kepanduan/pramuka. Karena, dalam kegiatan kepanduan, orang dididik untuk bertoleransi, bersikap sosial, mandiri, disiplin, egaliter, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa.

ITB Membuat Teropong Surya

31/10 - Teropong surya terlengkap di Indonesia untuk pengamatan Matahari resmi dioperasikan di Observatorium Bosscha, Lembang, Jawa Barat. Teropong surya adalah satu dari dua teropong generasi baru di Bosscha yang dibuat sendiri oleh Institut Teknologi Bandung (ITB). Seluruh komponen dan sistem mekanisme kerja teleskop dibuat

Obama Akan Kunjungi Indonesia 2010

15/11 - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden AS Barack Obama di sela-sela KTT APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) di Singapura (15/11). Dalam pertemuan empat mata tersebut, kedua kepala negara sepakat meningkatkan kerjasama bilateral yang lebih baik dengan kemitraan yang komprehensif, meliputi bidang kesehatan, pendidikan, dan tenaga kerja. Antiterorisme, perubahan iklim, upaya menstabilkan ekonomi dunia dan pertumbuhan ekonomi juga menjadi topik pembicaraan kedua pemimpin. Dalam kesempatan itu, Obama berjanji datang ke Indonesia tahun depan (2010) guna memenuhi undangan Presiden

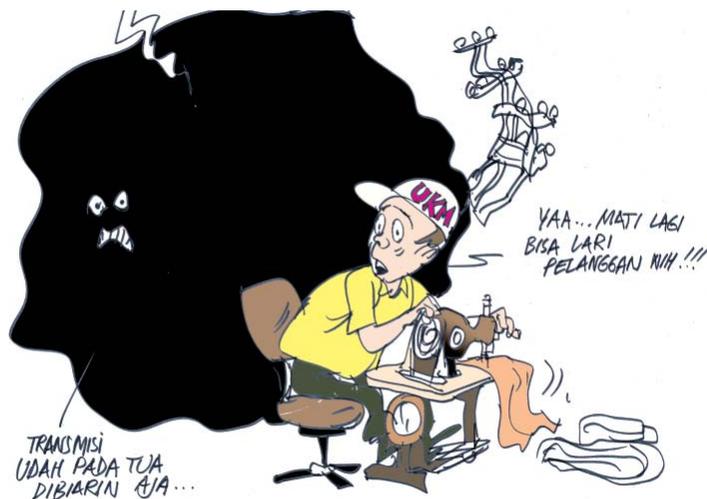


SBY. Ia berharap, istri, anak, dan dirinya sendiri bisa mengunjungi tempat-tempat saat dia pernah menjalani masa kecilnya di Indonesia saat mengikuti ibu dan ayah tirinya Lolo Soetoro yang warga negara Indonesia. Ketika itu ia sempat tinggal di Menteng Jakarta Pusat dan sekolah di SD Santo Fransiskus Asisi di Tebet selama tiga tahun, sebelum kemudian pindah ke SD Negeri Menteng.

oleh ITB, kecuali tiga set lensa Coronado. Teleskop ini bisa digunakan untuk mengamati ledakan Matahari dengan sangat baik. Fungsi utama teropong ini adalah dapat digunakan untuk pendidikan sains dan astronomi bagi masyarakat luas untuk merangsang banyak

pelajar lebih menyukai astronomi. Teropong tersebut bisa dioperasikan secara tayangan langsung (real time). Data dan citra hasil pemantauan ditayangkan di layar monitor Worldwide Telescope hasil sumbangan Microsoft serta di situs ITB. Diperkirakan biaya pemba-

Karikatur Berita



ngunan fasilitas teropong tersebut menghabiskan Rp 600 juta dari dana dalam negeri dan luar negeri.

SNMPTN Dihapus

06/11 - Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2012 diharapkan sudah bisa dihapus karena seleksi masuk perguruan tinggi negeri akan diintegrasikan dengan ujian nasional. Namun, sebelum diterapkan, pelaksanaan ujian nasional harus dibenahi terlebih dahulu. Mendiknas Mohammad Nuh saat menyampaikan Program 100 Hari-nya mengatakan, polemik masalah ujian nasional (UN) ini tak akan pernah selesai karena selalu ada pro dan kontra. Jadi daripada membahas perbedaan pandangan, dia mengatakan akan jauh lebih baik jika berkonsentrasi pada upaya membuat UN lebih baik dan dapat dipercaya. Keterlibatan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia secara aktif sejak awal penyusunan soal, pengawasan, hingga evaluasi pelaksanaan UN, diharapkan bisa menjamin hasil UN dan menjadi bahan penilaian ujian masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Kehadiran PTN pada dasarnya ikut melengkapi dan menyempurnakan proses UN sehingga tidak ada lagi kecurangan-kecurangan.

Pramuka Indonesia Terbanyak Di Dunia

07/11 - Saat ini Indonesia memiliki 17

juta orang anggota Pramuka dan merupakan yang terbesar di dunia. Hal itu disebabkan setiap pelajar yang mengenyam sekolah negeri otomatis menjadi anggota pramuka. Berbeda dengan kegiatan pramuka di negara-negara lain. Program ini oleh beberapa negara lain dinilai bagus sehingga ingin diikuti. Thailand dan Jepang misalnya, ingin meniru Indonesia agar pelajarinya otomatis menjadi anggota pramuka. Saat ini Indonesia sudah mulai mengembangkan pramuka berbasis masyarakat, seperti aktivitas dan organisasi atau kegiatan kepemudaan. Gugus depan pramuka diharapkan akan membantu masalah-masalah di pedesaan. Sementara itu, pada tahun 2012 akan diperingati satu abad berdirinya pramuka Indonesia. Pada saat itu, APRSC ke-24 juga akan dilangsungkan. Terkait dengan hal tersebut, Indonesia berharap bisa menjadi tuan rumah di bumi perkemahan Cibubur. Untuk mendukung kegiatan-kegiatan kepramukaan sendiri, saat ini di bumi perkemahan Cibubur sedang dibangun tempat konferensi dan tempat penginapan bintang tiga.

Hasil Audit BPK atas Kasus Bank Century

23/11 - Setelah melalui jalan yang panjang dan berliku, akhirnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan hasil audit investigasi atas kasus

Bank Century kepada DPR. BPK menemukan adanya indikasi rekayasa dan perbuatan melawan hukum dalam pengucuran dana *bailout*, yang diputuskan dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada 21 November 2008 yang dihadiri oleh Menkeu selaku Ketua KSSK Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono yang kini sebagai wapres, Sekretaris KSSK Raden Pardede, Ketua Bapepam dan LK, serta anggota Dewan Komisiner LPS. Status hukumnya dipertanyakan karena tidak dibentuk dengan UU. Dari temuan BPK, sejak awal proses akuisisi, Bank Century telah dinyatakan bermasalah sehingga dalam hal ini, BI yang dipimpin oleh Boediono tidak tegas dan prudent dalam menerapkan aturan dan persyaratan terhadap sejumlah pelanggaran yang dilakukan Bank Century selama 2005-2008. BPK menemukan penyaluran dana penyertaan modal sementara (PMS) sebesar Rp6,7 triliun dilakukan melalui empat tahap dimana ada tambahan PMS pada tahap kedua sebesar Rp2,2 triliun yang tidak dibahas dengan Komite Koordinasi (KK). Diketahui, PMS tahap kedua sebesar Rp2,2 triliun itu disalurkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dengan permintaan dari manajemen Bank Century. Padahal, ketentuan Peraturan LPS Nomor 5/PLPS/2006 tidak memungkinkan LPS untuk memberikan bantuan dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditas. Temuan BPK tersebut akan ditindaklanjuti oleh Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).



Kriminalisasi KPK Vers

Kekisruhan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi amat memusingkan publik dalam bulan-bulan terakhir ini. Kontroversi berpuncak tatkala dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Bibit dan Chandra) ditahan Polri (Kamis 29/10/2009) terkait sangkaan terlibat kasus pidana korupsi (pemerasan/penyuapan) dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini dianggap sebagai upaya mengkriminalisasi KPK.

Dalam percakapan telepon yang disadap KPK itu antara lain melibatkan (disebut-sebut) nama pejabat Polri (Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji dan sejumlah nama penyidik, yaitu Benny, Parman, Gupu, dan Dikdik), pejabat Kejaksaan Agung (mantan Jaksa Agung Muda Intelijen Wisnu Subroto, Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga yang kala itu menjabat Jaksa Agung Muda Pidana

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun pada Minggu (1/11/2009) malam 'terpaksa' membentuk (Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Pimpinan nonaktif KPK, Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah) terdiri delapan orang (Tim Delapan) yang dipimpin Adnan Buyung Nasution, Koesparmono Irsan menjadi wakil ketua, Deny Indrayana sebagai Sekretaris, serta lima anggotanya yakni Todung Mulya Lubis, Hikmawanto Jumawa, Anies Baswedan, Amir Syamsuddin, dan Komaruddin Hidayat.

Tim Delapan yang diberi waktu 14 hari ini semula diharapkan bertindak independen untuk meredakan kekisruhan. Namun perdebatan justru semakin riuh dengan dua arus besar yakni kriminalisasi KPK versus politisasi Polri dan kejaksaan, bahkan mengarah politisasi hukum.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemudian berubah pendirian tentang kasus Bibit-Chandra ini. Dari semula berpendirian bahwa forum yang tepat untuk membuktikan Bibit-Chandra salah atau tidak adalah pengadilan, berubah menjadi agar pihak kepolisian dan kejaksaan tidak membawa kasus ini ke pengadilan dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan. Hal itu dikemukakan Presiden menyikapi rekomendasi Tim Delapan, Senin malam 23/11/2009.

Bermula dari Testimoni Anggoro

Terkuatnya kasus korupsi pemerasan/penyuapan dan penyalahgunaan wewenang ini bermula dari pengakuan (testimoni) Anggoro Widjojo, Komisaris PT Masaro (diduga terlibat korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan) kepada Antasari Azhar (saat menjabat Ketua KPK) bahwa dirinya telah diperas dan telah menyerahkan Rp.5,15 milyar ke pejabat dan penyidik KPK terkait kasus korupsi



yang dituduhkan kepadanya.

Namun tuduhan ini dibantah Bibit dan Chandra, bahkan dianggap sebagai upaya memperlemah (kriminalisasi) KPK. Indikasi terjadinya kriminalisasi KPK atas kasus Bibit dan Chandra semakin kuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa 3/11/2009, memutar rekaman sadapan KPK atas pembicaraan telepon Anggoro Widjojo, adik Anggoro.

Umum, dan jaksa Irwan Nasution), pejabat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Ketut) dan advokat (Kosasih dan Bonaran Situmeang) bahkan Presiden SBY pun disebut sudah mendukung. Pemutaran rekaman itu dimaksudkan untuk meyakinkan hakim MK bahwa telah terjadi upaya kriminalisasi KPK dalam rangka uji materi UU KPK yang diajukan Bibit dan Chandra.

Sus Politisasi Hukum

Sebelum rekaman sadapan telepon Anggodo itu dipublikasikan dalam sidang MK, telah tersebar indikasi adanya kriminalisasi atau pelemahan KPK dalam kasus Bibit dan Chandra, antara lain terlihat dari berubah-ubahnya sangkaan dibuat penyidik Polri kepada Bibit dan Chandra dari semula, penyalahgunaan wewenang menjadi kasus pemerasan dan penyuapan.

Indikasi kriminalisasi KPK semakin diperkuat lagi dari pengakuan Mantan Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Wiliardi Wizard di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 10/11/2009 yang tengah mengadili terdakwa Antasari Azhar (mantan Ketua KPK) sebagai otak pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Dalam sidang pengadilan itu Wiliardi Wizard mengaku, berita acara pemeriksaan dirinya dikondisikan (direkayasa) untuk sasaran menjadikan Antasari sebagai otak pembunuhan.

Kekisruhan KPK dan Polri ini diwarnai pula dengan sebutan Cicak dan Buaya. KPK digambarkan sebagai Cicak dan Polri sebagai Buaya. Penggunaan istilah ini telah membuat citra Polri semakin mencapai titik terendah. Walaupun Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan media massa di Kantor Departemen Komunikasi dan Informasi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (2/11), telah meminta agar istilah ini tidak digunakan, tetap saja istilah ini dipakai menggambarkan pertikaian KPK dan Polri.

Kabareskrim Polri Komjen Susno Duadji yang dianggap orang pertama menggunakan istilah ini menjelaskan bahwa istilah itu keluar saat berbincang-bincang dengan wartawan soal teknologi penyadapan. Dia mengatakan teknologi Polri lebih baik dari KPK. Jika diibaratkan, alat Polri itu Buaya, sedangkan alat KPK itu Cicak. Namun dari segi kewenangan (kekuasaan) KPK-lah yang Buaya dan Polri yang Cicak. Namun yang populer kemudian adalah Polri sebagai Buaya dan KPK sebagai Cicak.

Polri di Titik Nadir

Sesuai mendengar rekaman hasil sadapan KPK di Sidang MK (Selasa 3/11) yang ditayangkan langsung televisi itu, Tim Delapan pun merekomendasi (ultimatum) agar Polri segera membebaskan



Wakil Ketua KPK non-aktif, Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah tersangka penerima suap

Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto dari tahanan.

Tim Delapan juga mengultimatum Polri dan Jaksa Agung agar segera memberhentikan Kabareskrim Polri Komjen Susno Duadji dan Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga. Juga mengultimatum Polri untuk segera menahan Anggodo Widjojo, yang oleh sejumlah media menyebutnya pula sebagai sutradara kriminalisasi KPK. Disebut mengultimatum, sebab jika rekomendasi itu tidak dipenuhi segera, beberapa anggota Tim Delapan mengancam akan mengundurkan diri.

Ultimatum ini telah membuat KPK (Bibit-Chandra) dan pengacaranya, serta beragam LSM, facebookers dan publik mendukungnya menaruh harapan besar pada Tim Delapan. Mereka semakin yakin bahwa kriminalisasi KPK oleh Polri dan Kejaksaan Agung benar-benar terjadi.

Namun di sisi lain, bagi publik (yang muncul ke permukaan dalam jumlah yang lebih kecil) yang ingin menegakkan kepercayaan dan kemandirian Polri dan Kejaksaan Agung, ultimatum tersebut telah mengurangi tingkat kepercayaan atas independensi Tim Delapan. Tim Delapan dianggap telah bertindak layaknya pengacara Bibit-Chandra (KPK). Bahkan dianggap telah membawa kasus Bibit-Chandra ke ranah politik, politisasi hukum.

Setelah ultimatum Tim Delapan itu, Polri membebaskan Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto dari tahanan Selasa malam (03/11), kira-kira pukul

23.00 WIB, setelah ditahan enam hari karena tuduhan pemerasan dan penyalahgunaan kekuasaan. Kepolisian memutuskan untuk menangguk penahanan mereka demi kepentingan yang lebih besar.

Demikian pula, Kabareskrim Polri Komjen Susno Duadji dan Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga pun segera menyatakan mengundurkan diri, secara sukarela untuk tidak membebani institusi dan memberi keleluasaan bagi Tim Delapan memverifikasi fakta. Disebutkan, pengunduran diri dua pejabat Polri dan kejagung itu tidak ada kaitan dengan tekanan dari pihak manapun. Namun, Polri menolak menahan Anggodo, karena tidak cukup alasan hukum untuk menahannya. Atas sikap ini, Polri dicibir tidak peka pada rasa keadilan publik, bahkan dianggap takut dan tunduk kepada Anggodo, selain juga makin mengindikasikan adanya upaya kriminalisasi KPK.

Demonstrasi memprotes kriminalisasi KPK pun marak di beberapa tempat. Facebook, jejaring sosial di dunia maya pun dibuka menggalang Satu Juta Dukungan Kepada KPK. Dalam waktu singkat, ratusan ribu hingga lebih satu juta facebookers memberi komentar mengagungkan KPK dan mencibir Polri dan kejaksanaan. Sejumlah pengamat yang ditonjolkan sebagai pakar pun memberi komentar di layar televisi dan berbagai media cetak serta online menyudutkan Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung. Kapolri dan Jaksa Agung pun dituntut untuk segera dicopot atau mengundurkan

diri.

Selama lebih tiga pekan, upaya kriminalisasi KPK pun mendominasi pemberitaan televisi, koran, radio dan media online. Hampir semua media membela, mendukung dan mengagungkan KPK sebagai pahlawan pemberantasan korupsi. Sementara, peran Kepolisian dan Kejaksaan Agung masih tetap diremehkan. Bahkan kedua institusi penegak hukum di bawah pemerintah ini, seperti telah diyakini mengkriminalisasi KPK. Seolah-olah KPK tidak mungkin punya cacat dan sebaliknya kepolisian dan kejaksaan seolah-olah selalu tidak layak dipercaya. Kondisi ini telah membuat Polri dan Kejaksaan Agung tercibir hingga ke titik nadir.

Dalam kondisi demikian, semua pendapat yang berbeda dianggap sebagai suara yang tidak mendengar suara hati rakyat, penghianat suara rakyat (publik). Penjelasan Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri di depan Komisi III DPR (5/11/2009) yang menegaskan tidak ada upaya kriminalisasi KPK dalam kasus yang menimpa Bibit dan Chandra, justru dianggap menafikan bukti rekaman hasil sadapan KPK dan berlawanan dengan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat.

Begitu pula penjelasan Jaksa Agung Hendarman Supandji dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (9/11/2009) di Jakarta bersikukuh tidak ada kriminalisasi dalam perkara pimpinan (nonaktif) KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Jaksa Agung mengatakan ada indikasi perbuatan pidana, seperti sangkaan Pasal 12 Huruf (e) dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Bagaimana merekayasa 21 saksi?" ujar Hendarman. Hendarman mengemukakan bukti yang diserahkan penyidik Polri di antaranya enam kali kedatangan Ary Muladi ke kantor KPK. Ada juga hubungan telepon antara Ary dan Ade Raharja, Deputy Bidang Penindakan KPK, sebanyak 64 kali. Hubungan itu dibuktikan berdasarkan telepon seluler keduanya.

Penjelasan Kapolri dan Jaksa Agung itu justru menuai bantahan dari berbagai pihak, tentu saja terutama dari Bibit dan Chandra dan pengacaranya. Komisi III DPR pun dicibir lebih berperan sebagai Humas Polri, tidak aspiratif bahkan bertentangan dengan suara publik. Mereka menganggap Tim Delapan, para pengamat bahkan pengacara Bibit dan Chandra serta satu juta komentar facebookers yang mendukung Bibit dan Chandra (pimpinan KPK non-aktif) bisa diklaim sudah lebih berhak mewakili seluruh (mayoritas) suara publik.



Jaksa Agung Hendarman Supandji

Bahkan sebagian dari mereka mengindikasikan jika kasus yang disangkakan kepada Bibit dan Chandra (pimpinan KPK non-aktif) itu diteruskan ke pengadilan akan terjadi perlawanan rakyat yang dahsyat, *people power*. Bahkan penjaga konstitusi, Ketua MK Mahfud MD pun melontarkan pernyataan menjurus agitatif bahwa siapa yang melawan kekuatan rakyat akan tergilas.

Tergiring ke Panggung Politik

Semua rakyat Indonesia pastilah ingin menjadikan Indonesia bebas dari korupsi. Maka kehadiran KPK, sebagai badan ad-hoc untuk menerobos kebuntuan pemberantasan korupsi sangat didukung seluruh elemen rakyat. Maka siapapun pasti tidak ingin terjadi kriminalisasi atau rekayasa pelemahan atas KPK.

Demokrasi yang sudah terbangun dalam sepuluh tahun terakhir telah membuka hak dasar bersuara bagi rakyat. Suatu kemajuan yang patut terus digalang dan disyukuri. Namun demokrasi haruslah diletakkan di atas landasan hukum, sebagai suatu sistem aturan main. Dalam demokrasi, hukumlah yang jadi panglima. Jangan malah sebaliknya, politik jadi panglima.

Dalam kasus Bibit dan Chandra, inilah yang sepatutnya mendapat perhatian pemerintah (Presiden SBY) yang telah mendelegasikannya kepada Tim Delapan. Agar panggung hukum jangan semakin tergiring ke panggung politik. Tim Delapan yang semula diharapkan secara independen bisa memberikan rekomendasi kepada presiden untuk menjernihkan kasus ini secara tepat, proporsional, dalam jalur hukum, sangat disayangkan dari berbagai pernyataan pers, kesimpulan dan rekomendasinya justru lebih berpotensi mengarahkan kasus ini pada tekanan politik.

Setelah Tim Delapan memanggil sejumlah pihak, kepolisian, kejaksaan, KPK dan pihak lain yang relevan, tim yang diberi batas waktu dua minggu untuk memverifikasi fakta yuridis, itu justru lebih dulu mengumumkan kesimpulan sementara, sebelum melaporkannya kepada Presiden. Tim Delapan mengumumkan bahwa fakta dan proses hukum yang dimiliki Kepolisian Negara RI tidak cukup untuk menjadi bukti bagi kelanjutan proses hukum terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Adnan Buyung Nasution, selaku Ketua Tim Delapan, mengungkapkan hal itu kepada pers, Senin (9/11/2009).

Menurut Buyung, andai kata pun ada tindak pidana dalam kasus tersebut, bukti yang dimiliki Polri terputus, hanya dari aliran dana Anggodo Widjojo ke Ary Muladi.

Aliran dana selanjutnya dari Ary, baik melalui orang yang bernama Yulianto maupun langsung ke pimpinan KPK, tidak ada bukti yang dapat ditunjukkan kepada Tim Delapan. Dikatakan, seandainya kasus Bibit dan Chandra itu dipaksakan untuk diajukan ke pengadilan dengan dakwaan penyalahgunaan wewenang, kasus itu pun lemah sebab menggunakan pasal karet.

Pernyataan pers Tim Delapan ini sama sebangun dengan pernyataan tim pengacara Bibit dan Chandra, serta pernyataan Adnan Buyung sebelum dia ditunjuk memimpin Tim Delapan. Laporan sementara yang diumumkan ke publik itu diserahkan kepada Presiden melalui Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Senin sore 9/11/2009.

Kemudian dalam kesimpulan akhirnya yang disampaikan kepada Presiden pada 17/11/2009, Tim Delapan merekomendasikan agar kasus Bibit-Chandra dihentikan, menjatuhkan sanksi kepada pejabat-pejabat yang bertanggung jawab sekaligus mereformasi Pilri dan Kejagung, memberantas makelar kasus dan membentuk komisi negara pembenahan lembaga hukum.

Apakah sengaja atau tidak, disadari atau tidak, dengan cara ini Tim Delapan bisa mungkin menempatkan posisi Presiden dalam posisi sulit, *fait accompli*. Selain karena rekomendasi sementara sebelumnya telah diumumkan lebih dulu kepada publik, Tim Delapan tidak menjelaskan apakah benar terjadi kriminalisasi KPK oleh Polri dan kejaksaan. Tetapi justru hanya mengarah pada tidak layaknya kasus pemerasan/penyuapan dan penyalahgunaan wewenang Bibit dan Chandra ini diteruskan ke pengadilan. Yang justru bisa mengarah mengintervensi kewenangan Polri dan Kejagung.

Presiden SBY sendiri tampaknya mera-



Kapolri Bambang Herdardo Danuri: Tidak ada rekayasa dalam kasus Bibit dan Chandra

sa tertekan dengan rekomendasi Tim Delapan tersebut. “Jangan sampai saya sebagai presiden didorong, dipaksa untuk mengambil langkah yang bukan kewenangan saya, karena itu berarti saya melanggar undang-undang,” kata Presiden dalam pengantarnya memimpin rapat terbatas membahas rekomendasi Tim Delapan, Rabu 18/11/2009.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Benny K Harman (Fraksi Partai Demokrat) menilai rekomendasi Tim Delapan agak bias. Menurutnya, Tim Delapan bertugas mencari fakta, bukan untuk memberikan penafsiran atau memberikan penilaian yuridis atas fakta yang ditemukan. Benny menilai Tim Delapan telah memanfaatkan Presiden untuk mendahului dan mengambil alih wewenang lembaga peradilan yang memiliki otoritas absolut untuk menilai dan memutuskan apakah bukti yang dipakai secara yuridis kuat atau tidak.

Melihat perkembangan ini, berbagai pihak berharap Presiden bisa dengan cepat mengambil keputusan agar kasus ini tidak semakin runcing. Walaupun sebenarnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam beberapa kesempatan sudah menegaskan pendiriannya tidak akan mencampuri (mengintervensi) proses hukum yang dilakukan para penegak hukum, termasuk Polri dan kejaksaan yang berada di bawah kekuasaannya.

Setelah Presiden menerima rekomendasi Tim Delapan itu, dengan cepat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, memanggil Menko Polhukam Djoko Suyanto, Jaksa Agung Hendarman Supandji dan Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Herdardo Danuri untuk membahas rekomendasi Tim Delapan itu, baik rekomendasi sementara maupun rekomendasi akhir.

Seusai pertemuan, membahas rekomendasi sementara di Istana Negara, sejak pukul 21.00 sampai pukul 23.30, Senin 9/11. Djoko Suyanto mengatakan, surat rekomendasi dipelajari saksama. “Presiden merespons dengan memanggil Jaksa Agung dan Kapolri. Presiden menyampaikan isi surat untuk jadi masukan atau pertimbangan. Bukti belum cukup, ada *missing link* aliran dari Anggodo ke pimpinan KPK. Presiden berharap dua pejabat itu (Kapolri dan Jaksa Agung) merespons penilaian tim,” katanya.

Menko Polhukam menegaskan, Presiden tidak punya kewenangan yuridis untuk menghentikan proses hukum. Namun, Presiden meminta Kapolri dan Jaksa Agung menindaklanjuti dengan memelajari rekomendasi Tim Delapan. “Presiden tidak memberi batas waktu kapan harus diputuskan,” kata Djoko.

Sesudah itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Didik Darmanto mengadakan jumpa pers pada pukul 00.00, Selasa 10/11/2009, mengumumkan bahwa kejaksaan mengembalikan berkas penyidikan kasus Chandra ke kepolisian. Sebab masih ada beberapa hal yang harus dilengkapi kepolisian antara lain penambahan keterangan saksi dan penajaman alat bukti. Kepolisian mempunyai waktu 14 hari untuk melengkapinya. Namun dalam waktu empat hari, kepolisian telah merampungkannya dan menyerahkan kembali ke Kejaksaan.

Kontroversi Berakhir?

Kasus tersangkanya dua pimpinan KPK non-aktif Bibit dan Chandra terlibat pidana korupsi (pemerasan/penyuapan) dan penyalahgunaan wewenang yang dianggap sebagai upaya mengkriminalisasi KPK, ini telah menyita banyak energi bangsa ini.

Bahkan hiruk-pikuk kasus ini telah menelan informasi Rembuk Nasional yang digelar membahas agenda pembangunan bangsa. Bahkan Program 100 hari pemerintah sudah tertelan lebih 30 hari sejak Presiden dilantik. Jangan-jangan Program 100 hari pemerintah akan tersita seluruhnya dengan kasus Bibit dan Chandra yang dianggap sebagai kriminalisasi dan pengembosan KPK itu.

Masalah ini sangat mungkin dapat diatasi lebih cepat, jika Polri dan kejaksaan dapat menyelesaikan tugasnya dengan lebih profesional dan mandiri dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, mempertimbangkan moralitas dan rasa keadilan masyarakat berdasarkan aturan hukum (hukum positif).

Jika memang Polri dan kejaksaan tidak menemukan bukti yang kuat dan meyakinkan, demi kepastian hukum tidak perlu ragu untuk menghentikan kasus Bibit dan Chandra ini. Ada sebuah prinsip dalam

penegakan hukum dan keadilan, bahwa lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum seorang yang tidak bersalah.

Namun sebaliknya, jika Polri dan kejaksaan menemukan bukti yang kuat dan meyakinkan, demi kepastian hukum pula tidak perlu ragu untuk melanjutkan kasus Bibit dan Chandra ini ke pengadilan. Sebab dalam hal prinsip kepastian hukum, biarpun langit runtuh, keadilan harus ditegakkan. Prinsip ini menuntut keberanian tanpa pamrih, dan tidak takut kehilangan jabatan. Maka, biarlah pengadilan yang memutuskan secara adil.

Sebab akan menjadi preseden buruk, jika kasus Bibit dan Chandra ini diselesaikan dengan pertimbangan sensitivitas politik tinggi, apalagi akibat tekanan politik, lalu dicari cara yang ‘pas dan kompromistis’ di luar jalur hukum.

Masyarakat pun akhirnya tidak tahu lagi mana yang baik dan tidak baik, mana yang taat hukum atau tidak? Inilah momentum bagi Polri, Kejaksaan dan KPK untuk menegaskan prinsip penegakan hukum dan kepastian hukum, tanpa pandang bulu dan tanpa dicemari pertimbangan (kepentingan) politik.

Walaupun dalam pemberitaan berbagai media terdapat beragam pandangan tentang hal ini, namun semuanya mengarah pada ketegasan Presiden SBY untuk membuat keputusan yang sesuai aturan hukum sekaligus mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Presiden pun akhirnya, Selasa 23/11/2009 malam menyikapi bahwa sebaiknya Polri dan Kejaksaan tidak membawa kasus Bibit-Chandra ke pengadilan.

Kasus ini telah mencolikan mata bahwa makelar kasus (markus) tidak hanya bergentayangan di kepolisian dan kejaksaan, tetapi juga di KPK. Sehingga momentum ini bisa menjadi pembelajaran amat berharga bagi KPK, untuk tidak meleng dan bermain-main dengan markus. Juga pelajaran yang kesekian kalinya bagi Kepolisian dan Kejaksaan.

KPK yang diangungkan dan didukung publik, tentu bukanlah gratis. Dukungan itu penuh dengan ekseptasi (harapan) bahwa oknum pimpinan dan penyidik KPK haruslah bersih dan jujur. Demikian pula polisi dan jaksa. Sebab bagaimana mungkin sapu yang kotor dapat membersihkan rumah yang kotor.

Kekisruhan ini dapat pula dijadikan sebagai momentum (kesempatan emas) untuk mendorong reformasi total di tubuh Polri dan Kejaksaan serta reposisi dalam tubuh KPK. Diharapkan, Tim Delapan akan berhasil merekomendasikan solusi tentang hal ini (reformasi Polri dan Kejaksaan dan Reposisi KPK) kepada Presiden.

■ BI/MS-CHR

Rekomendasi Tim Delapan

Atas Kasus Bibit dan Chandra



Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menerima laporan Tim Delapan

Dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto (nonaktif) **menjalani proses hukum sebagai tersangka tindak pidana korupsi (pemeriksaan, penyuapan dan penyalahgunaan wewenang). Tetapi, timbul kecurigaan adanya rekayasa oleh pihak Polri dalam kasus ini.**

Sehingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus ini (Keputusan Presiden No. 31 Tahun 2009), beranggotakan delapan orang, sehingga kemudian disebut Tim Delapan.

Tim Delapan bertugas selama 14 hari kerja, dan dapat diperpanjang jika diperlukan. Setelah Tim Delapan melakukan tugasnya, kemudian menyampaikan rekomendasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa (17/11/2009). Menurut anggota Tim Delapan Denny Indrayana bahwa dokumen rekomendasi itu menjadi dokumen publik yang boleh disiarkan media.

Berikut ini rekomendasi Tim Delapan tersebut kepada Presiden:

1. Setelah mempelajari fakta-fakta, lemahnya bukti-bukti materil maupun formil dari penyidik, dan demi kredibilitas sistem hukum, dan tegaknya penegakan hukum yang jujur dan obyektif, serta memenuhi rasa keadilan yang berkem-

bang di masyarakat, maka **proses hukum terhadap Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto sebaiknya dihentikan.**

Dalam hal ini Tim 8 merekomendasikan agar:

a. Kepolisian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam hal perkara ini masih di tangan kepolisian;

b. Kejaksaan menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) dalam hal perkara ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan; atau

c. Jika kejaksaan berpendapat bahwa demi kepentingan umum, perkara perlu dihentikan, maka berdasarkan asas oportunitas, Jaksa Agung dapat mendeponir perkara ini.

2. Setelah menelaah problematika institusional dan personel lembaga-lembaga penegak hukum dimana ditemukan berbagai kelemahan mendasar maka Tim 8 merekomendasikan agar Presiden melakukan:

a. Untuk memenuhi rasa keadilan, **menjatuhkan sanksi kepada pejabat-pejabat yang bertanggung jawab dalam proses hukum yang dipaksakan dan sekaligus melakukan reformasi institusional pada tubuh lembaga kepolisian dan kejaksaan;**

b. Melanjutkan reformasi institusional dan reposisi personel pada tubuh Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) dan Lembaga Perlindungan saksi dan Korban (LPSK) - tentu dengan tetap menghormati independensi lembaga-lembaga tersebut, utamanya KPK.

Untuk mereformasi lembaga-lembaga penegak hukum tersebut di atas maka Presiden dapat menginstruksikan dilakukannya 'governance audit' oleh suatu lembaga independen, yang bersifat *diagnostic* untuk mengidentifikasi persoalan dan kelemahan mendasar di tubuh lembaga-lembaga penegak hukum tersebut.

3. Setelah mendalami betapa penegakan hukum telah dirusak oleh merajalelanya makelar kasus (markus) yang beroperasi di semua lembaga penegak hukum maka sebagai *shock therapy* **Presiden perlu memprioritaskan operasi pemberantasan makelar kasus (markus)** di dalam semua lembaga penegak hukum termasuk di lembaga peradilan dan profesi advokat; dimulai dengan pemeriksaan secara tuntas dugaan praktik mafia hukum yang melibatkan Anggodo Widjojo dan Ari Muladi oleh aparat terkait.

4. Kasus-kasus lainnya yang terkait seperti kasus korupsi Masaro; proses hukum terhadap Susno Duadji dan Lucas terkait dana Budi Sampoerna di Bank Century; serta kasus pengadaan SKRT Departemen Kehutanan; hendaknya dituntaskan.

5. Setelah mempelajari semua kritik dan input yang diberikan tentang lemahnya strategi dan implementasi penegakan hukum serta lemahnya koordinasi di antara lembaga - lembaga penegak hukum, maka **Presiden disarankan membentuk Komisi Negara yang akan membuat program menyeluruh dengan arah dan tahapan-tahapan yang jelas untuk pembenahan lembaga-lembaga hukum**, termasuk organisasi profesi Advokat, serta sekaligus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga hukum lainnya untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum, *due process of law*, hak-hak asasi manusia dan keadilan.

Jakarta, 16 November 2009

Tim Delapan: Ketua Dr (Iur) Adnan Buyung Nasution; Wakil Ketua Irjen Pol (Purn) Prof. Drs. Koesparmono Irsan; Sekretaris Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph. D; Anggota Dr. Todung Mulya Lubis, SH, LL.M, Dr. Amir Syamsuddin, SH, MH, Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M, PhD, Dr. Anies Baswedan, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat.

■ BI/BHS-CHR

Bibit-Chandra Tidak ke Pengadilan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berubah pendirian tentang kasus Bibit-Chandra. Dari semula berpendirian bahwa forum yang tepat untuk membuktikan Bibit-Chandra salah atau tidak adalah pengadilan, berubah menjadi agar pihak kepolisian dan kejaksaan tidak membawa kasus ini ke pengadilan dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan.



Presiden menyikapi kasus Bibit-Chandra dan kasus Bank Century, Senin malam 23/11/2009

Perubahan pendirian itu dikemukakan Presiden SBY dalam pidato di Istana Negara, Jakarta, Senin (23/11/2009) menyikapi rekomendasi Tim Verifikasi Fakta Kasus Hukum Chandra M Hamzah dan Bibit S Rianto, yang merupakan bagian kedua dari pidatonya setelah mengomentari perkembangan pengusutan kasus Bank Century.

Sesungguhnya, kata Presiden, jika kita ingin mengakhiri silang pendapat mengenai apakah Saudara Chandra Hamzah dan Saudara Bibit Samad Rianto salah atau tidak salah, maka forum atau majelis yang tepat adalah pengadilan.

"Semula saya memiliki pendirian seperti itu, dengan catatan proses penyelidikan dan penuntutan mendapat kepercayaan publik yang kuat. Dan tentu saja, proses penyidikan dan penuntutan itu fair, objektif, disertai bukti-bukti yang kuat," katanya.

Namun, menurut Presiden, dalam perkembangannya, justru yang muncul adalah ketidakpercayaan yang besar kepada pihak Polri dan Kejaksaan Agung sehingga telah masuk ke ranah sosial dan bahkan ranah kehidupan masyarakat yang lebih besar. Oleh karena itu, faktor yang Presiden pertimbangkan bukan

hanya proses penegakan hukum itu sendiri, tapi juga faktor-faktor lain seperti pendapat umum, keutuhan masyarakat kita, asas manfaat, serta kemungkinan berbedanya secara hakiki antara hukum dengan keadilan.

"Oleh karena itu, solusi dan opsi lain yang lebih baik yang dapat ditempuh adalah pihak kepolisian dan kejaksaan tidak membawa kasus ini ke pengadilan dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan, namun perlu segera dilakukan tindakan-tindakan korektif dan perbaikan terhadap ketiga lembaga penting itu, yaitu Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK," kata Presiden.

Presiden menilai, sejak awal proses hukum terhadap dua pimpinan KPK nonaktif ini telah menimbulkan kontroversi, pro dan kontra, di kalangan masyarakat. "Kecurigaan terhadap kemungkinan rekayasa kasus ini oleh para penegak hukum juga tinggi," katanya. Presiden juga mempelajari hasil survei oleh lembaga survei yang kredibel yang baru saja dilakukan yang menunjukkan bahwa masyarakat kita memang benar-benar terbelah.

Di samping Presiden telah mengkaji laporan dan rekomendasi tim delapan,

juga melakukan komunikasi dengan dua pimpinan lembaga negara di wilayah *justice system*, yakni Ketua Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Presiden juga telah melakukan komunikasi dengan segenap pimpinan KPK dan tentu saja telah mengundang Kapolri dan Jaksa Agung untuk mencari solusi terbaik atas kasus ini.

Di luar itu, Presiden juga berterima kasih kepada para pakar hukum yang sejak Tim Delapan menyampaikan rekomendasinya, juga memberikan pemikiran-pemikirannya kepada Presiden.

Presiden mengatakan sebelum memilih opsi atau konstruksi penyelesaian kasus ini di luar pertimbangan faktor-faktor non-hukum tadi, dia juga menilai ada sejumlah permasalahan di ketiga lembaga penegak hukum itu, yaitu di Polri, Kejaksaan Agung dan KPK. "Permasalahan seperti ini tentu tidak boleh kita biarkan dan harus kita koreksi, kita tertibkan, dan kita perbaiki," tegas Presiden.

Solusi tidak membawa kasus ini ke pengadilan, menurut penilaian Presiden, lebih banyak manfaatnya daripada mudratnya. "Tentu saja cara-cara yang ditempuh tetaplah mengacu kepada ketentuan perundang-undangan dan tatanan hukum yang berlaku. Saya tidak boleh dan tidak akan memasuki wilayah ini karena penghentian penyidikan berada di wilayah lembaga penyidik atau Polri, penghentian tuntutan merupakan kewenangan lembaga penuntut atau kejaksaan, serta pengenyampingan perkara melalui pelaksanaan asas oportunitas merupakan kewenangan Jaksa Agung. Tetapi sesuai dengan kewenangan saya, saya menginstruksikan kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk melakukan penertiban, pembenahan, dan perbaikan di institusinya masing-masing berkaitan dengan kasus ini. Demikian pula saya sungguh berharap KPK juga melakukan hal yang sama di institusinya," ujar Presiden SBY.

Menurut Presiden, kejadian ini membawa hikmah dan juga pelajaran sejarah bahwa reformasi nasional kita memang belum selesai, utamanya reformasi di bidang hukum.

"Kita semua para pencari keadilan juga merasakannya. Bahkan kalangan internasional yang sering fair dan objektif dalam memberikan penilaian terhadap negeri kita juga menilai bahwa sektor-sektor hukum kita masih memiliki banyak kekurangan dan permasalahan," katanya.

Oleh karena itu, Presiden mengatakan bahwa lima tahun mendatang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas pemerintah. "Bahkan dalam program 100 hari, saya telah menetapkan gerakan pemberantasan mafia hukum sebagai prioritas utama," katanya. ■ BI/MLP

Pelajaran Buat KPK, Polri dan Kejaksaan



Aksi massa pendukung kepolisian

foto-foto: ist

Kekisruhan penegakan hukum mencapai ubun-ubun dalam satu bulan terakhir ini. Publik membela, mendukung dan mengagungkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pahlawan pemberantasan korupsi. Sementara, peran Kepolisian dan Kejaksaan Agung semakin diremehkan bahkan dianggap telah mengkriminalisasi KPK. Kekisruhan penegakan hukum ini menjadi pelajaran amat berharga buat KPK, juga polisi dan kejaksaan.

Keberpikah suara publik yang cenderung membela KPK, tentulah tidak muncul secara tiba-tiba. Tetapi melalui proses pengamatan hasil perbandingan rasional atas kenyataan prestasi KPK dalam memberantas korupsi yang dinilai sangat berhasil dibandingkan dengan prestasi polisi dan kejaksaan yang dinilai kurang berhasil.

Memang, KPK lahir tahun 2002 (pada era pemerintahan Megawati) karena pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini belum dapat dilaksanakan secara optimal. Karena lembaga pemerintah (kepolisian dan kejaksaan) belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Maka, power reformasi disalurkan melalui KPK untuk memberantas korupsi. Badan ad-hoc independen yang dibentuk

berdasarkan UU No.30 Tahun 2002 sebagai pewujudan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, ini diberi kewenangan jauh melampaui kewenangan Polri dan Kejaksaan Agung. Sehingga tidak mustahil bila muncul kecemburuan polisi dan kejaksaan terhadap kekuasaan (*super body*) KPK itu.

Indikasi adanya kecemburuan atau persaingan antara Polri dan Kejaksaan Agung di satu pihak dengan KPK di pihak lain, semakin terlihat sejak KPK menangkap Jaksa Urip Tri Gunawan yang menerima uang 660 ribu dolar AS dari Artalyta Suryani pada Minggu, 2 Maret 2008, terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), milik Sjamsul Nur-

salim. (Urip divonis 20 tahun penjara).

Juga ketika KPK menangkap mantan Kapolri Rusdihardjo yang terlibat pungutan liar pengurusan dokumen keimigrasian di Kedutaan Besar RI untuk Malaysia saat dia menjabat Duta Besar RI untuk Malaysia. Rusdihardjo divonis satu setengah tahun, ditahan sejak 14 Januari 2008 dan berakhir pada 14 Juli 2009.

KPK di bawah kepemimpinan Antasari Azhar (Ketua), Chandra M. Hamzah, Bibit Samad Rianto, Haryono dan Mochammad Jasin, memang terlihat lebih garang dan semakin menunjukkan kemampuan dan keteguhan independensinya memberantas korupsi. Jika pimpinan KPK sebelumnya gemar menghadap Presiden, pimpinan KPK periode 2007-2011, ini menunjukkan eksistensi yang lebih independen sebagaimana diamanatkan Pasal 3 UU No.30 Tahun 2002: Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Sebagai bukti independensi KPK, antara lain terlihat dari ditahannya besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Deputy Gubernur BI Aulia Pohan, Kamis (27/11/2008) karena tersangkut kasus dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPPI) sebesar Rp 100 miliar. Keberanian KPK pun terbukti dengan dibongkarnya berbagai kasus yang melibatkan beberapa anggota DPR.

Tidak heran jika Presiden SBY dan para anggota DPR pernah mengkritik kewenangan KPK, yang disebutnya sebagai lembaga yang *super body*. Sehingga sejak itu mengemuka kekuatiran adanya upaya pemerintahan SBY dan parlemen untuk menggebiri kewenangan KPK, yang akan dipangkas melalui Rancangan Undang-Undang Tipikor, yang kala itu dibahas pemerintah dan DPR. Antara lain, sempat mengemuka akan memangkas kewenangan KPK dalam hal penuntutan dan penyadapan. Walaupun kemudian atas desakan publik, kewenangan KPK ini akhirnya tetap dipertahankan dalam UU Tipikor yang disahkan DPR pada 29/9/2009.

Pada saat KPK mencapai puncak kinerja, Ketua KPK Antasari Azhar ditimpa kasus tindak pidana pembunuhan berencana atas Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnain. Antasari dijadikan tersangka *intellectual*

dader alias otak pembunuhan (30/4/09) dengan berlatar belakang cinta segitiga.

Sempat diduga, kasus yang menimpa Antasari ini sebagai rekayasa kriminalisasi KPK. Namun dukungan publik atas Antasari akhirnya tenggelam setelah Polri mengungkap adanya cinta segitiga yang melatarbelakangi pembunuhan Nasrudin tersebut. Walau Antasari membantah tetapi perilakunya yang bersedia menerima kedatangan seorang perempuan muda di kamar hotel, sudah tidak layak dilakukan oleh seorang yang tengah menjabat Ketua KPK, sebuah lembaga hukum terhormat yang tengah diadungkan publik.

Walaupun kemudian, Mantan Kapolres Jakarta Selatan Williardi Wizard, yang juga terseret kasus pembunuhan ini, di muka sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 10/11/2009, mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) dengan mengungkap fakta baru bahwa pembunuhan Nasrudin direkayasa penyidik dengan sasaran Antasari Azhar, nama baik Antasari sudah terlanjur terkubur dan karena statusnya sudah jadi terdakwa maka sudah diberhentikan dari jabatan Ketua KPK.

Ketika Antasari ditahan karena tersangka terlibat kasus pembunuhan, tidak seorang pun pimpinan KPK lainnya yang menjenguknya di tahanan. Barangkali pimpinan KPK lainnya tidak mau disangkut-pautkan dengan kasus yang menimpa Antasari. Padahal siapa yang menjenguk Antasari (tersangka otak pembunuhan yang belum tentu benar) tidaklah serta-merta jadi ikut tersangkut. Tetapi pantasnyalah seorang sahabat (yang terbukti sebagai pembunuh pun) jika menghadapi suatu musibah perlu dihibur. Walaupun memang bagi orang yang berlagak malaikat, cenderung tidak mau melakukan hal ini.

Entah karena merasa dikucilkan oleh rekan-rekannya di KPK, Antasari pun membuat testimoni dari testimoni Anggoro Widjojo (Komisar PT Masaro) kepadanya bahwa KPK melakukan pemerasan/suap. Walaupun dalam penjelasan resminya kepada pers sesuai dimintai keterangan oleh Tim Delapan (9/11), bahwa penyidik Polrilah yang menemukan testimoni tersebut dari laptopnya, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan laporan. Laporan inilah kemudian yang ditindaklanjuti penyidik Polri untuk menyeret Bibit dan Chandra jadi tersangka pemerasan/penyuapan dan penyalahgunaan wewenang sehingga kedua pimpinan KPK itu dinonaktifkan.

Sementara itu, KPK juga 'mengancam' akan memanggil Kabareskrim Polri Susno Duadji dalam kasus dugaan korupsi di Bank Century. Susno Duadji disebut-sebut terlibat dugaan menandatangani dua surat yang memuluskan upaya pen-



Massa pendukung Ketua KPK non-aktif Bibit dan Chandra.

cairan dana USS 18 juta milik Boedi Sampoerna di Bank Century. Atas pengeluaran surat itu, mantan Kapolda Jawa Barat itu disebut-sebut menerima Rp10 miliar. "Kami akan kaji apa ada indikasi SD ini terlibat," kata Wakil Ketua bidang Penindakan KPK Bibit Samad Irianto, yang tampaknya dirasakan Polri sebagai ancaman. Susno sendiri membantah dan bersumpah menyatakan tidak pernah menerima uang Rp10 miliar itu di hadapan rapat kerja DPR dan Kapolri di Jakarta, Kamis 5/11/2009.

Adanya 'ancaman' akan mengkaji keterlibatan Kabareskrim Polri itu diduga telah membuat Polri semakin intensif berburu fakta pemerasan/penyuapan dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat KPK. Bahkan diisukan dugaan telah terjadi rekayasa Polri mengkriminalisasi KPK.

Kontroversi kriminalisasi KPK pun semakin ramai. Berbagai perlawanan dilakukan oleh Bibit dan Chandra setelah ditetapkan sebagai tersangka dan akibatnya harus non-aktif dari jabatan Wakil Ketua KPK. Dua pimpinan KPK non aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah itu pun melalui tim kuasa hukumnya mengajukan uji materi pasal 32 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Selasa 13/10/2009.

Gugatan diajukan karena penggugat menilai penerapan pasal 32 ayat (1) butir (c) UU KPK dinilai diskriminatif. Pasal 32 ayat (1) butir (c) berbunyi, pimpinan KPK akan diberhentikan tatkala menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan mengenai pejabat negara lain yang baru diberhentikan jika status-

nya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Pasal ini juga dianggap mengabaikan asas praduga tak bersalah yang diakui, dilindungi dan dijamin eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia dan Internasional.

Atas gugatan uji materi ini, MK dalam sidang 29/10/2009 mengeluarkan keputusan sela, untuk menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, sampai ada putusan akhir MK terhadap pokok permohonan.

Sebelum dan sesudah putusan sela MK ini, tim pengacara Bibit-Chandra menggelar temu pers dan berbicara dalam berbagai forum yang bernada mengancam Polri atas tindakan rekayasa kasus Bibit dan Chandra yang dianggap sebagai kriminalisasi KPK.

Polri pun bertindak reaktif atas berbagai temu pers dan putusan sela MK tersebut. Polri yang merasa punya cukup bukti, tak tahan menerima cibiran rekayasa dan kriminalisasi KPK itu. Polri pun menggunakan kewenangannya menahan Bibit dan Chandra, Kamis 29/10/2009. Lalu gelombang protes pun muncul bertalu-talu. Termasuk dari Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Adnan Buyung Nasution yang kemudian ditunjuk Presiden SBY menjadi Ketua Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Pimpinan nonaktif KPK, Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah terdiri delapan orang sehingga disebut Tim Delapan.

Adnan Buyung menilai tindakan polisi terkait dengan penahanan dua pimpinan

KPK nonaktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, sangatlah berlebihan. Menurutnya, kepolisian tidak mempunyai alasan untuk menahan Bibit dan Chandra karena barang bukti yang digunakan tidak cukup kuat untuk bisa menyeret Bibit dan Chandra ke penjara. Dia meminta supaya Bibit dan Chandra dibebaskan.

Pernyataan ini pulalah kemudian yang dikemukakannya sebagai rekomendasi sementara Tim Delapan kepada Presiden. Sejak awal, Adnan Buyung memang sudah berpendirian bahwa Polri tidak punya bukti yang kuat menyeret Bibit dan Chandra ke pengadilan.

Keyakinan Adnan Buyung tampaknya semakin kuat setelah ikut mendengar rekaman sadapan telepon Anggodo yang diputar dalam kelanjutan sidang uji materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi, Selasa 3/11/2009 yang mengindikasikan telah terjadi rekayasa atas kasus Bibit dan Chandra.

Kendati Kapolri Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supanji telah menjelaskan bahwa pihaknya mempunyai bukti yang kuat, Adnan Buyung tetap pada pendiriannya. Walaupun, memang, Jaksa Agung mengakui bahwa penerimaan uang secara langsung oleh oknum pimpinan KPK tidak ada.

Tetapi Hendarman meyakini adanya pembuktian aliran dana Rp5,15 miliar dari Anggoro Widjojo, pemegang saham PT Masaro kepada oknum pimpinan KPK. Anggoro menyerahkan uang itu kepada adiknya Anggodo. Anggodo meneruskan ke Ary Muladi. Dalam keterangan awal dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Ary Muladi menyerahkan uang itu langsung ke Ade Rahardja (Ketua Tim Penyidik KPK). Namun dalam keterangan

berikutnya Ary Muladi mengaku memberikan uang itu kepada Yulianto. Siapa Yulianto ini tidak ditemukan Polri.

Dari Yulianto, uang diserahkan kepada Ade Rahardja, yang kemudian membaginya kepada pimpinan KPK (Chandra Hamzah Rp1 miliar, Bibit S Rianto Rp1,5 miliar, M.Jasin Rp1 miliar dan Bambang Rp1 miliar), kepada Tim Penyidik dan Sopir Rp400 juta dan media massa Rp250 juta.

Bukti yang ada atas penyerahan uang itu antara lain kartu parkir mobil KPK dan Ary Muladi di lokasi penyerahan uang di Bellagio, Pasar Festival, Kuningan, Jakarta. Juga Ary Muladi dan Ade Rahardja enam kali bertemu di KPK, serta melakukan percakapan telepon sebanyak 64 kali.

Lalu semua pimpinan KPK dengan menyebut nama Allah membantah menerima dana tersebut termasuk Ade Rahardja. Mereka semua mengaku tidak mengenal Ary Muladi dan/atau Yulianto. Bahkan M. Jasin di layar televisi bersumpah sambil menjunjung Al-Quran tidak pernah menerima uang tersebut. Sangat mungkin bantahan mereka ini benar. Tetapi kemungkinan uang itu mereka terima tidak juga mustahil. Sebab, para pimpinan KPK itu juga manusia Indonesia yang hidup di belantara korupsi yang sudah merajalela, mereka bukan malaikat.

Namun dalam kaitan ini, perlu pula direnungkan apa yang dikemukakan Hasanudin AF, Guru Besar Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Selasa 10/11, sebagaimana dirilis Inilah.com, bahwa bersumpah atas nama Tuhan, boleh. Tetapi, ketika banyak yang melakukannya, itu suatu pertanda bahwa, suatu masyarakat sedang sakit mental dan moralnya.

'Di dalam Islam, kata Hasanudin,

sumpah itu ada ajarannya. "Artinya, sumpah itu dilakukan untuk meyakinkan diri sendiri atau seseorang tentang suatu tuduhan yang dilekatkan padanya itu tidak benar. Ajaran itu dibenarkan dalam Islam. Cuma pelaksanaannya seharusnya tidak sembarangan," jelasnya.

Namun, Hasanudin mengingatkan akan berbahaya kalau sumpah tersebut dijadikan pedoman oleh hakim, sementara di dalam hati yang bersumpah, dia mengetahui bahwa sebenarnya dia berbohong. "Kalau sudah begitu, hanya dirinya yang bersumpah dan Tuhan yang tahu. Apa yang diucapkan memang menjadi pertimbangan. Tapi kalau kemudian ada bukti lain, itu menjadi urusan dia dengan Tuhan. Dan sudah pasti ada risiko. Artinya, sejauh mana sumpah yang dilakukan berdasarkan kenyataan atau sebaliknya. Cuma sekali lagi, bagi hakim tentu akan menjadi pertimbangan," katanya.

Ada ungkapan mengatakan tidak ada asap tanpa api. Sebab aliran dana memang ada, tetapi apakah benar sampai kepada oknum pimpinan KPK, tampaknya sangat sulit membuktikannya. Apalagi, baik KPK maupun Polri dan Jaksa sudah banyak pengalaman, terlatih dan cekatan untuk mengetahui berbagai modus korupsi, dalam rangka tugasnya memberantas korupsi. Inilah tantangan bagi penyidik Polri tanpa ada maksud dan prasangka rekayasa kriminalisasi KPK. Sementara, publik memang berharap kiranya oknum pimpinan KPK memang tidak bersalah (korupsi).

Selain itu, paling tidak kasus ini mencelikkan mata bahwa makelar kasus (markus) tidak hanya bergentayangan di kepolisian dan kejaksaan, tetapi juga di KPK. Sehingga momentum ini bisa menjadi pembelajaran amat berharga bagi KPK, untuk tidak meleng dan bermain-main dengan markus. Juga pelajaran yang kesekian kalinya bagi Kepolisian dan Kejaksaan.

KPK yang diangungkan dan didukung publik, tentu bukanlah gratis. Dukungan itu penuh dengan ekspektasi (harapan) bahwa pimpinan dan penyidik KPK haruslah bersih dan jujur. Demikian pula polisi dan jaksa. Sebab bagaimana mungkin sapu yang kotor dapat membersihkan rumah yang kotor.

Bagi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat sipil, kisruh antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi ini dapat dijadikan sebagai momentum (kesempatan emas) untuk mendorong reformasi total di tubuh Polri dan Kejaksaan serta reposisi dalam tubuh KPK. Diharapkan, Tim Delapan akan berhasil merekomendasikan solusi tentang hal ini (reformasi Polri dan Kejaksaan dan Reposisi KPK) kepada Presiden. ■ BI/MS-CHR



Ketua Tim 8 Adnan Buyung Nasution didampingi Menko Polhukam saat memberi keterangan pers

Markus Merambat ke KPK

Kasus Bibit dan Chandra, terlepas apakah itu direkayasa untuk mengkriminalisasi KPK, telah mengungkap sebuah kenyataan bahwa makelar kasus (markus) tidak hanya berseliweran di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, tetapi juga telah merambat ke KPK.

Kasus pemerasan, penyuapan dan penyalahgunaan wewenang yang dituduhkan kepada Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto, yang membuat keduanya dinonaktifkan dari jabatan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah menghadirkan potret telanjang di hadapan publik betapa buruknya birokrasi penegakan hukum di negeri ini, termasuk dalam tubuh KPK. Sehingga makelar kasus (markus) masih mempunyai ruang untuk ikut bermain dalam sistem penegakan hukum.

Padahal, segala energi yang dimiliki bangsa ini telah ditumpahkan untuk menjadikan KPK sebagai lembaga terkuat dan terdepan dalam menegakkan keadilan memberantas korupsi. Hiruk-pikuk tentang aliran dana (pemerasan atau penyuapan) dari seorang tersangka korupsi kepada para pimpinan KPK, yang diyakini pihak Polri dan Kejaksaan memiliki bukti yang kuat, tetapi dibantah pihak KPK, telah membuat perasaan publik galau, campur aduk, heran, sedih, marah dan kecewa bahkan ada yang sudah putus asa, terasa tak lagi berdaya.

Beruntung, sebagian besar publik (paling tidak yang tercermin dari komentarnya di facebook) masih belum percaya bahwa oknum pimpinan dan penyidik KPK telah bersekongkol dengan makelar kasus. Sehingga publik memberi dukungan kepada KPK, bahkan sampai mengangap Polri dan Keajugung telah mengkriminalisasi KPK. Publik memang berharap dan membutuhkan, KPK masih bersih dan layak dipercaya. Bahwa aliran dana pemerasan atau penyuapan yang dituduhkan kepada Bibit dan Chandra tidak benar.

Tetapi, paling tidak, ada sesuatu yang perlu dicermati, terutama oleh KPK, bahwa ternyata Markus sudah merambat ke KPK. Jika mengikuti keyakinan Kapolri

Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supanji bahwa tindak pidana pemerasan atau penyuapan itu memang ada dan terbukti dengan aliran dana dari Anggoro Widjojo. Walaupun, memang, Jaksa Agung mengakui bahwa penerimaan uang secara langsung oleh oknum pimpinan KPK tidak ada.

Tetapi Polri dan kejaksaan menyatakan memiliki adanya pembuktian aliran dana Rp.5,15 milyar dari Anggoro Widjojo, pemegang saham PT Masaro kepada oknum pimpinan KPK. Anggoro menyerahkan uang itu kepada adiknya Anggodo (Markus 1). Anggodo meneruskan ke Ary Muladi (Markus 2 yang diduga akrab dengan lingkaran KPK). Dalam keterangan awal dalam berita acara pemeriksaan (BAP), Ary Muladi menyerahkan uang itu langsung ke Ade Rahardja (Ketua Tim Penyidik KPK). Namun dalam keterangan berikutnya Ary Muladi mengaku memberikan uang itu kepada Yulianto (Markus 3 yang diduga akrab dengan



Anggodo Widjojo diduga merupakan pelaku utama rekayasa penyuapan KPK



Aksi dukung-mendukung kepolisian dan KPK di bundaran HI, Jakarta

lingkaran KPK).

Dari Yulianto, uang diserahkan kepada Ade Rahardja, yang kemudian membaginya kepada pimpinan KPK (Chandra Hamzah Rp1 miliar, Bibit S Rianto Rp1,5 miliar, M. Jasin Rp1 miliar dan Bambang Rp1 miliar), kepada Tim Penyidik dan Sopir Rp400 juta dan media massa Rp250 juta.

Bukti yang ada atas penyerahan uang itu antara lain kartu parkir mobil KPK dan

Ary Muladi di lokasi penyerahan uang di Bellagio, Pasar Festival, Kuningan, Jakarta. Juga Ary Muladi dan Ade Rahardja enam kali bertemu di KPK, serta melakukan percakapan telepon sebanyak 64 kali.

Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri memastikan tidak ada rekayasa, atau aliran dana kepada penyidik, terkait dengan pemeriksaan dua pimpinan KPK. "Penyelidikan dan penyidikan atas pimpinan Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto sesuai dengan prosesur yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)," kata Kapolri pada Rapat Kerja dengan Komisi III DPR, Kamis malam (5/11). Untuk kasus ini, jelas Kapolri, telah didengar keterangan 22 saksi termasuk 3 saksi ahli.

Aliran dana yang disalurkan melalui markus-markus itu, terkait pula dengan dugaan buruknya birokrasi penegakan hukum di KPK. Hal ini tergambar dari sangkaan kepada Bibit dan Chandra yang dianggap menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan dan pencabutan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Anggoro dan Joko Tjandra.

Menurut Kapolri, dalam kasus penyalahgunaan wewenang, penyidik menemukan dua kasus yang aneh dalam penerbitan dan pencabutan cekal atas nama Anggoro dan Joko Tjandra. Menurut Kapolri, mekanisme yang berlaku di KPK adalah keputusan bersifat kolektif. Namun dalam penerbitan dan pencabutan cekal, hanya dilakukan oleh dua pimpinan KPK. "Berdasarkan berita acara pemeriksaan, tiga pimpinan KPK yakni Antasari Ashar, Harjono dan M Yasin tidak tahu ada pencekal dan pencabutan cekal," kata Kapolri.

Selain itu, dari hasil penyidikan juga terungkap bahwa ada hal yang aneh dalam surat pencabutan cekal. Dalam surat pencabutan disebutkan bahwa cekal dicabut dengan mempertimbangkan hasil penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Padahal proses ini tidak pernah dilalui.

Namun, pihak KPK membantah ada yang aneh dalam proses penerbitan dan pencabutan cegah (bukan cekal) Anggoro dan Joko Tjandra tersebut. Hal seperti itu

Anekdote Polisi yang Tulus

Citra polisi (Kepolisian Negara Republik Indonesia) kini sedang menukik hingga ke titik nadir. Lembaga pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat ini sedang menghadapi berbagai ceriaan akibat diduga merekayasa kasus perencanaan pembunuhan, pemerasan dan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai upaya untuk mengkriminalisasi KPK.

Kendati Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri sudah berulang kali menegaskan bahwa tidak ada rekayasa untuk mengkriminalisasi KPK, namun kepercayaan kepada Polri tidak kunjung pulih. Seolah-olah polisi selalu salah dan KPK selalu benar.

Ada sebuah anekdot tentang kepercayaan

kepada polisi, yang menggambarkan berbuat baik dengan tulus pun, polisi selalu dicurigai, tidak dipercaya.

Alkisah, di sebuah kota hidup seorang janda beranak satu. Suaminya telah meninggal semasih Si Anak berusia dua tahun. Namun Si Anak belum memahami betul tentang kematian ayahnya. Sehingga seringkali Si Anak bertanya kepada ibunya: "Di mana ayah, koq lama banget tak pernah kembali?"

Ibunya selalu menjawab bahwa ayahnya sudah pergi ke sorga, dipanggil oleh Tuhan. "Jadi ayah tidak mengingat kita lagi dan tak mau kembali lagi?" tanya Si Anak.

"Bukan! Ayah sangat sayang sama kita dan selalu ingat sama kita. Di sana ayah sedang

membangun rumah untuk kita. Nanti kita akan dipanggil ke sorga, bertemu lagi dengan ayah," jelas ibunya.

Suatu ketika, saat Si Anak duduk di kelas satu SD, beberapa orang teman sepermainannya memiliki sepeda. Si Anak yang sangat sedih karena belum punya sepeda, meminta kepada ibunya supaya dibelikan sepeda. Tetapi ibunya tidak segera memenuhi permintaan Si Anak.

Sehingga Si Anak teringat kepada ayahnya. Karena, kata teman-temannya, sepeda itu dibeli oleh ayah mereka dengan harga satu juta rupiah. Lalu, Si Anak menulis surat kepada ayahnya, berbunyi:

Ayah di Sorga.

Teman-temanku sudah punya sepeda, dibeli oleh ayah mereka. Tinggal aku yang belum. Kalau ayah tidak sempat pulang, tolonglah kirimkan uang satu juta rupiah untuk membeli sepeda.

Si Anak pun memasukkan surat itu ke dalam amplop dan mengirimkannya ke kotak pos di Kantor Pos dekat kelurahan. Di sampul amplop

sudah lazim dilakukan di KPK sejak kepemimpinan terdahulu. Hal ini ditegaskan Mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas dengan mengantarkan surat kepada Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji dan sekaligus meminta Bareskrim Mabes Polri menahan dirinya karena telah melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

"Saya mengajukan surat permohonan penahanan terhadap diri saya. Kalau keduanya ditahan karena penyalahgunaan wewenang (pencakalan), saya juga pernah melakukan itu. Oleh karena itu, saya juga harus ditahan dan dijadikan tersangka," kata Erry usai mengantarkan langsung surat itu di Bareskrim Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Jumat (30/10/2009) malam.

Ulah Markus

Sangat mungkin memang KPK benar. Tetapi, penyidik Polri juga belum tentu seratus persen salah. Namun kejadian ini mengisyaratkan, KPK juga harus berbenah diri. Baik dalam proses birokrasi penegakan hukum maupun dalam mencegah persekongkolan dengan Markus-Markus.

Sebab, tindak pidana pemerasan yang dilakukan oknum penyidik KPK, sudah pula pernah terjadi pada Maret 2006. Seorang penyidik KPK melakukan pemerasan sebesar Rp700 juta terhadap seorang saksi yang terkait dengan kasus dugaan korupsi di PT Industri Sandang Nusantara.

Selain itu, beberapa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah pernah dipulangkan ke lembaga mereka masing-masing alias dipecat dari KPK karena terindikasi menerima suap dari

beberapa tersangka tindak pidana korupsi. "Memang belum ada secara nyata terima suap. Namun, indikasi ke arah itu ada beberapa orang. Dan mereka sudah kami pulangkan ke lembaga mereka masing-masing bulan lalu," kata staf KPK Oskar Haris Napitupulu SH dalam dialog interaktif di Jakarta, Jumat (26/8/2006).

Ditambah lagi adanya Markus yang menyoru sebagai penyidik KPK (gadungan). Seperti pernah tertangkap oleh Polisi Daerah Sumatera Utara, Selasa, 2 September 2007, dua orang penyidik KPK gadungan yang sedang memeriksa salah satu bupati tersangka kasus korupsi. Kedua penyidik KPK gadungan itu meminta uang Rp1,5 miliar kepada korban dengan tujuan kasusnya bisa ditutup KPK.

Ulah para Markus ini telah mengotori KPK. Markus yang tak segan mengaku sebagai penyidik KPK itu bergentayangan di berbagai instansi dan daerah dengan sasaran para pejabat yang sedang dan diduga terlilit kasus korupsi. KPK sendiri, pernah membeberkan, menerima pengaduan sekitar 100 kasus KPK gadungan.

Rekaman sadapan pembicaraan telepon Anggodo yang membuat publik terkejut, sedih, marah dan galau, selain mengindikasikan telah adanya skenario (rekayasa) pengkriminalisasian oknum pimpinan KPK, juga memberi petunjuk bahwa para Markus juga telah ikut berperan (mengarui) proses penegakan hukum di KPK.

Semua ini memperlihatkan, kiranya KPK harus lebih meningkatkan komitmen pada prinsip *zero tolerance* terhadap hal-hal yang terkait dengan tindak pidana korupsi, diterapkan dengan tegas, termasuk kepada (di dalam KPK) sendiri.

Dengan demikian, dukungan publik

yang demikian besar, yang disertai dengan akseptasi (harapan) yang juga demikian besar, tidak sampai kehilangan kepercayaan kepada KPK. Saat ini, KPK masih dipandang oleh publik sebagai lembaga hukum pemberantas korupsi yang patut dipercaya dan didukung sepenuhnya. Jauh lebih dipercaya dari lembaga hukum utama (Polri dan Kejaksaan yang bukan badan ad-hoc), yang selama ini terbukti belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Sehingga, kekuatan reformasi, melahirkan KPK (UU No.30 Tahun 2002) sebagai badan ad-hoc independen yang diberi kewenangan jauh melampaui kewenangan Polri dan Kejaksaan Agung. Jangan sampai mandat ini kehilangan kepercayaan publik.

Walau terasa pahit, apa yang dialami KPK dalam beberapa bulan terakhir ini, KPK sepatutnya menjadikan momentum ini untuk berbenah diri. Tidak cukup dengan melakukan reaksi bantah dan membantah seperti lazim dilakukan para pejabat pemerintah di negeri ini, tetapi tidak sama sekali berusaha membenahi birokrasi dan sistem penegakan hukum. Terbukti, hingga saat ini mafia peradilan dan markus-markus masih punya tempat hingga saat ini, bahkan telah merambat subur ke dalam lingkaran KPK.

Komitmen reformasi peradilan sungguh tengah diuji. Kiranya kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah justru dapat memberikan jawaban (momentum) atas apa yang terjadi dan menjadi solusi pembenahan birokrasi dan sistem penegakan hukum, sehingga dapat berguna mengakselerasi pencapaian tujuan menyejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. ■ BI/BHS-CRS

dia tulis: Kepada Ayah di Sorga. Di kolom pengirim, Si Anak pun menulis nama dan alamat rumahnya dengan lengkap, meniru alamat yang selalu dibuat ibunya setiap kali mengirim surat kepada kerabat.

Kemudian esok harinya, Pak Pos menyortir dan mengantarkan surat itu. Membaca tujuan surat tersebut, Pak Pos merasa iba sehingga tidak tega mengembalikan suratnya. Mau dikemanakan surat itu? Akhirnya Pak Pos menyerahkannya ke kantor polisi terdekat. Siapa tahu surat itu berisi sesuatu hal.

Ketika polisi menerima surat itu, si petugas juga berpikiran demikian. Lalu polisi itu membuka surat dan membacanya. Si Polisi sangat terenyuh membaca surat itu. Dia langsung menangkap bahwa Si Anak ini mungkin sudah tidak punya ayah.

Lalu petugas polisi melaporkan surat itu kepada komandannya. Si Komandan juga terenyuh. Spontan, komandan meminta semua anak buahnya berkumpul di ruang rapat. Kepada anak buahnya, komandan

menjelaskan isi surat Si Anak itu. Komandan pun mengajak semua anak buahnya dengan sukarela, tulus, urunan memenuhi permintaan Si Anak.

Untuk memotivasi, komandan langsung merogoh koceknya. "Ini dari saya dua ratus lima puluh ribu," katanya. Lalu, semua anak buahnya pun membuka dompet, hingga terkumpul uang sebanyak Rp 900.000.

"Iya, sudah, segitu juga sudah cukup. Kan, ada juga sepeda seharga Rp 900.000," kata komandan. Komandan pun segera menugaskan dua orang anak buahnya mengantarkan uang itu ke alamat Si Anak.

Kebetulan, Si Anak ada di rumah sendirian. Dengan sedikit kaget, Si Anak membukakan pintu. "Kamu yang bernama Si Anu dan mengirim surat kepada ayahmu di sorga?" tanya polisi, yang diijikan Si Anak. "Oh, ini uang yang kamu minta," kata polisi seraya menyerahkan uang itu dan menggelus-elus kepala Si Anak. Setelah berbasa-basi menanyakan keadaan Si Anak dan ibunya,

kedua polisi itu pun pergi.

Setelah polisi itu pergi, dengan sangat gembira, Si Anak membuka amplop berisi uang itu. Setelah dia hitung jumlahnya Rp900.000. Dia tercenung beberapa saat. Lalu, Si Anak segera menulis surat lagi kepada ayahnya di sorga dan mengirimkannya lewat kantor pos.

Oleh Pak Pos, surat itu diantar lagi ke kantor polisi. Petugas piket di kantor polisi, langsung menyerahkan surat itu ke komandan, karena dia yakin surat itu berisi ucapan terimakasih dari Si Anak. Komandan pun membuka dan membaca surat itu.

Ayah di Sorga!

Terima kasih telah mengirimkan uang untuk membeli sepeda. Tapi, ayah, lain kali kalau mau kirim uang jangan lewat polisi. Karena kalau lewat polisi langsung dipotong sepuluh persen, yang mereka serahkan hanya Rp 900.000.

Membaca surat itu, komandan polisi geleng-geleng kepala. "Kita menolong dengan tulus pun, tidak dipercaya," desahnya.



Presiden SBY-Wapres Boediono foto bersama di depan Istana Negara dengan 34 KIB II sesuai pelantikan tanggal 22 Oktober 2009

Menanti Gebrakan 100 Hari KIB II

Anggota Kabinet Indonesia Bersatu Kedua telah dilantik. Komitmen disatukan, agenda dan target juga telah dibuat. Kini masyarakat menunggu realisasinya.

Pemerintahan di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono resmi melantik menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua (KIB II) pada 22 Oktober 2009 lalu. Tiga puluh empat (34) orang menteri yang terdiri dari 22 orang wajah baru dan 12 wajah lama dari berbagai partai politik, profesional maupun lingkaran dekat Presiden, dipilih untuk membantu pemerintahan lima tahun ke depan (2009-2014). Tiga pejabat setingkat menteri serta lima dari sebelas wakil menteri juga sudah dilantik kemudian (10/11/09).

Pembangunan ekonomi dengan target pertumbuhan ekonomi 7 persen pada 2014, peningkatan kesejahteraan rakyat, perbaikan tata kelola pemerintahan, penegakan demokrasi, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, serta pembangunan yang inklusif dan berkeadilan ditetapkan sebagai agenda utama pembangunan lima tahun ke depan. Dan untuk mendorong tercapainya target-target pembangunan di segala bidang, pembangunan infrastruktur pun dijadikan salah satu fokus pembangunan.

Khusus bidang ekonomi, Presiden SBY juga menetapkan 10 agenda penting yaitu, pertumbuhan, lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, infrastruktur, pertanian, industri, energi, investasi, fiskal dan finansial, serta *good governance* sebagai puncaknya.

Untuk menyamakan komitmen dalam membangun bangsa hingga ke pelosok negeri dengan menghilangkan berbagai hambatan atau sumbatan yang diistilahkan Presiden SBY dengan *bottle neck*,

pertemuan atau rembug nasional (*Nasional Summit*) pun diselenggarakan pada 29-31 Oktober lalu.

Lebih lanjut, setelah menelaah hasil dari rembug nasional yang diikuti oleh tidak kurang dari 1100 pemangku kepentingan (*stakeholders*) itu, KIB II dalam sidang paripurna ke-2, Kamis (5/11/2009), kemudian menetapkan 45 program aksi penting untuk 100 hari pertama mereka bekerja.

Dari 45 program aksi tersebut, setelah melihat perkembangan di beberapa bidang yang dirasa perlu mendapat penanganan lebih cepat, termasuk perkembangan perseteruan Kepolisian dan Kejaksaan dengan KPK serta terjadinya pemadaman listrik bergilir di hampir seluruh pelosok negeri yang merusak pesta kelahiran KIB II belakangan ini, Presiden kemudian menetapkan 15 program sebagai program pilihan atau prioritas untuk segera direalisasikan dalam jangka pendek atau 100 hari kerja.

Lengkapnya, 15 program aksi prioritas 100 hari pertama KIB II dimaksud yakni; Pertama, pemberantasan mafia hukum di semua lembaga negara dan penegakan hukum, seperti makelar kasus, suap menyuap, pemerasan, jual beli perkara, mengancam saksi, pungutan tidak semestinya dan sebagainya yang bertentangan dengan rasa keadilan dan kepastian hukum. Kedua, revitalisasi industri pertahanan. Dalam hal ini, membuat rencana induk dan arah revitalisasi sehingga bisa dipenuhi kebutuhan dalam negeri dan kontrak yang sedang berjalan. Ketiga, penanggulangan terorisme. Di antaranya

berupa peningkatan kapasitas dan restrukturisasi lembaga penanggulangan terorisme untuk lebih melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Keempat, soal listrik. Yakni, memastikan terpenuhinya kebutuhan listrik di seluruh Indonesia dalam lima tahun ke depan. Kelima, peningkatan produksi dan ketahanan pangan. Dalam hal ini berupa perumusan kembali rencana induk untuk meningkatkan ketahanan pangan yang lebih terintegrasi dengan faktor pendukung, seperti irigasi, pupuk dan subsidi khusus bunga bagi petani.

Kemudian prioritas keenam, memastikan revitalisasi industri pabrik pupuk dan gula yang meliputi penggunaan teknologi dan pembiayaannya. Ketujuh, pembebanan keruwatan penggunaan tanah dan tata ruang, terutama sinkronisasi antara UU Kehutanan, UU Pertambangan, UU Lingkungan Hidup serta tata perijinan dan penggunaan di lapangan. Kedelapan, di bidang infrastruktur, berupa prioritas pematangan rencana pembangunan ruas jalan-jalan yang penting antar-provinsi dan di pulau besar. Termasuk fasilitas pelabuhan, dermaga, bandara dan infrastruktur perhubungan dan perikanan. Kesembilan, pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan menengah (UMKM) yang dikaitkan dengan kredit usaha rakyat (KUR). Pemantapan rencana penyaluran KUR senilai Rp 10 triliun dalam 5 tahun yang melibatkan bank, swasta dan lembaga penjaminan. Kesepuluh, mobilisasi sumber pembiayaan di luar APBN & APBD untuk membiayai pembangunan, terkait pembangunan infrastruktur, listrik, ketahanan pangan.

Selanjutnya yang kesebelas, masalah penanganan perubahan iklim dan lingkungan hidup. Yaitu mengintensifkan pemberantasan pembalakan hutan, men-



Pemberantasan mafia hukum program kerja 100 hari SBY

jaga hutan lindung dan mencegah kebakaran hutan serta kelestarian terumbu karang. Keduabelas, bidang reformasi kesehatan. Yakni, dimana prioritasnya bukan lagi soal berobat gratis melainkan sehat gratis bagi warga miskin. Untuk itu maka fasilitas kesehatan masyarakat akan lebih diberi penguatan kapasitas dan kapabilitas.

Ketigabelas, bidang reformasi pendidikan, yakni memastikan adanya keterkaitan antara hasil lembaga pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha selaku pasar tenaga kerja. Keempatbelas, peningkatan kesiagaan penanggulangan bencana dengan membentuk satuan khusus dengan segala fasilitas yang dibutuhkan, yang siap setiap saat diterjunkan ke berbagai lokasi bencana. Terakhir atau yang kelima belas, sinergi antara pusat dan daerah yang bisa mencegah pemborosan. Sinergi ini meliputi jajaran pemerintah, kegiatan pembangunan ekonomi, kesejahteraan, hukum dan keamanan.

Mencermati dan membandingkan program ini dengan program yang dicanangkan pada periode KIB I sebelumnya, bahkan dengan program pemerintah sebelumnya, 45 program aksi dan 15 program pilihan tersebut secara umum tidak ada yang baru. Perbedaannya hanya pada urutan prioritas dan penekanan pada sektor-sektor. Misalnya, di bidang hukum, program 100 hari KIB II kali ini menekankan pada penyelesaian mafia hukum. Kemudian di bidang ekonomi, ditekankan soal pembangunan sektor kelistrikan, infrastruktur, dan revitalisasi pabrik pupuk dan gula. Di bidang kesra, penekanannya antara lain pada reformasi kesehatan dan pendidikan.

Jadi, apa yang dipaparkan Presiden SBY itu sebenarnya adalah program lama yang tidak diimplementasikan secara optimal oleh kabinetnya pada periode sebelumnya. Contohnya, pemberantasan mafia hukum yang dijadikan prioritas pertama pada periode ini. Program itu, dengan sendirinya diduga muncul seiring karena

kuatnya sorotan publik terkait dugaan kriminalisasi terhadap petinggi KPK belakangan ini.

Demikian halnya dengan pembangunan sektor kelistrikan. Pada pemerintahan sebelumnya, Presiden SBY telah mencanangkan proyek pembangunan PLTU 10.000 MW. Namun, realisasi dari proyek itu selalu molor oleh berbagai sebab, mulai masalah pendanaan hingga permintaan investor akan adanya jaminan pemerintah.

Terlepas dari situ, kelima belas program prioritas itu boleh disebut cukup kompak dan solid, karena satu sama lainnya saling terkait untuk menyelesaikan berbagai masalah di negeri ini. Mengambil contoh; penempatan pemberantasan mafia hukum sebagai prioritas utama misalnya, adalah suatu langkah cukup tepat. Disebut tepat, bukan hanya karena kini sedang disorot, tapi bidang ini memang sangat mempengaruhi bidang-bidang lainnya. Pada pembangunan ekonomi contohnya, kepastian hukum merupakan salah satu yang sangat dibutuhkan para investor.

Membuat kelistrikan sebagai program prioritas juga adalah suatu yang sangat tepat karena bidang ini merupakan salah satu faktor utama bagi pengembangan sektor industri dan perdagangan. Demikian halnya dengan infrastruktur, karena infrastruktur akan mendorong kemajuan sektor lainnya, seperti industri, pertanian, pendidikan dan lain sebagainya. Jadi, pembangunan listrik dan infrastruktur memang harus diutamakan dalam rangka menciptakan daya saing pengusaha dan daya saing negara terhadap negara lain. Hanya dengan demikian investasi akan berkembang dan dampak selanjutnya, peluang kerja pun akan tercipta, sekaligus akan menekan pengangguran dan kemiskinan.

Menempatkan revitalisasi industri pertahanan sebagai program prioritas juga merupakan langkah tepat karena industri ini tidak saja diperlukan bagi memenuhi kebutuhan persenjataan dalam negeri, tapi juga mampu mendatangkan devisa

melalui penjualan senjata ke negara negara sahabat.

Prioritas merevitalisasi pabrik pupuk dan pabrik gula juga adalah langkah tepat. Karena dengan langkah ini, berarti pemerintah menormalkan aktivitas ekonomi desa. Karena, selama ini masalah pupuk selalu menjadi masalah sektor pertanian secara nasional. Di samping harganya mahal, terkadang petani juga sulit mendapatkannya.

Demikian juga halnya dengan prioritas-prioritas lainnya yang keseluruhan terkait satu sama lain. Lebih dari itu, semua program yang dirumuskan pemerintah ini pada hakikatnya memang baik. Namun sesuai pengalaman di waktu lalu, yang menjadi permasalahan kemudian adalah implementasi program itu sendiri. Untuk itu, perlu konsistensi dengan yang direncanakan dan didukung dengan pengawasan yang baik, merupakan syarat utama suksesnya sebuah program. Karena, sebaik apa pun program itu, tanpa pengawasan yang baik, dikhawatirkan akan tidak berjalan dengan maksimal. Karena itu, untuk kinerja KIB II ini pun diperlukan pengawalan dan pengawasan terus-menerus agar semakin tertutup kemungkinan terjadinya penyelewengan implementasi di lapangan.

Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga pengawas jalannya pelaksanaan pemerintahan sangat diharapkan dalam hal ini. Namun, mengingat peta komposisi DPR 2009-2014 yang sudah didominasi partai pendukung pemerintah sekarang, muncul kekhawatiran tidak efektifnya pelaksanaan fungsi pengawasan dimaksud. Karena itu, demi kepentingan bersama, masyarakat umum diharapkan terus mengawal ketat kinerja kabinet ini. Pemerintah sendiri pun diharapkan tidak terlalu 'alergi' dengan kritik dari publik, sejauh kritik itu dimaksudkan untuk memperbaiki kinerjanya. Selain itu, setiap program pemerintah hendaknya disosialisasikan secara terbuka kepada publik.

Kini masyarakat menunggu KIB II merealisasikan janji dan targetnya. Realisasi program 100 hari memang sangat ditunggu oleh masyarakat sebagai pembuka langkah kinerjanya pada lima tahun ke depan. Namun jauh lebih penting dari situ adalah hasil kinerja kabinet ini lima tahun ke depan, karena hasil kerja lima tahun merupakan landasan masa depan bangsa ini untuk puluhan, bahkan ratusan tahun ke depan.

Terakhir, masyarakat mengharapkan kabinet ini bekerja dengan jujur dan sepenuh hati demi bangsa dan negara, bukan untuk satu kelompok tertentu. Dengan demikian, program yang disusun di forum prestisius National Summit itu tidak hanya bagus di atas kertas. ■ BHS, JK, PAN

Infrastruktur Jadi Prioritas



Percepatan penyediaan infrastruktur menjadi prioritas utama yang akan dicapai oleh tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II lima tahun ke depan. Mencari solusi menyukseskan rencana, para stakeholder duduk bersama dalam ajang National Summit. Sumbatan di leher botol kini diharapkan telah teratasi.

Sejuta harapan rakyat yang disandarkan kepada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, terfokus kepada peningkatan perekonomian, kesejahteraan rakyat, demokrasi dan penegakan hukum. Untuk memacu ke tujuan itu, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu instrumen utama. Namun, sejauh ini, pembangunan di sektor ini masih terseok-seok oleh berbagai hambatan.

Mencoba menguak dan mengatasi hambatan itu, pemerintah melakukan terobosan lewat Pertemuan Nasional atau Rembug Nasional yang disebut *National Summit*. Acara yang mempertemukan para stakeholder, yakni pemerintah pusat dan daerah, akademisi, dan pihak swasta (KADIN) sejak tanggal 29 hingga 31 Oktober 2009 di Jakarta, ini merentang tujuan nasional sebagaimana yang terungkap pada misinya, yakni membangun perekonomian berakar lokal berbasis nasional dan bertaraf internasional.

Selama ini, hambatan yang dianggap krusial di antaranya, pendanaan dan pemahaman konsep desentralisasi yang belum seragam sehingga menyebabkan ke-

tergantungan daerah ke pusat yang masih sangat besar. Pada sisi lain, Pemerintah Daerah justru berlomba mengeluarkan peraturan daerah (Perda) yang sering saling bertabrakan sehingga menghambat malah kontraproduktif dengan tujuan pembangunan.

Semua hambatan atau sumbatan berupa *bottle neck* atau leher botol itu intinya berkaitan dengan regulasi dan birokrasi. Sehingga acara ini pun difokuskan pada rencana perbaikan regulasi yang selama ini banyak menghambat investasi. Pada acara ini, dibuka permasalahan yang ada selama ini dan dicoba dicari solusinya dengan mendengar masukan dari berbagai pihak terutama para *stakeholder*.

Pemerintah dalam hal ini, seperti diungkapkan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat ini tengah mempersiapkan penguatan kewenangan gubernur melalui Peraturan Pemerintah. "Gubernur akan diperkuat peranannya sebagai wakil pemerintah pusat," kata Gamawan. Menurutny, urusan yang selama ini ditangani Departemen Dalam Negeri, akan

dilimpahkan kepada gubernur. Sementara Menkeu Sri Mulyani menganjurkan agar gubernur diberi peran lebih besar dalam mencegah atau membatalkan Perda bermasalah.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sebelumnya telah mengajurkan agar kebijakan yang keliru diganti atau diperbaiki. Terhitung hingga 7 Oktober 2009, Pemerintah Pusat telah membatalkan 3.513 Perda tentang berbagai pungutan di daerah karena dinilai berbenturan dengan peraturan yang lebih tinggi. Juga telah membatalkan 326 rancangan Perda (Ranperda) dan usulan revisi Ranperda sebanyak 1.436.

Sementara mengenai masalah pendanaan, mengingat keterbatasan anggaran pemerintah, maka solusinya dicari dengan menawarkan kepada investor untuk menanamkan modalnya atau bermitra melalui *Public Private Partnership (PPP)*. Mengenai hal ini, di awal tahun 2009 misalnya, pemerintah telah menawarkan proyek pembangunan infrastruktur kepada swasta senilai US\$ 82 miliar.

Untuk 5 tahun mendatang, pembangunan infrastruktur Indonesia dikatakan membutuhkan sekitar Rp1.429 triliun. Menurut Dedy S. Priatna, Deputy Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, kebutuhan pendanaan itu akan bersumber dari swasta sebesar Rp978 triliun (69%), sedangkan Rp451 triliun (31%) lagi dari pemerintah.

Menanggapi alokasi dana dari pemerintah untuk infrastruktur, Bambang Santono, Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, yang 11 November 2009 lalu dilantik menjadi Wakil Menteri Perhubungan berpendapat, alokasi anggaran pemerintah untuk infrastruktur idealnya adalah 5-6 persen dari PDB. Sementara selama ini baru berkisar 4-5 persen.

Melihat kembali program pemerintah lima tahun sebelumnya (2004-2009) yang telah, sedang, dan akan dilakukan, sesungguhnya begitu menjanjikan dan menjadi harapan yang menyejukkan bagi rakyat. Program yang merupakan skala prioritas itu memfokuskan proyek infrastruktur yang bersifat urat nadi yang akan memperlancar peredaran "darah" perekonomian. Contohnya, jalan tol (jalan bebas hambatan) Trans Jawa sepanjang 763 km yang tengah dibangun dan beberapa yang kini tengah ditawarkan seperti: Medan-Binjai dan Medan-Kualanamu Tebing Tinggi di Prov. Sumatera Utara; Palembang-Indralaya di Prov. Sumatera Selatan; Tegayeneng-Babatan di Prov. Lampung;

Sukabumi-Ciranjang, Pasirkoja-Soreang, Cileunyi-Sumedang-Dawuan di Prov. Jawa Barat; Pandaan-Malang di Prov. Jawa Timur; Serangan-Tanjung Benoa di Prov. Bali; dan Manado-Bitung di Prov. Sulawesi Utara, yang totalnya ditargetkan mencapai 1.600 km untuk jalan tol baru.

Target pembangunan infrastruktur lainnya berupa beberapa pelabuhan udara dan proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 Mega Watt. Kemudian proyek minyak dan gas yang ditekan pada pembangunan jalur transmisi dan distribusi. Ada pula pembangunan Waduk Jatigede di daerah Sumedang yang dibangun senilai US 240 juta yang ditargetkan selesai tahun 2012 yang akan berfungsi sebagai regulasi dan penuplai air ke kawasan utara Jawa Barat yang dikenal sebagai pemasok pangan nasional, di samping berfungsi juga sebagai pengendali banjir.

Sedangkan program pembangunan infrastruktur transportasi, yang ditawarkan adalah Bandara Internasional Kertajati, Terminal Feri Bojonegara (Banten)-Ketapang (Kalimantan), Pelabuhan Bojonegoro, jalur kereta api Bandara Kualanamu (Sumatera Utara), dan jalur kereta api Bandara Soekarno Hatta (Cengkareng Banten)-Manggarai (Jakarta). Sementara program kelistrikan adalah Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Sumatera Utara.

DDT

Selain memprioritaskan pembangunan seperti disebutkan di atas, peningkatan layanan serta peran kereta api dalam transportasi barang maupun penumpang juga menjadi prioritas pemerintah. Dalam dokumen yang diterbitkan Departemen Per-



Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas KIB II

hubungan, program revitalisasi perkeretaapian pada 2008-2010 meliputi wilayah, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Bagian Selatan, Jawa, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Di Jawa, khususnya pada proyek *double-double track* (DDT). Pembangunan proyek empat jalur dan elektrifikasi kereta api pada lintas antara Manggarai-Cikarang merupakan kali pertama di Indonesia. Dengan pemisahan rute jalur utama dan jalur komuter di koridor Manggarai-Bekasi-Cikarang menjadikan perjalanan kereta api jarak jauh dan KA komuter semakin lancar.

Namun, pembangunan megaprojek bernilai puluhan miliar Yen dan memakan waktu cukup lama ini (Sejak era Menhub Agung Gumelar tahun 1999), hingga sepuluh tahun berlalu belum bisa dipastikan kapan bisa dinikmati karena masih terkendala, belum dibebaskannya 168 rumah milik PTKA.

Seperti diketahui, pembangunan yang dibiayai dana pinjaman dari Jepang (JICA) itu memiliki syarat yang perlu dipatuhi, yakni sebelum pembebasan lahan selesai seluruhnya, tidak boleh ada pengerjaan bantalan dan rel.

Kondisi di lapangan dari Cipinang-Bekasi, pembebasan lahan mendekati selesai seluruhnya dan hampir rata dengan tanah serta siap dibangun sesuai kebutuhan.

Berbeda dengan pembangunan melalui dana APBN, dimana setiap perkilometranya selesai dibebaskan, pemasangan rel pun bisa langsung dikerjakan dan operasional kereta api pun selanjutnya bisa dilakukan.

Bila dikerjakan melalui dana sendiri, sebenarnya akan jauh lebih cepat dibanding dana pinjaman. Namun, seperti kata Tunjung Inderawan, Dirjen Perkeretaapian, Dephub, dana pemerintah terbatas, jadi bantuan masih dibutuhkan. Walau demikian, Tunjung mengatakan, instansinya akan terus berjuang agar proyek untuk

rakyat banyak itu bisa segera diwujudkan.

Menurut Tunjung, infrastruktur DDT itu akan mampu melayani sekitar 1,4 juta penumpang per hari, sangat strategis bukan hanya kemampuannya mempercepat dan memperbesar layanan, tapi juga upaya pemerintah dalam memisahkan antara jalur KA komuter dengan kereta reguler.

Selain infrastruktur di atas, pembangunan penyediaan kebutuhan dasar untuk air bersih, dan sanitasi juga merupakan rencana prioritas pemerintah. Sementara di bidang telekomunikasi, pemerintah memiliki program pembangunan serat fiber optic Palapa Ring Timur dan melakukan proses tender USO untuk menyediakan akses layanan telekomunikasi bagi sekitar 38.000 desa di seluruh Indonesia yang sama sekali belum tersentuh akses telekomunikasi.

Dari sisi lain, untuk menggerakkan potensi masyarakat, pemerintah juga memiliki program pemberdayaan masyarakat untuk sektor infrastruktur, seperti Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP), Pengembangan Kawasan Agropolitan, PNP Mandiri, dan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) atau *Regional Infrastructure for Social and Economic Development (RISE)*. PISEW ini bertujuan menanggulangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan wilayah dan meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.

Mengenai pencapaian pembangunan infrastruktur selama ini, khususnya dalam lima tahun pertama pemerintahannya Presiden SBY, seperti disebutkan di atas masih berjalan lambat. Presiden SBY sendiri mengakui tidak sedikit capaian yang meleset dari sasaran pada pemerintahannya. Dia melihat, berbagai hal seperti perijinan yang tumpang tindih, tata ruang yang tidak beres, dan peraturan yang saling bertabrakan merupakan faktor-faktor penghambat.

Dalam hal pembangunan jalan tol misalnya, di samping aturan yang dinilai



Sebagian besar jalur untuk double-double track sudah siap

sulit diterapkan, masalah dana pembebasan lahan juga merupakan persoalan utama. Terkait dengan hal itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Nurdin Manurung mengatakan, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2007 sebagai landasan hukum pembebasan lahan pembangunan sudah tidak efektif. Jika pembebasan lahan dimasukkan dalam APBN, Nurdin meyakini akan banyak membantu. Dia mencontohkan, untuk pembangunan Trans Jawa pada 2005 dibutuhkan dana Rp 3,5 triliun hanya untuk pembebasan lahan saja. "Untuk *landscaping* saja sudah habis hampir Rp 5 triliun yang belum tentu bisa dijalankan," ujarnya.

Karena itu, realisasi pembangunan jalan tol sampai akhir 2009 dia perkirakan hanya sepanjang 127 kilometer atau 7,9 persen. "Saat ini di Indonesia, jalan tol yang sudah terbangun sepanjang 690 kilometer," kata Nurdin. Sedangkan sepanjang 2.397 kilometer masih dalam proses pra-konstruksi dan persiapan tender investasi. Pemerintah merencanakan membangun jalan tol sepanjang 3.087 kilometer untuk melengkapi jaringan jalan nasional sepanjang 34.000 kilometer.

Senada dengan Nurdin, Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk Frank Sunito, pada acara dialog National Summit 2009 di Ritz Carlton juga mengatakan, kendala pembangunan jalan tol lebih banyak akibat masalah pembebasan tanah. Selain bertabrakan dan berbeda kepentingan dengan wilayah setempat, sosialisasi tentang pentingnya pembuatan jalan tol bagi masyarakat juga menurutnya masih kurang.

Melihat kendala di atas, dimana pembangunan jalan tol saja mengalami kendala demikian, tidak diketahui lagi apakah ada investor yang berminat dengan program pembangunan infrastruktur di daerah terpencil dan wilayah perbatasan yang notabene hanya menggunakan APBN terbatas. Menanggapi hal tersebut, Dr. Bambang Widianto, Deputy Menteri Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, Bappenas ketika ditanya di sela-sela acara *National Summit* mengatakan, harus diciptakan agar para investor tertarik. Dan untuk membangun rangsangan tersebutlah maka pada acara *National Summit* itu yang difokuskan adalah perbaikan regulasi.

Dengan adanya perhelatan *National Summit* yang baru pertama kalinya ini, masyarakat kini berharap kiranya 'sumbatan leher botol' yang selama ini terjadi bisa dibuang. Dengan demikian, apa yang menjadi target KIB II, dan juga menjadi harapan semua masyarakat ini bisa terwujud. ■ DEN/RI

Profil dan Program Anggota Kabinet

Untuk mengetahui sekilas rekam jejak dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan para pembantu terdekat Presiden/Wapres pada 100 hari pertama kerja mereka sebagai pondasi kebijakan yang berkesinambungan untuk lima tahun ke depan, *Berita Indonesia* mencoba merangkumnya sebagai berikut:

Menko Polhukham – Djoko Suyanto

Marsekal TNI AU Djoko Suyanto, S.IP kelahiran Madiun, Jawa Timur, 2 Desember 1950 dipercaya Presiden SBY sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM menggantikan Laksamana Widodo AS. Mantan Panglima TNI lulusan Akademi Angkatan Udara 1973 ini sebelumnya dikenal sukses menjalankan tugas. Penanganan terorisme menjadi salah satu bidang yang masuk dalam program 100 hari kerjanya.



Menko Perekonomian – Hatta Rajasa

Pada KIB I ia menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara dan menjadi ketua tim kampanye SBY-Boediono pada Pilpres 2009 lalu. Dalam program 100 harinya sebagai Menko, langkah paling utamanya adalah mendorong investasi domestik dan investasi asing langsung dengan menghilangkan hambatan investasi. Untuk memacu pertumbuhan, pemerintah menurut pria kelahiran Palembang, 18 Desember 1953 ini harus bekerja keras menghapus segala macam hambatan seperti ketersediaan energi, infrastruktur yang buruk, pembiayaan yang mahal, masalah perpajakan, perburuhan, dan aturan yang tumpang tindih yang dikeluhkan banyak investor selama ini. Dan yang lebih penting menurutnya adalah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dalam lima tahun ke depan, yakni pertumbuhan ekonomi yang lebih banyak didorong oleh



investasi riil dan ekspor.

Menko Kesra – Agung Laksono

Mantan ketua DPR 2004-2009 yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar 2004 dan 2009, H.R. Agung Laksono dipilih menjabat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menggantikan Aburizal Bakrie yang menjadi atasannya di partai Golkar. Sebagai Menko Kesra, pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah, 23 Maret 1949 lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia ini, mengatakan akan melanjutkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam program 100 hari dan 5 tahun mendatang. Jaringan pengalaman sosial lainnya, seperti BOS, beasiswa, jamkesmas kepada masyarakat hampir miskin dan sangat miskin juga menurutnya akan tetap berjalan.



Mensesneg – Sudi Silalahi

Pemangku jabatan Menteri Sekretaris Kabinet pada KIB I, Letjen TNI (Purn) Sudi Silalahi kini dipercaya menjadi Menteri Sekretaris Negara menggantikan Hatta Rajasa yang menjadi Menko Perekonomian. Sudi yang mantan Pangdam V Brawijaya (1999) Surabaya, ini dikenal merupakan orang yang sangat dekat dengan Presiden SBY. Sebelumnya, ia adalah Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di bawah Menkopolkukham SBY dalam Kabinet Gotong Royong (2001-2004). Tentang program kerja, pria kelahiran Pematangsiantar, Sumatera Utara, 13 Juli 1949 ini mengatakan, sudah membuat program 1 tahun dan 5 tahun ke depan yang intinya menargetkan pencapaian hal-hal yang belum dicapai dalam 5 tahun sebelumnya.



Mendagri – Gamawan Fauzi

Gubernur Sumatera Barat (2005-2010) yang juga mantan Bupati Solok (1995-

2000) Gamawan Fauzi ditunjuk menjadi Menteri Dalam Negeri dalam KIB II. Sebagai seorang birokrat sipil yang memiliki integritas tinggi, pria kelahiran Sumatera Barat 9 November 1957 yang merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Andalas, ini telah mematahkan kebiasaan kursi Mendagri dari kalangan militer selama 45 tahun ini. Gamawan yang dinilai berhasil melakukan tata kelola pemerintahan yang baik selama menjabat bupati dan gubernur, diharapkan dapat meneruskan sukses itu di tingkat nasional. Untuk 100 hari pertamanya, program kerjanya mencakup evaluasi daerah pemekaran, menata hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta menjamin bahwa seluruh kebijakan pemerintah pusat didukung pemerintah daerah dengan tidak mengesampingkan prinsip otonomi daerah yang akan tetap dijalankan.



Menu – Marty Natalegawa

Ia seorang diplomat senior yang membangun karir dari bawah dan terakhir sebagai Duta RI untuk PBB, terpilih menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Nur Hasan Wirajuda. Memimpin Deplu lima tahun ke depan, menurut pria kelahiran Bandung, 22 Maret 1963 ini, Indonesia akan terus berperan secara aktif menjembatani visi yang berbeda antar negara-negara yang berselisih, serta memperlihatkan sosok Indonesia yang moderat dan teguh dalam bersikap.



Menhan – Purnomo Yusgiantoro

Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro MSc., MA., Ph.D yang hampir sembilan tahun berada di pos Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral, sekarang dipercaya menjadi Menteri Pertahanan menggantikan Juwono Sudharsono. Soal program kerja, mantan Wakil Gubernur Lemhanas (1998-2000) ini mengatakan akan memprioritaskan peningkatan renumerasi terhadap prajurit di daerah perbatasan dan



prajurit pada umumnya. Selain itu, ia juga memprioritaskan optimalisasi dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran belanja pertahanan yang selama ini masih banyak mengalami kebocoran. Penataan penjagaan daerah terluar, penyelesaian bisnis TNI, dan revitalisasi industri pertahanan, juga menjadi prioritas program 100 hari lulusan Sarjana Teknik ITB ini.

MenkumHam – Patrialis Akbar

Politisi Partai PAN, lulusan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Jakarta, Patrialis Akbar, dipilih sebagai Menteri Hukum dan HAM menggantikan Andi Matalatta. Untuk program 100 hari, mantan anggota DPR RI (1999-2009) kelahiran Padang, Sumatera Barat, 31 Oktober 1958 ini, mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Mahkamah Agung mengenai pelaksanaan UU Pengadilan Tipikor serta penegakan Hak Asasi Manusia.



Menkeu – Sri Mulyani

Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II kembali diduduki Sri Mulyani Indrawati. Wanita kelahiran Bandar Lampung, 26 Agustus 1962 yang sebelumnya juga pernah menjabat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas itu, dalam 100 hari kepemimpinannya akan memprioritaskan, menciptakan perbaikan iklim investasi dan memperbaiki berbagai program untuk peningkatan aktivitas di sektor industri. Ke depan, ia mengatakan berencana membuka kawasan ekonomi khusus (KEK) di Indonesia. Tapi untuk ini, dia mengaku dibutuhkan banyak waktu hingga beberapa tahun ke depan.



Menteri ESDM – Darwin Zahedy Saleh

Kader dari Partai Demokrat, Darwin Zahedy Saleh terpilih menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan Purnomo Yusgiantoro. Dalam program 100 hari kerjanya, pria kelahiran Indragiri Hilir, Riau, 29 Oktober 1960, ini me-



ngatakan akan fokus pada beberapa masalah penting, di antaranya soal pengembangan Coal Bed Methane (CMB) dan Panas Bumi (geothermal).

Memperin – MS Hidayat

Ketua KADIN (2004-2009), Mohamad Suleman Hidayat menjadi Menteri Perindustrian menggantikan Fahmi Idris. Dalam programnya, MS Hidayat mencaangkan empat sektor prioritas yakni: energi, infrastruktur, ketahanan pangan, dan reformasi birokrasi. Sementara dalam program 100 hari kerja pertama, pria kelahiran Jombang, Jawa Timur, 2 Desember 1944 ini, fokus pada sektor energi dan infrastruktur sebagai pendorong utama tumbuhnya industri.



Mendag – Mari Elka Pangestu

Putri ekonom terkenal Indonesia, J. Panglaykim, kelahiran Jakarta, 23 Oktober 1956, terpilih kembali sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) untuk kedua kalinya. Peraih gelar Bachelor dan Master of Economics dari The Australian National University, serta gelar Ph.D dalam bidang Perdagangan Internasional, Keuangan dan Ekonomi Moneter dari Universitas California, Davis 1986, ini untuk program 100 hari memprioritaskan menjaga stabilitas harga dan penyediaan barang kebutuhan pokok masyarakat menjelang akhir tahun 2009 dan awal tahun depan, membuat cetak biru perdagangan dalam negeri dan luar negeri, menyusun buku putih pembangunan dan pengelolaan pasar tradisional, meningkatkan penetrasi produk ekspor Indonesia ke pasar non-tradisional dan menjajaki pasar baru.



Mentan – Suswono

Mantan Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI periode 2004-2009 dari Fraksi PKS Ir. H. Suswono, MMA dipercaya menjadi Menteri Pertanian menggantikan Anton Apriyantono yang juga kader PKS. Untuk 100 hari masa jaba-



tannya, pria kelahiran Tegal, Jawa Tengah, 20 April 1959 lulusan Magister Manajemen Agribisnis dari IPB Bogor, ini memprioritaskan audit luas lahan pertanian. Audit itu menurutnya untuk mengetahui luas lahan yang masih dapat digunakan untuk pertanian.

Menhub – Freddy Numbery

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pada KIB I, Laksamana Madya (Purn) Freddy Numbery dipercaya SBY menjabat Menteri Perhubungan dalam KIB II menggantikan Jusman Syafei Djamal. Dalam program kerja 100 hari, mantan Gubernur Papua (1998) kelahiran Yapen Waropen, Papua, 15 Oktober 1947, ini memprioritaskan revitalisasi moda transportasi yang diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan seperti yang telah dibuat dalam konsep blueprint, 'zero accident'. Setelah melakukan inspeksi langsung ke beberapa pelabuhan dan bandara, dia mengakui masih menemukan kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki. Untuk itu, ia menyerahkan agar pelayanan publik ditingkatkan sepanjang waktu.



Menteri Kelautan dan Perikanan – Fadel Muhammad

Mantan Gubernur Provinsi Gorontalo Ir. H. Fadel Muhammad Al-Haddar menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Freddy Numbery yang menjadi Menteri Perhubungan. Doktor Ilmu Administrasi Negara kelahiran Ternate, Maluku, 20 Mei 1952, ini selama memimpin Provinsi Gorontalo terkenal memiliki prestasi yang gemilang. Ia sedikitnya mengantongi 43 penghargaan dari buah pikiran atau kegiatan yang dijalaninya. Beberapa di antara penghargaan itu dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sendiri. Untuk program 100 hari, Fadel yang juga pengurus harian DPP Partai Golkar ini mengatakan akan lebih memfokuskan pekerjaan pada upaya peningkatan pendapatan nelayan dan masyarakat pesisir.



Menakertrans – Muhaimin Iskandar

Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB yang juga mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2004-2009, Muhaimin Iskandar terpilih

menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggantikan Erman Soeparno. Pria kelahiran Jombang, Jawa Timur, 24 September 1966 lulusan sarjana politik dari UGM dan magister komunikasi dari UI, ini mengatakan akan memprioritaskan pelayanan, peningkatan kualitas perlindungan bagi tenaga kerja, khususnya TKI di luar negeri. Menurutnya, TKI, terutama di sektor informal, harus dihormati, dilayani, diberi bantuan dan diberi perlindungan untuk mendapat hak mereka di negara penempatan. Peningkatan kualitas program transmigrasi mulai dari persiapan penempatan, pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi juga menjadi prioritasnya. Selain itu, pemerintah juga menurutnya akan melakukan penertiban terhadap keberadaan tenaga kerja asing (TKA) ilegal yang bekerja di Indonesia.



Menteri Pekerjaan Umum – Djoko Kirmanto

Ir. Djoko Kirmanto, Dipl. HE, kelahiran Pengging, Jawa Tengah, 5 Juli 1943 kembali di dapuk sebagai Menteri Pekerjaan Umum pada KIB II. Lulusan Fakultas Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1969 dan pasca sarjana dari Land and Water Development, IHE-Delft, Belanda tahun 1977, yang meniti karir di Departemen Pekerjaan Umum (PU) sejak tahun 1970 ini mengatakan akan melanjutkan programnya sebelumnya. Yakni menyelesaikan jalan tol trans-Jawa, serta pemancangan dimulainya pembangunan Jembatan Selat Sunda, membangun 500 ribu hektare jaringan irigasi baru di luar Pulau Jawa, serta merehabilitasi 1,37 juta ha jaringan irigasi di 13 provinsi andalan pangan dalam upaya mempertahankan swasembada pangan. Meningkatkan penyediaan air minum hingga mampu melayani 67 persen penduduk perkotaan dan 17 persen penduduk pedesaan, serta meningkatkan pelayanan sanitasi sistem terpusat, peningkatan sistem drainase di 100 kota, serta pengolahan sampah di 240 kota.



Menkes – Endang Rahayu Sedyaningsih

DR. dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH terpilih menjadi Menteri Kesehatan

dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Terpilihnya wanita kelahiran Jakarta, 1 Februari 1955 yang sebelumnya bertugas sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Farmasi, Badan Penelitian dan Pengembangan Depkes, ini agak kontroversial. Lulusan Fakultas Kedokteran UI tahun 1979 dan peraih gelar magister dan doktor dari Harvard School of Public Health ini dianggap fenomenal karena dirinya dikaitkan dengan isu NAMRU, langkahnya membawa virus H5N1 ke Vietnam, dan pemutasian dirinya dari peneliti utama menjadi peneliti biasa oleh mantan atasannya Menkes Siti Fadilah Supari. Untuk program 100 hari Depkes, ia mengaku telah mempersiapkan sejumlah program kerja sesuai arahan Presiden SBY, yakni membuat *good governance* di Depkes dan melanjutkan program kesehatan prorakyat, seperti Jamkesmas, meningkatkan upaya kesehatan berbasis komunitas, seperti posyandu dan puskesmas, serta menyeimbangkan promosi preventif, kuratif, dan rehabilitatif.



Mendiknas – Mohammad Nuh

Mantan Menkominfo pada KIB I (2007-2009) Prof. Dr. Ir. KH. Mohammad Nuh, DEA dipercaya Presiden SBY menjadi Menteri Pendidikan Nasional pada KIB II menggantikan Bambang Sudibyo. Soal program, untuk lima tahun mendatang, pria kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 17 Juni 1959, ini mengatakan Depdiknas menetapkan tiga prioritas pendidikan nasional, yakni memperluas akses masyarakat ke pendidikan bermutu, pendidikan terjangkau, dan sekolah berkualitas. Mengawali tugasnya di Depdiknas, ada satu gagasan baru mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, ini yakni penghapusan tes masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Gagasan ini menurutnya untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antara satu daerah dengan daerah lain.



Menag – Suryadharma Ali

Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2007-2012 yang juga mantan Menkop dan UKM pada KIB I, Drs. Suryadharma Ali Msi kembali diper-

caya pada KIB II menjadi Menteri Agama menggantikan Muh. Maf-tuh Basyuni SH. Pria kelahiran Jakarta, 19 September 1956 yang sempat mengundurkan diri sebagai menteri karena terpilih menjadi anggota DPR (2009-2014), ini dalam program kerja seratus harinya memprioritaskan perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan ibadah haji. Juga akan meningkatkan kualitas hubungan antar-umat beragama dan peningkatan kualitas pendidikan agama, dan lainnya.



Menhut – Zulkifli Hasan

Politisi Partai PAN, H. Zulkifli Hasan SE. MM, menjabat sebagai Menteri Kehutanan menggantikan M S Kaban. Dalam program 100 hari kerjanya, ia mengatakan akan segera membuat konsep untuk menyelesaikan tumpang tindih penggunaan lahan kehutanan dan peruntukan lain. Karena menurut pria kelahiran Lampung 17 Mei 1962 ini, tumpang tindih peraturan kehutanan merupakan penghambat pelaksanaan pembangunan, terutama infrastruktur. Di samping itu, ia juga akan memprioritaskan tata ruang dan peman-tapan kawasan hutan sebagai program utama yang termasuk dalam evaluasi peraturan yang tumpang-tindih.



Menbudpar – Jero Wacik

Sempat mengundurkan diri dari Menteri Kebudayaan dan P a r i w i s a t a (2004-2009) karena terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Partai Demokrat, Jero Wacik, kelahiran Bali 24 April 1949 ini kembali dipercaya presiden pada KIB II dengan kedudukan yang sama. Pada kabinet sebelumnya, ia dinilai berhasil memimpin departemen itu, terbukti citra Indonesia tetap baik di mata dunia meskipun sering dilanda banyak kejadian, seperti peristiwa gempa dan pengeboman. Untuk program seratus hari, ia sedang mempersiapkan peluncuran buku Sejarah



Indonesia yang ditulisnya lima tahun lalu, di samping mempersiapkan program bantuan untuk seniman, peningkatan produksi industri kreatif dan sosialisasi UU perfilman.

Menkominfo – Tifatul Sembiring

Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring diangkat menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika menggantikan M u h a m m a d Nuh. Sebagai lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer dan berpengalaman di bidangnya, pria kelahiran Bukittinggi, Sumatera Barat, 28 September 1961, ini menyatakan ada beberapa hal yang ingin diselesaikannya dalam sektor komunikasi, seperti masalah perbedaan kemudahan akses di kota besar dan daerah terpencil yang sangat besar. Kemudian, kurangnya informasi edukatif dari media komunikasi Tanah Air. Sebagai bagian dari programnya, dia menargetkan pada awal tahun 2010 akan mewujudkan 100 desa komputer. Secara berkesinambungan akan mencapai 10.000 desa komputer sampai dengan 2014. Serta pengembangan kabel optik dan program Palapa Ring.



Mensos – Salim Assegaf Al-Jufri

Mantan Dubes Indonesia untuk Arab Saudi, Salim Assegaf Al-Jufri diangkat menjadi Menteri Sosial menggantikan Bachtiar Cham-syah. Pria kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, 17 Juli 1954, lulusan S3 dari Universitas Madinah, Arab Saudi tahun 1986, ini merumuskan target program 100 hari kerjanya berupa mewujudkan keluarga harapan, anak-anak dan lansia yang terlantar.



Meristek – Suharna Surapranata

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS yang juga merupakan salah satu pendiri Partai Keadilan, Suharna Surapranata terpilih menjadi Menteri Riset dan Teknologi menggantikan Kusmayanto Kadiman.



Lulusan S1 di FMIPA UI dan S2 di Teknik Fisika ITB, kelahiran Bandung, 13 Desember 1955, ini dalam program kerja 100 harinya menegaskan akan membenahi kelembagaan penelitian dan pengembangan (litbang) di Indonesia untuk mengatasi tumpang tindih dan inefisiensi di lembaga riset. Riset menurutnya akan lebih ditekankan pada sektor pangan untuk mengembangkan varietas unggul. Di bidang energi, akan dikembangkan aplikasi energi terbarukan, dan pengembangan sektor transportasi untuk memajukan industri strategis.

Menkop dan UKM – Syarifuddin Hasan

Ia terpilih menjadi Menteri Negara Koperasi dan UKM menggantikan Suryadarma Ali. Prioritas dalam 100 hari kerja pertamanya adalah meningkatkan kemandirian usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan cara meningkatkan anggaran dan mempermudah penyaluran kredit untuk rakyat (KUR), kemudian menekan suku bunga kredit untuk UMKM sehingga lebih meringankan.



Menneg LH – Gusti Mohammad Hatta

Mantan Pembantu Rektor I Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Gusti Mohammad Hatta terpilih menjadi Menteri Negara Lingkungan Hidup menggantikan Rachmat Witoelar. Doktor Bidang Silviculture dari Universitas Wageningen, Belanda, kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 1 September 1952 ini pada program 100 harinya, memfokuskan pada penanganan kebakaran lahan dan perbaikan daerah aliran sungai.



Menneg PP dan PA – Linda Amalia Sari

Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) periode 2004-2009 dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Kesehatan Payudara, serta Dewan Pembina Yayasan Onkologi Anak Indonesia, Linda Amalia Sari Agum Gumelar terpilih menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggantikan Meutia Hatta. Soal program kerja, istri mantan Menteri

Perhubungan Agum Gumelar kelahiran 15 November 1951, ini memberikan prioritas bagi pemberdayaan wanita di pedesaan mengatasi tantangan ke depan akan semakin berat bagi peningkatan peran perempuan, khususnya perempuan pedesaan.



Menneg PAN dan Reformasi Birokrasi – Evert Ernest Mangindaan

Mantan Gubernur Sulawesi Utara (1995-2000) Evert Ernest Mangindaan kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, 5 Januari 1943 menjadi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggantikan Taufik Effendi. Mantan Pangdam VIII/Trikora yang juga mantan anggota DPR 2004-2009 dari Partai Demokrat dalam program kerja seratus harinya akan menuntaskan konsep reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.



Menneg PPDT – Helmy Faishal Zaini

Mantan anggota DPR 2004-2009 dari PKB, dan sarjana Teknik dari Universitas Darul Ulum Jombang dan Magister Universitas Paramadina Jakarta, Helmy Faishal Zaini, ditempatkan sebagai Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal menggantikan Lukman Edhi. Helmy kelahiran Cirebon, Jawa Barat, 1 Agustus 1972 yang merupakan menteri termuda di antara anggota KIB II, ini membuat program kerja 100 harinya dengan rencana menginventaris daerah-daerah tertinggal dengan cara mengunjungi langsung ke daerah.



Menneg PP Nasional/ Kepala Bappenas – Armida S. Alisjahbana

Mantan Guru Besar dan Pembantu Dekan bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (UNPAD), Armida S. Alisjahbana terpilih menjadi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

menggantikan Paskah Suzetta.

Mengenai program kerja, putri mantan Menlu Mochtar Kusumaatmadja kelahiran Bandung, Jawa Barat, 16 Agustus 1960 yang meraih gelar Master of Arts in Economics dari Universitas Northwestern, serta Doctor of Philosophy in Economics dari Universitas Washington, AS, ini mengatakan akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disesuaikan dengan beberapa isu besar masa kini dan mendatang.



Menneg BUMN – Mustafa Abubakar

Mantan Dirut Bulog dan juga mantan Plt Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Dr.Ir. Mustafa Abubakar didaulat menjabat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara menggantikan Sofyan Djalil. Untuk program 100 hari, pria kelahiran Pidie, Nanggroe Aceh Darussalam, 15 Oktober 1949, ini merujuk pada 14 prioritas agenda berkelanjutan Kementerian Negara BUMN yang lama, yakni meliputi reformasi birokrasi, reformasi kepemimpinan BUMN, peningkatan koordinasi antar-lembaga, program *right sizing*, restrukturisasi dan penyelesaian BUMN rugi, program privatisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyelesaian Rekening Dana Investasi (RDI)/SLA, penyelesaian Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYDS), penataan sistem remunerasi, penyesuaian sistem akuntansi, penetapan dividen, pembentukan BUMN Fund, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.



Menpera – Suharso Manoarfa

Ia dipercaya Presiden SBY menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat menggantikan Muhammad Yusuf Asy'ari. Pria kelahiran Mataran, Nusa Tenggara Barat, 31 Oktober 1954 ini adalah anggota DPR periode 2004-2009 dan terpilih kembali untuk periode 2009-2014 dari Partai



Persatuan Pembangunan (PPP). Mengenai program, ia mengatakan akan melakukan pemetaan pasar, mencakup pasokan dan permintaan rumah, serta mengefektifkan daya serap pasar.

Mennegpora – Andi Mallarangeng

Juru bicara Presiden SBY Andi Alfian Mallarangeng terpilih menjadi Menteri Negara Pemuda dan Olahraga menggantikan Adyaksa Dault. Peraih gelar Doctor of Philosophy di bidang ilmu politik dari Northern Illinois University (NIU), Illinois, AS, kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan, 14 Maret 1963, ini dalam program 100 harinya akan merevitalisasi organisasi kepemudaan (OKP), Pramuka, dan OSIS (organisasi siswa intra sekolah). Kepramukaan yang sebelumnya jarang disentuh oleh kementerian, menurutnya penting direvitalisasi, diolah jadi seksi bagi anak muda yang dapat menumbuhkan sportivitas, nasionalisme, dan kepekaan sosial.



Kepala BIN – Sutanto

Mantan Kapolri, Jenderal Polisi (Purn) Drs. Sutanto, ditunjuk Presiden SBY menjabat Kepala Badan Intelijen Negara menggantikan Syamsir Siregar. Pria kelahiran Comal, Pematang, Jawa Tengah, 30 September 1950, ini sebelumnya adalah Kepala Badan Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Narkotika Nasional. Lulusan Akabri tahun 1973, ini juga pernah menjadi ajudan Presiden Soeharto (1995-1998), Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatra Utara (tahun 2000), dan Kapolda Jawa Timur (2000-2002). Soal karir, diringkusnya buronan terorisme asal Malaysia, Dr. Azahari, pengungkapan identitas para pelaku Bom Bali 2005, penyelesaian kasus penyuapan pada kasus pembobolan Bank BNI dengan tersangka Brigjen Ismoko, Kombes Irman Santosa dan Komisaris Jenderal Suyitno Landung, menambah popularitas Sutanto yang sebelumnya telah sukses dalam pencanangan pemberantasan perjudian pada 100 hari pertama dirinya menjabat Kapolri.



Kepala BKPM – Gita Irawan Wiryawan

Sempat dinominasikan di beberapa posisi, Gita Irawan Wiryawan akhirnya

ditempatkan Presiden SBY sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggantikan Muhamad Lutfi. Pria kelahiran Jakarta, 21 September 1965 lulusan Harvard University ini adalah seorang pengusaha. Ia pernah menjabat Presdir JPMorgan Indonesia. Selain itu ia juga sebagai bankir investasi dan memegang sejumlah jabatan kunci di bank investasi terkemuka dunia, seperti Goldman Sach dan JP Morgan. Terakhir, sebelum diangkat menjadi Kepala BKPM,



ia adalah penasehat senior JP Morgan untuk Asia Tenggara, Komisaris Pertamina, dan anggota Dewan Direktur Independen di Telekom Malaysia International, dan sebagai penasehat pemerintah dan swasta di sejumlah negara Asia terkait program restrukturisasi perusahaan serta strategi penjualan.

Ketua UKP4 – Kuntoro Mangkusubroto

Untuk memperkuat lembaga kepresidenan sekaligus memperlancar pelaksanaan program KIB II, Kuntoro Mangkusubroto kelahiran Purwokerto, Jawa Tengah, 14 Maret 1947 ditunjuk sebagai Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). UKP4 ini dimaksudkan

sebagai mata dan telinga Presiden, termasuk perpanjangan tangan Presiden, untuk menganalisis sejauh mana program Presiden berjalan dan permasalahan apa yang menghambat. UKP4 menjalankan fungsi lebih sebagai lembaga fungsional daripada struktural. Sehubungan dengan itu, menurut Kuntoro Mangkusubroto, tugas pertama yang harus dilaksanakannya adalah mengawasi pelaksanaan program 100 hari pertama para menteri.



Lima Wakil Menteri

Rabu, 11 November 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik lima Wakil Menteri, di Istana Negara, Jakarta. Yaitu:

Wakil Menteri Pertanian – Bayu Krisnamurthi

Ia diangkat Presiden SBY menjadi Wakil Menteri Pertanian mendampingi Mentan Ir. H. Suswono, MMA. Pria kelahiran Manado berusia 43 tahun ini sebelumnya menjabat Deputy Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan. Doktor bidang ekonomi pertanian dari IPB (1998) ini juga aktif di Komnas Flu Burung sebagai ketua pelaksana harian, serta menjabat Ketua

Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia. Di samping itu, dia juga tercatat sebagai salah satu pengajar di Fakultas Pertanian IPB.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Hermanto Dardak

Ia diangkat menjadi Wakil Menteri mendampingi Menteri PU Ir. Djoko Kirmanto, Dipl. HE. Hermanto sebelumnya menjabat Dirjen Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum.

Wakil Menteri Perhubungan – Bambang Susantono

Ia diangkat menjadi Wakil Menteri

Perhubungan mendampingi Menhub Laksamana Madya (Purn) Freddy Numbery. Bambang yang sebelumnya menjabat sebagai Deputy Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, ini adalah Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Pria lulusan teknik sipil ITB, program pascasarjana di Universitas California Berkeley, program MCP untuk perencanaan kota dan wilayah, MSCE untuk teknik transportasi, serta doctor of philosophy (PhD) di bidang perencanaan infrastruktur, ini juga menjadi anggota Dewan East Asia Society of Transportation Studies EASTS yang berpusat di Tokyo, Jepang, serta anggota Dewan SouthNorth Foundation yang berpusat di Johannesburg, Afrika Selatan. Bambang juga seorang pengajar dan membimbing tesis di Program Pascasarjana UI. Ia juga produktif menulis buku dan artikel di bidang transportasi-infrastruktur. Tidak kurang dari 17 buku berbahasa Indonesia dan Inggris telah dilahirkannya.

Wakil Menteri Perdagangan – Mahendra Siregar

Ia diangkat menjadi Wakil Menteri Perdagangan mendampingi Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu. Sebelumnya, Mahendra adalah Deputy Menko Perekonomian Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional.

Wakil Menteri Perindustrian – Alex Retraubun

Pria yang sebelumnya menjabat Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan ini akan mendampingi Menperin MS Hidayat.

Wawancara Syaykh AS Panji Gumilang Seni Manajemen Kebersa

Hal yang paling terkesan dalam pengelolaan (manajemen) Al-Zaytun adalah terbinanya kebersamaan yang tidak putus, *sustainable*, tidak temporer. Segala sesuatu yang telah dan akan dilakukan, selalu dipikirkan bersama, dibuat bersama dan dikerjasamakan. Artinya, menetapkan sesuatu, sekalipun ide dari seseorang tapi dikerjasamakan, dijadikan ide bersama. Itulah seni manajemen Al-Zaytun.

Sebab membuat satu ide dari seseorang untuk dimiliki bersama, itu memerlukan seni. Seni inilah yang terus kita jalankan jangan sampai putus. Kalau ide seorang, itu bisa ditentang, kalau belum disosialisasikan dan diadaptasikan,” kata Syaykh al-Zaytun Abdussalam Panji Gumilang.

Al-Zaytun kini telah melewati dasawarsa pertama (1999-2009) dan tengah memasuki dasawarsa kedua (2009-2019). Sehubungan dengan itu, Wartawan *TokohIndonesia.com* dan *Majalah Berita Indonesia*, mewawancarai Syaykh Al-Zaytun Abdussalam Panji Gumilang, di Wisma Tamu Al-Islah, Al-Zaytun, 21 September 2009.

Wawancara berlangsung hampir dua setengah jam, mulai dari pencapaian target dalam satu dasawarsa, tantangan yang dihadapi dan bagaimana Al-Zaytun ke depan, setidaknya sepuluh tahun ke depan? Juga tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pembangunan demokrasi, pertahanan dan keamanan, pendidikan nasional, ketahanan pangan nasional, dan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Semua percakapan ini kami bagi dalam enam topik.

Topik tentang masalah pertahanan dan keamanan telah kami terbitkan pada Rubrik Wawancara pada Edisi 71 dengan judul “Teror Bom, itu Kejahatan Kemanusiaan.” Pada edisi ini kami mengangkat topik bagaimana Al-Zaytun melewati dasawarsa pertama (27 Agustus 1999 - 2009) dan memasuki dasawarsa kedua (2009-2019). Mengenai pencapaian target,

tidak mudah mengukurnya. Tidak semudah mengukur berapa kilometer yang telah dicapai dan berapa kubik yang sudah terisi.

Sebab, Al-Zaytun adalah pusat pendidikan dan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian. Hal itu bukan sekadar motto tapi credo. Sebuah cita-cita yang sifatnya membangun rohani, karakter dan sikap mental yang tidak mengenal batas waktu. Berlaku abadi, selaras dengan manusia itu sendiri. Selaras dengan cita-cita bernegara, selaras juga dengan cita-cita beragama. Credo itu tidak bisa diukur dalam 10 tahun.

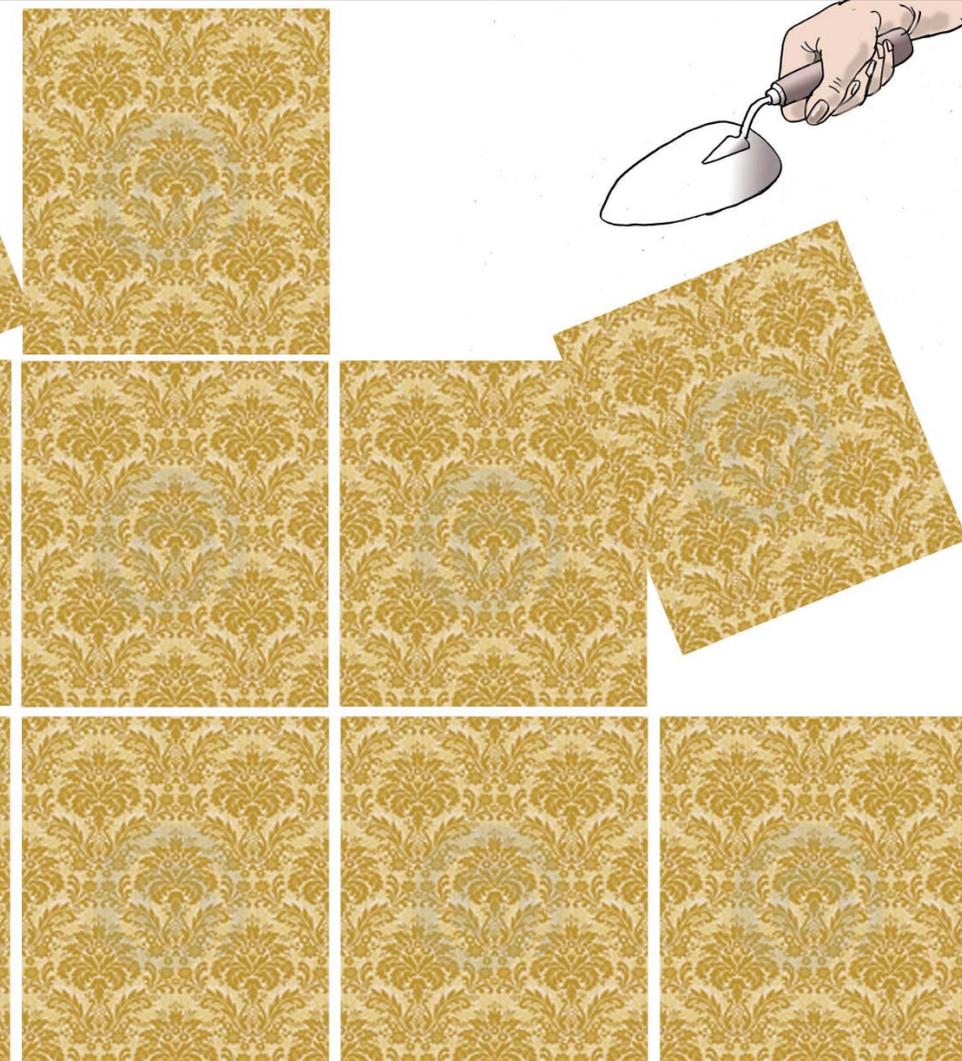
Hal yang paling terkesan adalah seni manajemen kebersamaan yang tidak putus, *sustainable*. Segala sesuatu yang telah dan akan dilakukan, selalu dipikirkan bersama, dibuat bersama dan dikerjasamakan. Artinya menetapkan sesuatu, sekalipun ide dari seseorang tapi dikerjasamakan, dijadikan ide bersama. “Sebab membuat satu ide dari seseorang untuk dimiliki bersama, itu memerlukan seni. Seni inilah yang terus kita jalankan jangan sampai putus. Kalau ide seorang, itu bisa ditentang, kalau belum disosialisasikan dan diadaptasikan,” kata Syaykh Al-Zaytun Abdussalam Panji Gumilang.

Sementara mengenai cita-cita ke depan, Syaykh Al-Zaytun mengemukakan tujuh hal yang harus dimiliki kader produk pendidikan Indonesia untuk menjawab tantangan zaman dalam abad yang seperti sekarang ini. Berikut ini petikan wawancara dengan Syaykh Al-Zaytun: **Barangkali walaupun sudah sering kami dengar, perlu penyegaran juga, karena setiap**



saat juga ada hal-hal baru dalam pemikiran Syaykh tentang Al-Zaytun, walaupun sejak awal sudah ada landasan-landasannya. Begitu juga tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertanyaan pertama, Al-Zaytun sudah satu dasawarsa, sudah cukup waktu untuk melihat, sudah ada yang ditoleh ke belakang untuk menentukan langkah ke depan. Dari perencanaan semula, apakah dalam satu dasawarsa pertama (1999-2009), Al-Zaytun mencapai target?

maian yang *Sustainable*



Maksudnya pencapaian target Al-Zaytun setelah berjalan 10 tahun. Mengukur target itu, apalagi target yang didasari oleh sebuah credo, bukan sekadar motto tapi credo, menegakkan sebuah ide pendidikan dan pembangunan budaya toleransi dan perdamaian, itu tidak bisa kita ukur dalam 10 tahun. Dan mengukurnya juga sangat relatif sekali karena tidak ada ruangan yang pasti dan tidak ada jarak yang pasti. Jadi mengukurnya tidak semudah berapa kilometer yang telah dicapai dan berapa kubik yang sudah terisi.

Karena ini sebuah cita-cita yang

sifatnya membangun rohani dan membangun karakter, sikap mental. Dan tidak ada batas waktu. Maka credo yang kita buat itu sebuah credo tanpa batas waktu. Akan berlaku abadi, karena pendidikan dan budaya toleransi serta perdamaian itu selaras dengan manusia itu sendiri. Selagi ada manusia, itu ada. Selaras juga dengan cita-cita bernegara, selaras juga dengan cita-cita beragama. Nah, entah terlalu besar yang dicita-citakan atau bagaimana, sehingga mengukurnya relatif sekali. Kalau 10 tahun itu dihitung dan ditengok seperti ini belum ada apa-apa hasilnya. Tapi, tadi sebuah credo yang

merupakan sebuah cita-cita besar, paling tidak seperti kita menanam tanaman. Ini sering kita katakan. Walaupun hasil buah yang kita cita-citakan itu belum tampak, belum ada, tapi untuk sekadar berteduh, kita sudah dapat. Paling tidak membagi oksigen, menjernihkan alam sekitar. Kemudian membuang polutan-polutan, itu sudah terasa. Nah ini susah didefinisikan.

Ya, sudah terdefiniskan sendiri?
Jadi, kalau itu yang ditanya susah didefinisikan.

Syaykh bilang sebuah credo, sulit diukur, karena itu soal membangun karakter, dan mental dengan nilai-nilai toleransi dan perdamaian. Tapi tempat berteduh untuk posisi itu sudah ada?

Sudah terasalah.

Sudah terasa. Jadi pengaruhnya mungkin sudah terasa oleh lingkungan, tidak terbatas di lingkungan Indramayu?

Akibat daripada kita membangun credo tadi. Dan jika credo tadi dijabarkan, credo itu memang manusiawi, sangat religi dan sangat nasionalistik juga. Ini juga kami yakin pasti ada akibat positifnya, pasti ada. Mengapa? Sebab tidak terlalu banyak institusi yang mengedepankan itu sebagai kredonya. Mungkin ada yang mencita-citakan bahasanya yang Islamikah, atau yang agamiskah.

Di kami ini (Al-Zaytun) arahnya hanya pada sebuah arena pendidikan yang mendidik manusia dari segala lapisan untuk tertanam budaya yang kita sebut toleransi dan damai. Kami yakin itu ada, paling tidak dikesankan oleh lingkungan tidak hanya di Indramayu tapi di lingkungan Indonesia maupun banyak tempat-tempat yang lain. Karena ide ini (budaya toleransi dan perdamaian) selamanya diperlukan oleh manusia. Kemudian praktek dari ide itulah yang bisa mengantarkan manusia punya pemikiran yang terbuka, suka berdialog, baik itu dialog verbal maupun dialog karya.

Satu di antaranya, dialog karya sudah sering kita lakukan, setiap saat, dan ini

Sebuah kredo yang merupakan sebuah cita-cita besar, paling tidak seperti kita menanam tanaman. Ini sering kita katakan. Walaupun hasil buah yang kita cita-citakan itu belum tampak, belum ada, tapi untuk sekadar berteduh, kita sudah dapat. Paling tidak membagi oksigen, menjernihkan alam sekitar. Kemudian membuang polutan-polutan, itu sudah terasa.



Wawancara menjelang Dasawarsa kedua Al-Zaytun, wawancara Syaykh Al-Zaytun DR. AS Panji Gumil sekaligus Pemimpin Redaksi Majalah Berita Indonesia, Drs. Ch. Robin Simanulang didampingi kru, Sen

juga sudah berakibat. Beberapa bulan lalu, saya mendengar berita dalam sebuah pertemuan tatkala anggota DPRD Indramayu berkunjung ke DPRD Wonosobo. Dalam dialog, saling sambut-menyambut, Ketua DPRD Indramayu memaparkan, Indramayu terkenal sebagai kota mangga, kota udang, dan kota minyak.

Lalu, Ketua DPRD Wonosobo menyambut bahwa Indramayu yang adanya di Pantura menjadi sangat terkenal karena hal-hal itu. Tapi ada yang lebih dari itu, yaitu adanya pesantren Al-Zaytun di Indramayu, yang mampu memberi inspirasi pembangunan kepada daerah-daerah, termasuk kami yang sudah datang ke Al-Zaytun. Kami terinspirasi, kemudian kami lakukan walaupun belum seperti di Al-Zaytun karena keterbatasan dana. Kita tidak paham apa yang mereka lakukan sebagaimana dikemukakan Ketua DPRD Wonosobo itu. Mereka institusi kelembagaan daerah, maka kami rasa bukan membangun pendidikan tapi membangun bagaimana cara membangun.

Nah, itu contoh kecil. Justru disampaikan pada anggota DPRD Indramayu yang sedang berkunjung ke Wonosobo. Saat DPRD Indramayu memberikan penjelasan bahwa

Indramayu terkenal karena mangga, kota minyak. Tapi justru Ketua DPRD Wonosobo mengatakan, ada yang lebih dari itu. Itu sebuah jawaban dari pertanyaan Anda yang dijawab oleh orang Wonosobo. Bukan saya yang menjawab, saya hanya menyampaikan.

Hal itu suatu respon, karena barangkali pengaruhnya sudah terasa sampai jauh di luar lingkungan Indramayu?

Satu indikator, indikasi bahwa itu respon masyarakat. Salah satu, dari sebuah institusi DPRD. Itu hanya salah satu, karena masih banyak. Kalau dipanjangkan, masih banyak.

Dalam 10 tahun, Syaykh sebagai pendiri sekaligus pemimpin langsung mengelola Al-Zaytun ini dengan manajemennya yang sedemikian rupa. Dengan cara pengelolaan yang seperti yang sekarang ini. Tapi tentu ada dinamika yang bisa berpengaruh juga. Apa yang paling berkesan dari perjalanan 10 tahun dalam dinamika pengelolannya sehingga memengaruhi kebijakan Syaykh?

Itu kebersamaan yang tidak putus. Jadi adanya kebersamaan yang tidak putus



ang dengan Pemimpin Umum Tokoh Indonesia
in 21 September 2009 di Gedung Al-Islah Al-Zaytun.

dan tidak temporer, *sustainable*.

Bisa diperjelas?

Keberadaan sesuatu yang akan kita lakukan itu selalu dipikirkan bersama, dibuat bersama dan dikerjasamakan. Karena itu, sebuah cita-cita awal membentuk Al-Zaytun, ke depan itu supaya punya kader yang seperti itu, ya kita awali. Artinya, menetapkan sesuatu, sekalipun ide dari seseorang tapi dikerjasamakan, dijadikan ide bersama. Sebab membuat satu ide dari seseorang untuk dimiliki bersama, itu memerlukan seni. Seni inilah yang terus kita jalankan jangan sampai putus. Kalau ide seorang, itu bisa ditentang, kalau belum disosialisasikan dan diadaptasikan.

Nah, yang kita lakukan, itu yang namanya kebersamaan yang tidak terputus. Segala sesuatu, yang besar, yang kecil, kita sosialisasikan dan dimiliki bersama, menjadi bersama. Kita lebur menjadi satu sehingga kita terikat dengan ide tersebut dalam pelaksanaannya menjadi fakta sosial kecil yang mengikat.

Yang lain, selain itu?

Intinya itu. Sehingga apapun yang namanya sulit, karena sudah bersama menjadi ringan. Yang sesuatu ringan karena bersama tidak menjadi hilang.

Nah itu yang mengesankan.

Kemudian, dalam 10 tahun, tidak semua orang atau ada segelintir orang juga yang selalu tidak sependapat atau malah menyebar hal-hal yang bersifat negatif tentang Al-Zaytun. Hikmah apa yang bisa didapat dari situ?

Hikmahnya besar sekali. Sehingga kita bisa membuat suatu benteng rohani. Jadi benteng rohani itu yang penting. Jadi dari benteng rohani ini keluarlah metoda berbuat. Artinya selalu respon terhadap berbagai macam tanggapan. Tapi metoda itu ketemu, kita tidak masuk kepada sikap reaksioner.

Tapi kita lebih dekat kepada pendalaman ajaran Ilahi yang berkaitan dengan isu-isu yang keluar itu. Sisi mana ajaran Ilahi yang harus kita dalam sehingga semua orang itu bisa mengerti. Nah, itu hikmah yang kita dapat. Sehingga terjadilah setiap ada sesuatu itu tidak jawaban verbal namun yang kita kedepankan adalah jawaban amal atau karya.

Dan terus kita arahkan kepada bukan sekadar baik, tetapi terbaik dari apa yang diisukan, perbuatan terbaik dari apa yang diisukan. Ya, seperti tadi hanya sekitar itu hikmahnya untuk kita, menebalkan moralitas kita.

Ada ketahanan iman dan ketahanan moral?

Ketahanan moral. Sehingga kita terus menggali ajaran Ilahi. Sehingga keluarlah ajaran Ilahi itu untuk semua. Itu dari perenungan itu.

Bagaimana pandangan Syaikh terhadap orang-orang yang memberi tantangan itu?

Tantangan itu selalu ada, ya tanggapannya seperti tadi. Nggak usah individual. Nggak usah.

Inti daripada tantangan itulah yang kita sortir. Sehingga kita punya ketahanan moral tadi. Terus didasari pada pendekatan ajaran Ilahi yang lebih detail.

Lalu dalam 10 tahun berjalan ini sudah diletakkan dasar-dasar pengelolaan Al-Zaytun, baik dalam pembangunan fisiknya maupun dalam penanaman atau proses pembelajaran tentang credo itu tadi. Penanaman nilai-nilai, baik kepada santri maupun lingkungannya. Kemudian, dalam rangka masa depan, paling tidak (terutama) dalam sepuluh tahun ke depan, kebijakan-kebijakan apa yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas

pendidikan di Al-Zaytun?

Sekarang kita cermati zaman. Zaman sekarang ini atau abad millenium ini hingga ke depan. Kini dunia memerlukan kader, termasuk tentunya Indonesia, termasuk tentunya kita-kita, Al-Zaytun. Nah, kader-kader itu mestinya diciptakan dari pendidikan.

Cita-cita ke depan itu, kita catat ada tujuh hal supaya kita nanti memiliki kader. Kita harus ikut mempersiapkan tampilnya generasi produk pendidikan Indonesia yang memenuhi ciri-ciri abad ini. Minimal bangsa Indonesia untuk menjawab tantangan zaman dalam abad yang seperti sekarang ini. Dan ini sudah menjadi ciri tantangan dunia juga.

Pertama, ke depan kita harus mempersiapkan kader yang bisa jadi pemikir sistem-sistem, dan berkeupayaan menggabungkan antara isu, kejadian, dan data secara utuh dan terpadu. Pemikir sistem-sistem, bukan hanya satu sistem. Kemudian mampu menggabungkan semua ini. Mereka mampu menggabungkan antara isu yang terjadi, kemudian kejadian yang nyata, kemudian data-datanya secara terpadu.

Jadi jangan sampai kader itu hanya mampu berpikir satu sistem kemudian tidak mampu menanggapi satu isu, tidak mampu membuat data, tidak mampu mensinkronkan semua antara isu, kejadian, data secara terpadu. Kalau itu yang terjadi, ya sudah gagal lagi nanti. Itu yang pertama, ciri-cirinya yang kita kehendaki. Dan, ini nanti kita jabarkan juga di dalam kurikulum pendidikan.

Kemudian, kedua, kader yang kita kehendaki ini nanti menjadi kader agen perubahan. Sebagai agen perubahan, yang berkemampuan mengembangkan pemahaman, dan memiliki kompetensi tinggi dalam menciptakan dan memenej perubahan bagi kehidupan bangsa agar dapat bertahan hidup.

Agen perubahan yang berkemampuan mengembangkan pemahaman, tentunya memiliki kompetensi tinggi dalam menciptakan dan memenej perubahan berbagai kehidupan bangsa agar bangsa dan negara ini tetap hidup. Agen itu diarahkan kepada Indonesia tetap hidup dan sebaliknya.

Sesudah itu ciri ketiga, generasi pembaharu. Sebagai pembaharu dan berani mengambil risiko, terbuka terhadap perspektif yang luas dan kemungkinan-kemungkinan yang esensial dalam menentukan tren dan menggerakkan pilihan.

Jadi yang saya maksudkan dengan generasi pembaharu ini, adalah kader yang berani mengambil risiko. Banyak sekali sekarang itu pembaharu, tapi kurang berani mengambil risiko. Tapi ada berani mengambil risiko tetapi tidak

Kampus Al-Zaytun mendidik kader yang bisa jadi pemikir, agen perubahan, pembaharu, mampu memberikan pelayanan kepada orang lain, mampu mengoordinasikan banyak hal dalam waktu yang sama dan dapat bekerja bersama dengan orang lain, mampu membantu orang lain, dan mampu membangun visi bangsa.

memiliki sikap pembaharu. Sehingga terjadi banyak kemuskilan dalam kehidupan bernegara. Nah, kader ke depan, pembaharu, berani mengambil risiko, dan terbuka terhadap perspektif ke depan. Juga mampu membaca dan membuat tren-tren, serta mampu menggerakkan pilihan.

Ciri keempat, kader yang mampu memberikan pelayanan kepada orang lain. Berkemampuan dan berkepercayaan untuk meningkatkan pelayanan kepada yang lain, berpendekatan holistik untuk bekerja, memiliki *a sense of community* dan berkemampuan membuat keputusan bersama.

Jadi, kalau sudah menjadi pemikir, lantas tidak mau menjadi pelayan pada orang lain, ini juga lemah. Sehingga adanya hanya di kelompok elit, menara gading yang susah di tempuh. Jadi harus mampu memberi pelayanan.

Selanjutnya, kelima adalah kader yang berkeupayaan dan berkemampuan untuk dapat mengoordinasikan banyak hal di waktu yang sama dan dapat bekerja berbarengan dengan orang lain. Walaupun hal ini terkesan susah, tapi harus dikader, harus dididik. Mengoordinasikan banyak hal dalam waktu yang sama dan mampu menciptakan kerjasama. Jadi istilahnya cekatan.

Problem banyak hari ini, misalnya, situ Gintung pecah, lalu di sana kelaparan ada lagi, terus gunung meletus lagi, guncangan. Semua diselesaikan dalam satu waktu dan kerjasama, tidak sendiri-sendiri. Nah, ciri itu juga nanti yang kita harapkan ke depan.

Kemudian, keenam, mampu membantu orang lain untuk terus belajar. Berkeupayaan tampil sebagai pembantu orang lain untuk belajar, menciptakan banyak pendekatan yang beraneka, sebagai instruktur, juru latih, dan penasihat yang bijak (mentor). Menyemangati, membantu untuk terus belajar. Nah sehingga dirinya menjadi juru latih atau bahasa Indonesia, pelatih. Kalau bahasa Melayunya juru latih atau menjadi penasihat-penasihat yang bagus, menjadi mentor.

Yang terakhir, ketujuh, kita inginkan kader itu mampu membangun visi bangsa, mengatur negara. Berkeupayaan membantu membangun visi bangsa dan negaranya serta memberi inspirasi bagi segenap lapisan masyarakat, yang diposisikan sebagai kolega maupun pelanggan.

Memberi inspirasi kepada masyarakat dan masyarakat itu diposisikan sebagai kolega, bukan bawahan-atasan tapi kolega. Kalau dalam perdagangan itu sebagai pelanggan. Dihormati,



Kampus Al-Zaytun mendidik kader yang kelak kelak yang bhineka tunggal ika

pelanggan itu harus selalu dihormati, tidak boleh tersentuh sedikitpun supaya terus.

Nah, itu ciri ke depan yang kita harapkan dan tentunya ini dijabarkan dalam tiap kurikulum. Baik kurikulum yang pencapaiannya itu bisa diukur dengan nilai-nilai tertentu secara akademik. Ataupun kurikulum yang nilainya tadi bukan nilai umum, yang mengukurnya sangat panjang masanya.

Tapi kita yakin, karena kita sudah 'terjerumus' masuk dalam arena pendidikan, kita tahu seluk-beluk arena pendidikan. Jadi kita yakin hal itu bisa dilakukan. Nah, dunia ini isinya banyak orang, banyak ide dan masing-masing selalu mendagangkan dan membeli.

Sangat kaya. Tapi bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kurikulum?

Untuk kurikulum tidak terlalu susah. Kalau kurikulum akademik tidak terlalu susah. Yang paling susah itu di luar akademik. Maka dengan sistem *boarding school* seperti sekarang ini, inilah yang kita harapkan. Di luar kelas masih ada kelas lagi, dan kelas alam terbuka.

Nah, itulah yang harus dididik dan memerlukan waktu yang panjang. Tapi sepanjang-panjangnya pendidikan itu cuma 20 tahun, kalau ditempuh terus-menerus. Lebih banyak hidup setelah 20 tahun itu. 20 tahun plus enam, 26 sisanya lebih banyak. Apalagi dididik dan diberikan suatu praktek hidup



dirannya terasa di tengah masyarakat

sehat, ia akan minimal seperti nabi Yusuf umurnya sampai 110 tahun. Nah, 110 dikurangi 26, kan masih banyak. 26 tahun untuk pendidikan dan masa kanak-kanak, selebihnya untuk dialog karya.

Jadi bisa Syaykh berikan satu contoh, dimana implementasi salah satu poin itu tadi kepada santri?

Dalam pendidikan itu, ada bahasa *action learning in action*. Jadi *action learning in action* itu pendidikan yang selalu dijabarkan dengan satu tindakan. Dan tindakan ini dilandasi oleh peserta didik itu. Peserta didik itu selalu menciptakan *problem*, kemudian di *solving*, diciptakan lagi *problem*, di *solving* lagi oleh peserta didik itu. Nah pelaku didik itu sekadar menjadi motivator, bukan pengendali, tapi rekanan, motivator. Bila tidak menemukan problem baru, diajak, kalau ini bagaimana? Jadi tidak memberikan pengajaran semacam tutor. Kamu harus begini-kamu harus begini, tidak. Jadi pendidik itu menghantar saja.

Sudah dipraktekkan di Al-Zaytun?

Tentu, dipraktekkan. Ada problem, umpamanya, kawan mereka ada kekasaran tindakan dan sebagainya. Kita sediakan tempat seakan-akan itu mahkamah, bertanya mengapa terjadi. Begini, mengapa kok harus itu kamu lakukan. Nah, ini dilakukan oleh para

pelajar, tentunya kita ada di dalamnya, karena kita mendidik, tidak ada pendidikan kekerasan.

Setelah itu kita mengevaluasi, bagaimana kamu supaya tidak terjadi lagi ini, kamu sebagai pengurus. Nah, hal ini tidak bisa diajarkan di kelas. Kan di sini ada kelas, ada asrama, ada lembaga guru, ada lembaga pengawas umum. Maka di sini asrama sudah kita serahkan pada pelajar kelas tertinggi yang sudah kelas 16. Artinya, sudah mahasiswa. Yang awalnya kita berikan kepada senior-senior, sekarang itu ditarik, diberikan kepada pelajar yang notabene mahasiswa. Karena dialah yang memahami hidup dari nol sampai menjadi mahasiswa di kehidupan asrama selanjutnya, dia yang memimpin asrama.

Kemudian olahraga, yang tadinya senior yang membimbing, baik itu dari eksponen yayasan, sekarang diserahkan kepada junior. Artinya, produk yang telah kita hantarkan sampai kepada waktu tertentu mereka yang menjadi pembimbing. Di situ pengendalian dan pembimbingan sekaligus pendidikan untuk menciptakan tadi itu. Yaitu cita-cita 7 poin itu tadi, sedang berjalan.

Dan itu dilakukan dalam sistem kebersamaan yang tidak terputus itu. Sehingga penerimaan nilai-nilai itu bisa dilakukan secara bersama?

Contoh, kalau di lembaga-lembaga

tertentu, seorang pimpinan asrama diganti, digeser, itu ada reaksi karena ada kepentingan. Nah, kalau di sini nggak, kita geser karena memang mendidik terus, ini ada kader yang sudah siap paling tidak dipersiapkan jadi impas. Terus nanti di *briefing* supaya bisa lulus. Karena tidak ada kepentingan selain mendidik.

Umpamanya, manajer asrama tidak ada kepentingan untuk mendapatkan sesuatu dari kemandirian itu. Kalau narik iuran tidak ada atau dagang murid tidak ada. Jadi tat kala *rolling*, ya *easy going*, enteng saja. Kemudian kita putar, yang tadinya manajer-manajer asrama sekarang kita buat lembaga pengontrol pendidikan formal. Nanti ini juga kelas tertinggi yang memegang, alih generasi yang tersistem, namanya.

Jadi, kebersamaan yang tidak terputus tadi kuncinya? Kalau 10 tahun Al-Zaytun sudah mencapai yang seperti yang sudah dijelaskan Syaykh tadi. Walaupun sulit diukur dengan angka tapi sudah bisa dirasakan, paling tidak kalau kita berteduh sudah terasa udaranya seperti apa. Kalau sudah 10 tahun ke depan, kira-kira sudah bagaimana Al-Zaytun, dalam harapan Syaykh. Selain 7 nilai itu tadi?

Ya, selain tujuh nilai itu adalah tantangan abad ini, ya mendapat tantangan, dan menjawab tantangan itu.

Jadi mungkin tidak sekadar sebuah titik berteduh lagi, mungkin sudah ada...?

Menjawab tantangan. Tantangan itu kan bermacam-macam. Menjawab tantangan, kita tidak berkata mampu, karena mampu itu sangat relatif. Mampu itu kalau tidak dengan kerjasama, menjadi tidak mampu. Artinya kita harus tampil bekerjasama dengan yang lain. Karena yang bercita-cita ini juga banyak tentunya, saya yakin banyak. Mungkin dengan bahasa yang berbeda-beda.

Kalau dari jenjang pendidikan, 10 tahun ke depan itu, sudah ada yang selesai, tamat?

Tahun yang akan datang sudah ada.

Paling tidak kepada alumni ini sudah bisa digambarkan apa yang bisa diharapkan?

Kita tidak harus mengharapkan satu harapan. Berikan saja kepada mereka, kembangkan diri mereka dimana mereka mampu. Dengan modal yang tujuh yang sudah diharapkan tadi. Kami yakin kalau dengan tujuh harapan tadi,

Kita sekarang ini sudah tidak berbicara muslim dan non muslim. Yang kita hadapi umat manusia. Kalau nanti kita kelompokkan gagal lagi, tidak ada toleransi dan perdamaian.

andai dia dilapis bawah pun akan bergerak seperti ini, di lapis atas juga begitu.

Jadi akan terasa kehadirannya dimana dia ada?

Sehingga akan terjadi, Indonesia ini nanti, bahasa Bhinneka Tunggal Ika, menjadi bisa duduk seperti ini, bisa diskusi seperti ini di seluruh khalayak.

Dan mereka akan menjadi agen perubahan, pembaharu. Mudah-mudahan 10 tahun lagi kita sudah nikmati. Kemudian, pertanyaan kami lebih spesifik dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau Al-Zaytun itu tadi kredonya tidak sekadar motto, sudah jadi pusat pendidikan dan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian. Dan dalam perjalanannya, selalu ada tantangan yang dihadapi. Padahal ini tujuan mulia sebenarnya, tapi koq masih ada yang menanggapi aneh-aneh gitu ya. Di mana sebenarnya posisi Syaykh melihat hal ini?

Ya, tidak apa-apa, karena itu dinamika. Dinamika itu seperti itu, apalagi Al-Zaytun yang baru 10 tahun. Yang lain-lain yang umurnya sudah lebih dari banyak, masih ada tantangan. Tantangan itu biarkan menjadi tantangan, dan kita yakin tantangan dari zaman ke zaman itu selalu ada, walaupun nanti bentuknya itu berbeda-beda. Tapi tantangan itu selalu ada dan akan selalu ada. Di situlah olah pikir dan olah rasa itu akan ditingkatkan. Jadi bukan hanya olah rasa saja, olah pikir dan olah rasa. Kalau olah rasa saja belum tentu sehat rasanya. Tapi kalau olah pikir dan olah rasa, sehat dan nyaman.

Yah, itu kita melihat ada misi mulia dan tidak semua bisa menerima, terutama dari kalangan muslim sendiri, kenapa?

Nggak apa-apa, dan jangan pakai ditanya kenapa? Kalau ditanya kenapa, ya jawabnya nggak kenapa-kenapa. Jadi itu sudah hal yang biasa, tadi saya sudah sampaikan apalagi kita yang baru 10 tahun, yang sudah lebih dari banyak saja itu masih ada tantangan-tantangan.

Tapi respon yang langsung ke Syaykh sendiri, bagaimana tentang misi mulia ini?

Maksudnya respon?

Respon dari masyarakat itu?

Tadi 'kan sudah ada suatu contoh (Ketua DPRD Wonosobo). Itu 'kan bisa

dijadikan jawaban. Ya masyarakat sekitar lingkungan di sini tidak usah dijadikan jawaban. Dan kami melihatnya tentu bukan dari ucapan orang, tapi dari perbuatan orang. Yang awalnya tidak kenal apa-apa menjadi kenal apa-apa. Kita meresponnya seperti itu-itu saja. Dan tidak akan berhenti yang namanya tantangan, nanti berbeda-beda bentuk dan warna, begitu. Ya biarkan saja tantangan itu menjadi tantangan.

Lebih spesifik, ada nggak kelompok tertentu yang mempunyai pandangan, sulit menerima sebuah lembaga pendidikan Islam menjadi pusat pengembangan budaya toleransi dan perdamaian yang Syaykh terima?

Spesifik tidak ada, kelompok-kelompok spesifik tidak ada.

Tapi justru yang merespon secara positif sangat banyak?

Dikatakan sangat banyak, banyak itu juga relatif. Ya direspon, yang respon positif ada, tidak merespon pun ada, yang menentang pun ada. Nah, itu hal yang biasa. Jadi biarkan saja begitu. Nanti nilai-nilai yang kita sampaikan inilah pada saatnya akan berbicara dan berbuah.

Kalau dari kalangan non muslim bagaimana responnya?

Kita sekarang ini sudah tidak berbicara muslim dan non muslim. Yang kita hadapi umat manusia. Kalau nanti kita kelompokkan gagal lagi, akhirnya tidak ada toleransi dan perdamaian.

Sudah lewat fase pembicaraan itu?

Sudah. Itu sudah tidak terpikir.

Sudah kuno ya?

Bukan lagi kuno, sudah tidak masuk dalam pemikiran. Karena pemikiran kita ajaran Ilahi lebih didalami terus untuk semua manusia. Jadi kalau sudah diajak berbicara muslim dan non-muslim itu, di benak ini sudah tidak terima. Harus berbicara umat manusia saja kita.

Pemikiran seperti itu apa tidak ditentang oleh orang tertentu?

Itulah jangan bicara tentang ditentang dan disukai orang. Karena ini adalah ajaran Ilahi. Kalau kita takut, kapan keberanian lagi, keberanian mengambil risiko tadi. Jadi kita harus contohkan. Kita memiliki keberanian mengambil risiko. Jika tidak berani, kapan jadinya.

■ BI/MARJUKA-HOTSAN-CRS



Ketua TPTH Ummi Farida Al-Widad (kanan), didampingi ibu Nunung bertekad menghiasi dunia lewat Al-Zaytun.

Al-Zaytun Aktif Hiasi Dunia

Pusat pendidikan terpadu Al-Zaytun berpartisipasi aktif menghiasi dunia melalui program terpadu yang dinamai program pemuliaan tanaman hias. Diawali dengan pembudidayaan di laboratorium kultur jaringan, menanam dan mengembangkan di lahan yang disediakan, kemudian mengolah hasil tanaman agar lebih bermanfaat. Dan yang lebih penting lagi, menyemaikan ilmu dan minat menanam itu kepada generasi muda.

Bagi orang yang baru pertama sekali berkunjung ke Al-Zaytun di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Gantar, Indramayu, mungkin akan bertanya dalam hati apakah dirinya sedang berada di tengah kota atau sedang di tengah hutan. Disebut demikian, karena nuansa di kampus ini memang benar-benar menggambarkan dua suasana alam yang berbeda antara kota dan hutan atau kota dan desa. Di areal pusat pendidikan budaya toleransi dan perdamaian seluas 1.200 hektare itu, khususnya di 200 hektare areal pusat pendidikannya, terlihat pemandangan hutan di tengah kota atau sebaliknya kota di tengah hutan.

Disebut di tengah kota, karena ciri-ciri sebuah kota dengan segala kemodernan infrastrukturnya dan jumlah penghuninya sangat melekat di kampus ini. Gedung-gedung pendidikan, asrama, masjid dan penginapannya yang menjulang tinggi tak beda dengan infrastruktur di kota. Demikian pula dengan sarana dan prasarana pendukung pendidikan lainnya yang berteknologi modern juga tak kalah bahkan mungkin melampaui prasarana di beberapa kota di tanah air. Belum lagi penghuni tetapnya yang mencapai 15.000 jiwa, ditambah lagi pengunjung atau tamu yang saban hari selalu datang ke tempat ini.

Namun di tengah suasana kota demikian, sangat jelas di hadapan mata

bagaimana gedung-gedung di kampus ini seluruhnya dihubungkan dengan pohon dan tanaman lainnya yang tumbuh dengan subur dan tertata rapi. Sehingga, walau kita di siang hari berjalan di sekitar kampus ini, kita tidak akan tersengat teriknya matahari karena terlindung oleh pohon di sepanjang jalan. Bertambah nikmat lagi, karena pemandangan pepohonan itu tidak kalah dibanding pemandangan di hutan sesungguhnya karena jenis pepohonan di kampus ini juga sangat beragam, mulai dari jati, mahoni, eukaliptus dan berbagai jenis pohon yang langka dari berbagai daerah di Indonesia bahkan dari mancanegara.

Pemuliaan Tanaman Hias

Di kampus ini, kita misalnya bisa mengenal pohon tin dan zaytun yang merupakan tanaman khas dari Timur Tengah. Juga bagaimana pohon ulin yang begitu terkenal dari Kalimantan, atau bagaimana rupa berbagai tanaman bunga yang sedang tren di masyarakat seperti anggrek hitam, berbagai jenis kaktus, adenium, puring, anturium dan lain sebagainya.

Semua itu ternyata sudah menjadi bagian dari rencana awal pendirian Al-



Sebagian contoh dari hasil olahan tanaman di Mahad Al-Zaytun

Tim Pemuliaan Tanaman Hias (TPTH) merupakan sarana Al-Zaytun mewujudkan tekadnya untuk ikut berpartisipasi menghiasi dunia melalui tanaman.

Zaytun. Untuk menangani bidang ini pun, jauh-jauh hari telah dibentuk satu tim yang dinamai Tim Pemuliaan Tanaman Hias (TPTH). Tanaman hias yang melekat dalam nama tim ini, maksudnya mulai dari tanaman pangan, tanaman buah, tanaman keras, maupun tanaman hias yang berbunga. Itu semua disebut tanaman hias, tergantung bagaimana mengemasnya. Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gummilang sendiri mendefinisikan tanaman hias di sini bukan cuma tanaman yang berumur pendek, tapi juga tanaman keras yang berumur panjang. Malah, menurut Syaykh, kalau bisa, apa yang tampak dari pesawat terbang, bisa dilihat dari bangunan, dari kendaraan, semuanya itu merupakan tanaman hias. Pokoknya, bisa menghiasi dunia.

Bahkan tanaman hias di sini juga dimaksudkan bukan hanya tanaman hidup, tapi juga kerajinan tangan turunan hasil tanaman, seperti sulam-sulaman, rajutan, gantungan kunci dari kayu dan lain-lain.

Bagi Al-Zaytun, penanganan bidang ini dianggap sangat penting. Hal itu terbukti dari pimpinan atau ketua Tim Pemuliaan Tanaman Hias (TPTH) ini yang dipercayakan pada Ummi Farida Al-Widad, istri Syaykh AS Panji Gummilang. Mengenai latar belakang pembentukan tim ini sendiri, menurut Ummi adalah sebagai sarana Al-Zaytun mewujudkan tekadnya untuk ikut berpartisipasi menghiasi dunia melalui tanaman.

Kegiatan TPTH, menurut Ummi Farida Al-Widad, hampir tidak pernah berhenti setiap hari dalam pemuliaan tanaman. Mulai dari selalu aktif

mendengar informasi tentang berbagai tanaman, mencari bibit, membudidayakan di laboratorium kultur jaringan, menanam sekaligus merawatnya, kemudian mengolah hasilnya agar lebih bermanfaat atau lebih indah sehingga bernilai tambah yang lebih tinggi. Dan yang tak kalah penting dari semua itu, yakni memberikan kursus pemuliaan tanaman hias (KPTH) kepada peminat tanaman hias, baik santri, guru, maupun karyawan di lingkungan Al-Zaytun.

Ummi Farida Al-Widad menyebut bahwa pembudidayaan dikelompokkan menurut jenis tanamannya antara lain, tanaman pangan, tanaman buah, tanaman keras dan tanaman bunga. Untuk tanaman buah, sekarang ini timnya sedang giat melakukan budidaya Tabulampot, yakni tanaman buah dalam pot. Seperti buah jeruk hasil perkawinan jeruk Bali dan Magetan yang kemudian oleh pimpinan Al-Zaytun diberi nama Srinjanya. Buah yang kalau di daerah asalnya ditanam langsung, kalau yang ditanam di Al-Zaytun adalah hasil sambungan yang kemudian dikembangkan di dalam pot. Hasilnya, menurut Ummi Farida Al-Widad, cukup bagus. Kontinyu berbuah.

Demikian juga dengan buah tin yang dikembangkan di dalam pot, bertumbuh dengan baik. Mengenai tanaman yang satu ini, setelah melihat pameran di lapangan Banteng Jakarta, Ummi Farida Al-Widad menyebut, benih buah tin hasil budidaya Al-Zaytun masih lebih bagus dibandingkan benih yang dipamerkan tersebut. Padahal, harga yang ditawarkan peserta pameran ketika itu juga cukup mahal. Yakni Rp 300 ribu satu polibag.

Sementara di Al-Zaytun, pengembangan beberapa jenis tanaman buah ini dilakukan masih untuk sekadar sampel. Jadi, pembibitan dan penyimpanan dilakukan di laboratorium untuk pelestariannya. Pengembangan yang dilakukan juga baru dengan cara konvensional seperti stek, mencangkok dan atau cara menyilangkan. Belum sampai pada rekayasa genetik melalui bioteknologi. Namun bila ada yang membutuhkan, tim ini bisa memperbanyak pembudidayaan hingga berapa yang dibutuhkan.

Kalau tanaman keras, seperti Jati MAZ (jati mas) dan yang lainnya, jauh sebelumnya sudah berhasil dibudidayakan, sekaligus sudah dikembangkan di lingkungan Al-Zaytun seperti sekarang tampak tumbuh lebat di sekitar kampus ini.

Untuk tanaman bunga, TPTH juga sedang mengembangkan berbagai jenis kembang, khususnya yang dianggap

cocok atau bisa beradaptasi dengan daerah Indramayu yang panas dan sering dilanda kekeringan, seperti kaktus, puring, adenium, anturium dan lain sebagainya.

Puring yang dulu dianggap orang hanya sebagai bunga kuburan itu, menurut Ummi Farida Al-Widad, sekarang sedang tren. Demikian halnya dengan adenium yang dalam bahasa sehari-hari disebut bunga kamboja, memang seringkali adanya di kuburan sehingga disebut orang juga sebagai bunga kuburan. Padahal, menurut Ummi, bunga itu sengaja ditanam di kuburan agar lebih aman dan lebih subur.

Demikian juga anturium. Tanaman yang merupakan daun hias ini sempat booming dengan harga yang sampai jutaan rupiah. Tanaman yang cocok dengan alam Indramayu ini, kini sedang coba dikembangkan. Namun, karena pengembangan tanaman ini sejauh ini diyakini masih harus melalui buah, sementara anturium yang dimiliki Al-Zaytun sekarang, walaupun sudah beberapa kali berbunga tapi tidak pernah jadi buah.

Karena bunga tanaman ini diduga harus ada jantan dan betinanya baru jadi buah, maka al-Zaytun kini sedang mencoba mengembangkannya dengan cara memelihara anturium yang lain selain dari yang telah berbunga, dengan harapan, ada di antara yang baru nanti jenis kelamin yang berbeda dengan yang pertama. Dengan begitu, bunga tanaman ini diharapkan bisa menjadi buah.

Dalam melakukan penelitian, TPTH terlihat demikian rapi, telaten dan cukup sabar. *Berita Indonesia* yang mendapat kesempatan untuk melihat

cara kerja dan jenis beberapa tanaman yang sudah dan sedang dikembangkan di tempat itu, melihat begitu rapinya pekerjaan di laboratorium ini. Tanaman yang sudah dan sedang dikembangkan di kampus ini juga cukup banyak ragamnya.

Begitu masuk dari pintu gerbang laboratorium, seluruh halaman depan sudah dijejali tanaman hias yang sudah berhasil dikembangkan, baik tanaman bunga maupun tanaman keras. Tanaman bunga, ada berbagai jenis yang umumnya sedang tren belakangan ini seperti kaktus, puring, adenium, everbia, pitaloka, dan lain sebagainya yang semuanya terdiri dari berbagai corak dan asal yang berbeda. Adenium, misalnya, di sini ada beberapa macam, seperti adenium Jepang, adenium Thailand dan lain sebagainya. Demikian juga puring. Ada puring raja, puring somalin, obesum, arabikum, dan lain sebagainya yang mencapai dua belas macam. Tanaman-tanaman ini pun rata-rata sudah bisa beradaptasi dengan alam Indramayu.

Selain tanaman bunga, di depan laboratorium ini juga diletakkan berbagai jenis tanaman keras yang sudah berhasil dibudidayakan. Eukaliptus atau kayu putih New Zealand, misalnya. Tanaman ini cukup berbeda dengan eukaliptus lokal, dimana batangnya yang berbulu dan wanginya yang lebih tajam. Pohon yang merupakan oleh-oleh Syekh itu pun mulai bisa beradaptasi di Al-Zaytun setelah dilakukan penyesuaian pelan-pelan.

Di belakang gedung laboratorium, ditempatkan berbagai tanaman buah serta tanaman bunga dan tanaman keras

yang lain. Di tempat inilah dikembangkan tanaman buah dalam pot (tabulampot) seperti buah leci, tin, jambu bol, dan Srinony yang merupakan perpaduan jeruk Bali dan Magetan. Khusus Srinony, pohon pertama yang ada sejak tahun 2002 lalu, hingga sekarang juga masih terus dipelihara di tempat ini.

Selain tabulampot, tanaman buah lain juga tetap dikembangkan. Pisang bertandan dua, misalnya, tumbuh baik di tempat ini. Mengenai buah yang satu ini, menurut ibu Nunung, pimpinan laboratorium kultur jaringan Al-Zaytun yang juga memandu langsung tim *Berita Indonesia* saat itu, pisang yang merupakan rekayasa genetik dari Amerika, ini saat awal dikembangkan di Al-Zaytun atau generasi pertamanya berbuah seperti induknya yakni dua tandan. Namun generasi berikutnya, hanya berbuah satu-satu tandan. Kemudian, ketika terus diulang lagi, akhirnya muncul lagi tandan dua.

Selain tanaman buah, tanaman bunga juga masih banyak terdapat di belakang laboratorium ini selain yang di depan laboratorium. Anturium yang sedang diteliti bagaimana cara pembudidayaannya juga dilakukan di tempat ini.

Berita Indonesia yang mendapat penjelasan mengenai cara kerja tim ini, juga berkesempatan melihat isi laboratorium tempat dimana proses pembudidayaan dilakukan. Sebagaimana layaknya sebuah laboratorium, memasuki ruangan dimana proses pembibitan dilakukan, siapapun harus membuka alas kaki dan memakai baju khusus lab.

Di dalam ruangan yang terus dijaga ke-higienis-annya ini terlihat alat-alat modern untuk proses pembudidayaan, seperti oven untuk mensterilkan wadah gelas atau botol sebelum dipergunakan sebagai wadah pembibitan. Kemudian ada Laminar, yakni sebuah alat yang benar-benar higienis yang dipergunakan sebagai tempat saat memasukkan bibit ke tabung gelas atau saat memindahkan bibit dari satu tabung ke tabung gelas lain.

Di ruangan berikutnya, terdapat barisan rak bertingkat tempat dimana diletakkan wadah-wadah botol tempat bibit dari berbagai jenis tanaman yang baru dibibitkan atau baru tumbuh. Sterilisasi ruangan ini selalu dijaga agar bibit tanaman pengganggu seperti jamur, tidak sempat masuk dan merusak bibit yang sedang dikembangkan. Selain itu, suhu, kelembaban, dan cahaya juga dikontrol sedemikian rupa sehingga cocok dengan tanaman yang baru dibibitkan itu.

Hampir sama dengan ruangan



Laboratorium bioteknologi Al-Zaytun: Dari laboratorium inilah pemuliaan dan pembudidayaan tanaman di Mahad Al-Zaytun dimulai.

tersebut, ruangan berikutnya adalah barisan rak dimana diletakkan wadah-wadah berupa bak plastik tempat bibit tanaman yang sudah lebih besar dipelihara. Sterilisasi ruangan ini juga selalu dijaga. Suhu, kelembaban dan cahaya di ruangan ini juga selalu dikontrol agar cocok dengan tanaman di sana. Semua wadah bak plastik tersebut juga ditutupi terpal plastik tipis transparan untuk menjaga kelembabannya. Anggrek hitam yang dikategorikan tanaman langka itu misalnya, dirawat di tempat ini.

Khusus mengenai anggrek, tanaman asli dari hutan Kalimantan yang awalnya diperoleh Al-Zaytun dari sumbangan seorang sahabat, (dosen IPB), itu ternyata sudah bertahun-tahun di

seiring pertambahan penelitian itu, kini keterbatasan tempat dan sarana menjadi persoalan baru bagi TPTH yang menurut Ummi Farida Al-Widad, sudah perlu mendapat perhatian.

Selain itu, menurut Ummi Farida Al-Widad, persoalan lain dari program ini adalah pencarian bibit yang termasuk susah dan mahal. "Mencari di luar itu kadang sungguh susah," katanya. Sekadar contoh, untuk kaktus yang dianggap cocok di kampus ini, TPTH masih harus belajar unsur apa yang bisa memadu-madankan. Untuk itu, selama ini Ummi Farida Al-Widad bercita-cita mengarahkan tim untuk belajar, misalnya ke Lembang atau ke Bandung. Jadi, sambil memberi kursus, tim ini juga terus belajar.



Keterbatasan tempat dan sarana menjadi persoalan baru TPTH.

Selain melakukan penelitian dan membudidayakan langsung, TPTH juga menularkan ilmu yang mereka peroleh kepada pelajar melalui kursus yang disebut dengan Kursus Pemuliaan Tanaman Hias (KPTH).

laboratorium ini. Karena tanaman ini susah beradaptasi dengan cuaca di Al-Zaytun, sehingga harus ditempatkan di laboratorium ini dengan memanipulasi atau merekayasa ruangan sedemikian rupa sehingga semirip mungkin dengan habitat aslinya.

Dari penelitian Al-Zaytun selama ini, ternyata anggrek ini cukup susah beradaptasi dengan alam lain di luar habitatnya. Setiap bibitnya yang sudah dikembangkan dicoba dibawa keluar, selalu gagal. Anggrek yang sengaja dirawat di dalam laboratorium sendiri juga hingga dua tahun belum berbunga. Selama empat tahun di Al-Zaytun, tanaman ini juga belum pernah berbunga.

Demikianlah kontinuitas dan keteraturan penelitian yang dilakukan Al-Zaytun terhadap tanaman selama ini. Kini, Al-Zaytun diperkirakan telah melestarikan dan mengembangkan tanaman hingga ratusan jenis. Namun,



Ibu Nunung, pimpinan laboratorium kultur jaringan di ter

Kursus Pemuliaan Tanaman Hias

Demikianlah mengenai pembudidayaan tanaman. Selain melakukan penelitian dan membudidayakan langsung tersebut, TPTH juga menularkan ilmu yang mereka peroleh kepada pelajar melalui kursus yang disebut dengan Kursus Pemuliaan Tanaman Hias (KPTH). Tahun 2009 ini sudah merupakan periode keempat kursus tersebut. Setiap tahun, kursus ini selalu diminati pelajar. Peserta yang mendaftar tahun ini, misalnya, sudah mencapai 115 orang. Itu pun masih baru masuk gelombang baru.

Dari data peserta beberapa periode ini, peserta kursus ini tidak hanya diikuti oleh kaum nisa (perempuan), tapi juga oleh rijal. Persentasenya memang tetap lebih besar nisa, yakni kisaran 60:40. Sementara tim pengajar, pada tahun ajaran ini, ada 12 tutor. Tutor ini adalah alumni P3T (program pendidikan pertanian terpadu) yang

dipandu oleh Ibu Nunung.

Kursus diberikan dalam bentuk teori dan praktikum pembudidayaan dan pemeliharaan tanaman yang semuanya dilakukan di laboratorium kultur jaringan. Secara keseluruhan, kursus terdiri dari tiga level yang setiap levelnya dilaksanakan kira-kira tiga bulan. Setiap peserta baru, diwajibkan melalui level pertama. Tidak boleh langsung ke level dua atau tiga.

Program ini sendiri merupakan program nonformal. Jadi tidak termasuk mata pelajaran formal yang tercantum dalam kurikulum. Pesertanya pun baru diperbolehkan bagi pelajar yang sudah duduk di kelas 7 (setingkat SMP kelas 1).

Mengenai sistem pembelajaran, setiap



bagian bibit yang sedang dibudidayakan.

level dibagi dalam sebelas modul. Pada level satu, salah satu modulnya, misalnya, adalah mempelajari cara pengikisan, cara pengembangannya dan perawatan. Kemudian pemuliaan secara konvensional, seperti menyambung, menyetek, mencangkok dan okulasi. Kemudian di level dua yang terdiri dari sebelas modul juga, salah satu modulnya mengenai pemuliaan silang menyilang, mendaur ulang limbah kertas menjadi sesuatu barang yang mahal, dan lain-lain. Dan terakhir di level tiga, modulnya di antaranya termasuk kultur jaringan dan *green house*.

Mengingat tidak semua peserta bisa mengikuti semua level hingga selesai karena faktor waktu misalnya, dimana mungkin dia baru memulainya setelah kelas dua belas, maka sebagian peserta ada yang hanya bisa mengikuti satu level atau hanya sampai dua level. Karena itu, maka setiap levelnya diberikan sertifikat kepada peserta. Namun untuk

pendaftaran, cukup satu kali saja.

Mendaftar untuk langsung mengikuti kursus di level kedua tanpa melalui level satu tidak diperbolehkan. Tapi jika ingin cepat, peserta kursus bisa mengikuti dua level sekaligus bersamaan. Artinya, dalam satu pekan peserta tersebut harus mengikuti dua kali kursus, yakni level satu dan level duanya. Tapi pada prinsipnya, mengikuti kursus ini harus berjenjang. Dan agar lebih lengkap, sebaiknya mengikuti dari level satu sampai tiga secara berjenjang.

Soal biaya, setiap peserta hanya dipungut biaya pendaftaran dan biaya kursus per modul. Walau tidak termasuk mata pelajaran yang masuk kurikulum, kursus ini tetap melakukan tes untuk naik level.

Setelah sekian kali menyelenggarakan kursus, tujuan diadakannya kursus ini sebagaimana disebutkan di atas yakni untuk menyemaikan ilmu dan minat menanam pada pelajar, ternyata telah mulai tampak belakangan ini. Buktinya, banyak dari peserta itu kemudian membuat bidang ini sebagai hobi.

Pameran Tanaman Hias

Di pihak lain, agar hobi itu semakin tumbuh, sekaligus untuk tetap menjalin persatuan dengan yang alumni-alumni kursus, TPTH kerap mengadakan pameran tanaman hias di kampus Al-Zaytun. Pesertanya, biasanya adalah alumni kursus dan peserta kursus saat itu juga. Dalam ajang pameran ini, pelajar biasanya tampil dengan atribut organisasi pelajarannya. Penyelenggaraan pameran itu sendiri terdiri dari beberapa tim. Ada yang khusus tanamannya dan ada pula tim kerajinan tangan. Tim tanaman sendiri dikelompokkan lagi menjadi tim tanaman obat dan atau tim tanaman kehutanan. Pengalaman selama ini, sebagian peserta kursus juga bahkan sudah bisa membuat taman atau dekorasi taman. Waktu kursus yang memang sangat terbatas, yakni hanya dua jam untuk teori dan praktek dalam satu modul. Membuat peserta ingin mengasah ilmu yang sudah dia dapat, melalui pameran ini.

Dari beberapa kali penyelenggaraan, pelajar terlihat cukup antusias mengikuti pameran ini. Memperhatikan minat pelajar yang begitu tinggi itu, Ummi Farida Al-Widad bahkan berpikiran bahwa tahun depan, mungkin di Al-Zaytun akan dicoba memanfaatkan masa liburan ramadhan dengan mengadakan lomba di semua bidang. Jadi rencananya, nanti tidak diadakan libur. Tapi digantikan dengan acara *refreshing*.

Hiasi Dunia

Dengan gerakannya selama ini, Al-

Zaytun terbukti telah menunjukkan partisipasinya menghiasi dunia. Semua raihan itu jelas bukan hanya upaya TPTH belaka, tapi tidak terlepas dari dukungan Syaykh Al-Zaytun bahkan seluruh ekspone dan civitas akademi Al-Zaytun. Sekadar contoh, setiap kali Syaykh dan rombongan bepergian ke negara atau daerah lain, Syaykh tidak pernah lupa menyempatkan waktu mencari oleh-oleh dari tempat itu berupa tanaman unggul yang di Al-Zaytun belum ada. Dengan kebiasaan itu, Al-Zaytun pun kini telah memiliki begitu kaya perbendaharaan tanaman dari berbagai daerah.

Sebaliknya, sejalan dengan program menghiasi dunia tadi, Al-Zaytun juga selalu berupaya menyebarkan tanaman yang berhasil dibudidayakan di kampus itu ke daerah lainnya. Seperti ketika penyelenggaraan Tour Sepeda Jawa Madura tahun 2008 lalu, rombongan itu selalu menyempatkan diri menanam pohon di daerah yang disinggahinya.

Di samping itu, Al-Zaytun juga telah ikut melestarikan ciptaan Tuhan yang oleh banyak orang mulai kurang dipedulikan. Sebagian tanaman langka yang di alam bebas juga mungkin sangat susah berkembang, kini walau dengan susah payah, dengan sabar terus dicoba dilestarikan di kampus ini. Kayu Ulin khas dari Kalimantan, misalnya, walau sudah 12 tahun ditanam di Al-Zaytun tapi masih tetap sebesar jempol kini masih tetap dipelihara demi kelestarian pohon itu. Demikian anggrek hitam seperti disebutkan di atas, walau hingga dua tahun lebih terus dirawat di dalam laboratorium tapi tetap belum berbunga, namun terus dirawat tanpa putus asa dengan harapan satu hari kelak upaya itu membuahkan hasil yang menggembirakan.

Dan lebih mulia lagi, sejauh ini upaya itu dilakukan bukan untuk mengomersilkan penelitian, tapi murni untuk pelestarian dan penghijauan alam. Lebih dari itu, penyemaian sejak dini minat menanam kepada pelajar-pelajarannya juga diyakini kelak akan lebih banyak dan lebih indah lagi menghiasi dunia, karena mereka kelak akan menularkan jiwa-jiwa yang peduli pada lingkungan dan keindahan dunia itu ke tengah masyarakat.

Keindahan, kini telah terlihat di kampus Al-Zaytun, kiranya kesadaran dan kemauan seperti ini tumbuh di setiap kelompok masyarakat terutama para pemimpin negeri ini. Dengan demikian, Indonesia akan lebih cepat melestarikan dirinya sebagai paru-paru dunia, bahkan akan tampil sebagai pelopor penghias dunia.

■ BI/MARJUKA-HOTSAN

Wawancara Syaykh AS Panji Gumilang

Tanamkan Terus Nilai-Nilai Dasar Negara



Topik tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi tema wawancara TokohIndonesia.com dan Majalah Berita Indonesia dengan Syaykh Panji Gumilang. Tokoh pembawa obor toleransi dan perdamaian ini menegaskan bahwa bernegara itu rujukannya Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar adalah didasari atau diilhami oleh nilai-nilai dasar. Hal ini harus terus disuarakan dan ditanamkan, tapi juga tidak harus merupakan doktrin kaku.

Tanpa merujuk nilai dasar yang disepakati itu, kemungkinan negara ini terus goncang. Daripada kita goncang terus, ini harus disampaikan, dialog. Tidak bentuk indoktrinasi. "Ini dialog, nanti kesadaran dari olah pikir dan olah rasa tadi yang menimbulkan, oh ayo kita. Dan harus dari bawah," jelas Syaykh al-Zaytun. Berikut wawancara dengan Syaykh Panji Gumilang. **Dalam beberapa kesempatan di forum resmi di atas mimbar maupun pembicaraan sehari-hari, Syaykh sering mengemukakan supaya dalam kehidupan bernegara itu selalu taat azas, terutama nilai-nilai dasar negara. Yang ingin kami tanya, kenapa koq Syaykh sampai berulang kali mengatakan dan menjelaskan itu?**

Karena belum banyak yang mempertanyakan itu, maka jangan pernah berhenti.

Kalau sudah banyak, kan nggak terjadi seperti yang sekarang ini. Jadi artinya belum, masyarakat kita ini masih harus bisa diberikan informasi ini. Dan itulah dialog namanya. Dan tempat dialog kita di Indonesia ini kan negara. Tempat yang paling bagus berdialog di Indonesia ya di negara kita ini.

Dalam hal ini, negara agak gagal ya? Bagaimana?

Negara gagal memasyarakatkan nilai-nilai dasar itu?

Jangan katakan gagal. Harus bersama-sama kita. Yang punya negara itu kan kita, artinya warga negara inilah yang memiliki negara. Kemudian negara itu memberi batasan 'kan, siapa warga negara itu? Warga negara itu adalah bangsa Indonesia yang mempunyai kewajiban dan hak yang sama yang tidak terpecah.

Jadi bisa ditanya lagi, kenapa belum banyak warga negara ini yang memahami atau mempraktekkan nilai-nilai dasar itu?

Mestinya pendidikan dan pengajaran itu mengenalkan dulu kemanusiaan dan kewarganegaraan itu. Nanti mereka akan paham, bahwa bernegara itu rujukannya Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar ini adalah didasari atau diilhami oleh nilai-nilai dasar tadi. Ini dulu, tidak usah diterapkan kita ini turunan darimana. Masukkan yang riil. Yang riil, bangsa Indonesia itu hari ini, ini. Lepaskan turunan apapun. Tumbuh Undang-Undang Dasar ini karena punya dasar seperti ini. Itu ditanamkan terus, tapi juga tidak harus merupakan doktrin kaku. Terus seperti kita di sini menekankan, di tempat lain menekankan. Ujung-ujungnya kan kalau seluruh menekankan didengar seribu orang, terus ada sepuluh ribu yang menyampaikan hampir sama.

Tapi barangkali pernah ada kesalahan proses penyampaian?

Bukan kesalahan. Belum terbentuk proses seperti itu. Kalau kesalahan 'kan bisa dibuat.

Kami pikir ada kesalahan?

Ya, kalau mungkin disimpulkan, ya silahkan saja buat kesimpulan.

Termasuk dan tahap apa, caranya itu 'kan...?

Ya, itu simpulkanlah itu kalau gitu, haha. Kami sekarang kan begini, tanpa menyebut nama, apa-apa kita sampaikan gini.

Dulu ada nilai-nilai P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Tapi mungkin prosesnya, kebijakannya mendidiknya, bagaimana pandangan Syaykh?

Saya tidak menanggapi yang itu, tapi bahwa kita menyampaikan begini. Kita semua punya kewajiban untuk mengajak diri kita dan bangsa Indonesia meyakini Undang-Undang Dasar ini dan landasan daripada Undang-Undang Dasar, nilai-nilai yang menghargai dasar negara.

Apa pentingnya?

Ini wadah kita, Indonesia ini wadah kita. Baik wadah berdialog, wadah berkarya, wadah berbangsa.

Bahwa hidup ini tanpa nilai dasar yang disepakati itu, wadah tidak bisa...?

Bukan tidak bisa, kemungkinan terus goncang. Bukan berarti hilang, goncang terus. Daripada kita goncang terus, kan enak yang tenang. Ini harus disampaikan, inilah dialog.

Tidak bentuk doktrinasi?

Nggak! Kalau doktrinasi, itu kaku. Ini dialog, nanti kesadaran dari olah pikir dan olah rasa tadi yang menimbulkan, oh ayo kita. Dan harus dari bawah itu.

Ada yang salah dalam civic education di Indonesia?

Tidak salah, tapi penyampaiannya, kurikulumnya, mungkin tidak ditekankan. Kita di sini menekankan, daripada semua tidak ada yang menekankan, kan lebih baik ada satu yang menekankan.

Kalau di Amerika, sudah dibuat satu disiplin ilmu tersendiri. Bagaimana di Indonesia?

Harus dibuat.

Pendidikan kewarganegaraan sudah memenuhi syarat nggak?

Amerika itu ada lebihnya. Lebihnya apa? Aku orang Amerika dan bangga menjadi bangsa Amerika.

Walaupun dia baru kemarin menjadi warga negara Amerika ya?

Dan bangga, karena apa? Terus membaca apa itu visi negaranya dan misi Amerika. Kita juga harus begitu, harus kenal misi Indonesia kita. Dan diberi kebebasan bangsa ini untuk menelaah nilai-nilai dasarnya.

Apa tidak bisa melenceng?

Nggak, nggak akan melenceng. Yang namanya ketuhanan itu tidak akan melenceng, kemanusiaan tidak akan melenceng. Karena nilainya universal. Nggak bisa ditanya di sini, ya ditanya ke tempat lain, ini gimana seperti seharusnya begini?

Tetapi akhirnya akan kembali ke sini?

Akan kembali. Ada yang sudah mendalami lebih dalam, ada yang masih dangkal. Nah ini interdependensi dunia, masyarakat dunia. Sebab Indonesia tenteram, dunia pun sedikit punya andil tenteram. Nah, kalau dua negara tenteram, dunia ini agak tenteram. Terus kalau semua tenteram, dunia tentu tenteram. Jadi kita punya kepentingan untuk tenteram. Preamble UUD-nya kan begitu.

Tadi Syaykh sudah mengatakan tujuh ciri-ciri kader masa depan.

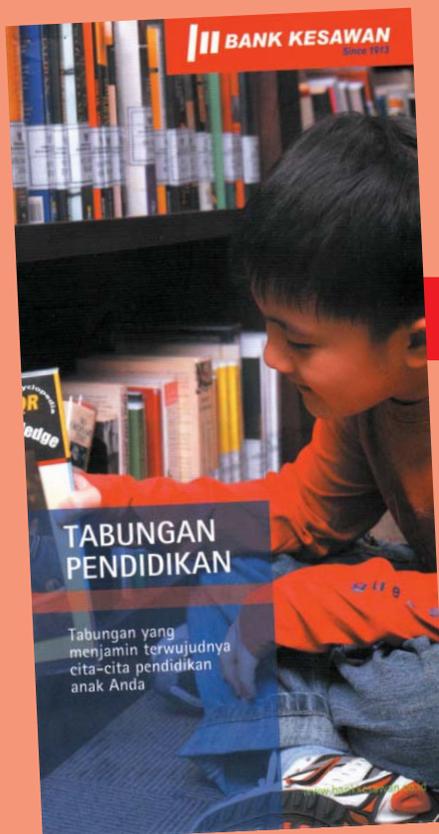
Lalu, setelah santri-santri sudah terjun ke masyarakat, apa ada upaya untuk melihat mereka, paling tidak melihat apakah mereka masih tetap seperti yang dididik, sesudah dia di masyarakat?

Ya, kalau secara langsung, kita tidak harus lakukan itu. Tetapi secara tidak langsung, kita punya kewajiban artinya untuk terus mengajak, memberikan penyemangatan. Menjadi penyemangat, untuk tetap konsisten kepada credo yang dulu ditampilkan. Itu suatu keharusan, jangan sampai nanti, dari sini tetap berpegang pada credo yang ada, tetapi kemudian setelah keluar, malah bertentangan.

Tapi kalau intinya itu toleran dan perdamaian, apapun yang ia lakukan dalam bentuknya dia punya bentuk forum sendiri, itu kita lepas. Intinya toleran. Toleran itu luas, perdamaian itu luas. Jadi kita tidak batasi toleran itu harus begini. Tidak! Damai itu harus begini! Karena semua orang itu punya ide toleran dan ide damai. Jadi asal itu terus dipegang, bukan kontrol yang begitu. Saling mengingatkan. Mungkin juga nanti alumni-alumni kita mengingatkan kita.

Yang jelas masih ada komunikasi? Ya, harus ada.

■ BI/MARJUKA-HOTSAN-CRS



Guna melengkapi kebutuhan nasabah yang kian beragam dalam perencanaan biaya pendidikan, Bank Kesawan meluncurkan produk baru Tabungan Pendidikan. Penandatanganan MOU Kerjasama antara Bank Kesawan dengan Asuransi Mega Life di Jakarta tanggal 21 Juni 2008.

Business Director Bank Kesawan - Entjik S.Djafar menjelaskan, melalui Tabungan Pendidikan diharapkan nasabah dapat **merencanakan biaya pendidikan** anak lebih baik. Jangka waktu yang diberikan sangat fleksibel yaitu mulai dari **1 tahun sampai 20 tahun** dan usia penabung pada saat jatuh tempo adalah 65 tahun, dan setoran rutin setiap bulan besarnya **mulai dari Rp. 100.000,-** atau kelipatannya dengan maksimum sampai dengan **Rp5 juta**. Mudah melakukan setoran rutin karena secara otomatis Bank Kesawan akan mendebet rekening Tabungan atau Giro setiap bulannya.

Bank Kesawan Luncurkan Tabungan Pendidikan

Selain kemudahan-kemudahan di atas, Tabungan Pendidikan Bank Kesawan juga memberikan perlindungan **asuransi jiwa**. Dalam hal ini apabila penabung meninggal dunia maka setoran rutin bulannya akan diteruskan oleh Asuransi Mega Life. Jika nasabah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap atau meninggal dunia maka ahli waris akan mendapatkan **santunan duka sebesar 250%** dari kumulatif saldo tabungan atau maksimum Rp500 juta, dan manfaat santunan rawat jalan/inap sebesar biaya rumah sakit atau maksimum 25% dari saldo Tabungan Pendidikan.

Sesuai dengan visi Bank Kesawan untuk menjadi Bank terdepan di kelasnya, kini lebih memantapkan posisi dalam kancah persaingan perbankan nasional. Hal ini didukung oleh 32 jaringan layanan yang tersebar di 10 kota di Indonesia dan ATM Kesawan yang siap untuk memberikan pelayanan selama 24 jam sehari serta **bebas biaya transaksi ATM** untuk info saldo, tarik tunai dan transfer antar rekening Bank Kesawan. Akses jaringan ATM Kesawan tersebar di lebih dari **12.000 mesin ATM** yang berlogokan ATM Bersama di seluruh Indonesia.

Informasi lebih lanjut mengenai Tabungan Pendidikan Bank Kesawan, dapat menghubungi Customer Service kami yang terdekat di kota Anda:

JAKARTA: 021-350.8888; MEDAN: 061-415.2929; BANDUNG: 022-422.0618; SURABAYA: 031-568.7530; DENPASAR: 0361-233.777; PEKANBARU: 0761-33308; BATAM: 0778-456.112; TANJUNG BALAI: 0623-92688 dan PEMATANG SIANTAR: 0622-29666.

Lagu Lama Byarpet Listrik

Pemadaman listrik yang sering terjadi menunjukkan pemerintah masih lamban dan sulit untuk beradaptasi dalam mengelola persoalan energi listrik. Sedangkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, ketersediaan listrik yang memadai tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Pemadaman listrik di Tanah Air ibarat lagu lama yang terus diputar. Pemadaman bergilir yang terjadi belakangan ini di daerah Jakarta dan sekitarnya dirasa sudah sangat membebani dan merugikan masyarakat. Komplain dari masyarakat pun tidak bisa dihindarkan karena pemadaman berlangsung cukup lama. Pemadaman bergilir yang diumumkan pun kadang tidak tepat waktu. Akibatnya, berbagai aktivitas dan produktivitas masyarakat menjadi terganggu.

Akibat kerusakan gardu induk PLN di Cawang, Jakarta Timur, akhir September lalu, pasokan listrik ke sejumlah kawasan industri di Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Banten terganggu. Untuk mengurangi defisit energi listrik itu, PLN harus memasok listrik dengan membeli listrik dari PT Bekasi Power Jababeka sebesar 37 MW dan membeli *excess power* dari PT Argopantes sebesar 2 MW sebagai upaya mengurangi dampak pemadaman listrik di Jakarta dan sekitarnya.

Pemadaman listrik beruntun ini menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofyan Wanandi, akan mengganggu industri tekstil di kawasan Jakarta dan Tangerang. Setidaknya terdapat 500 industri besar yang terganggu. Kapasitas produksi yang semakin anjlok akan berdampak pada menurunnya pendapatan perusahaan. Diperkirakan kerugian industri mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Kerugian ini akan terus membengkak karena gardu Cawang diperkirakan baru normal pada Desember 2009.

Tak ketinggalan, pengusaha Jepang yang tergabung dalam Grup Industri Kansai juga menyampaikan keluhannya terkait dengan pemadaman listrik yang sering terjadi kepada Menteri Perindustrian, MS Hidayat. Menurut mereka, hal tersebut telah mengakibatkan proses produksi dan pengiriman barang perusahaan terganggu. Hidayat sendiri mengingatkan, jika hal tersebut berlarut-larut

bisa mengakibatkan banyak sektor industri yang akan kehilangan kesempatan dalam berusaha. Namun, Hidayat mencoba menenangkan hati dan memahami keluhan para pengusaha Jepang itu, untuk tidak khawatir dalam melanjutkan investasinya di Indonesia. Hidayat mengatakan, bahwa dalam paruh waktu 2010, pasokan listrik dari proyek 10.000 Megawatt (MW) sudah dapat dimanfaatkan.

Pemerintah atau Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai penyedia listrik nasional dinilai sangat lambat dalam mengatasi masalah listrik ini. Pasaunya, pemadaman bergilir yang kerap terjadi bukan hanya kali ini terjadi, bahkan tahun-tahun sebelumnya pun sudah sering terjadi. Tak hanya di Jawa, defisit pasokan listrik juga melanda sebagian besar wilayah Indonesia. Namun, kepekaan untuk segera beradaptasi dengan masalah kekurangan energi listrik ini tidak juga bisa segera teratasi. Indonesia sebagai salah satu negara pengekspor minyak, tidak seharusnya membuat-buat alasan kalau bahan bakar yang digunakan sebagai sumber energi pembangkit listrik tidak mencukupi. Indonesia bahkan memiliki tambang batu bara yang pemanfaatannya bisa lebih dioptimalkan sebagai sumber energi pembangkit listrik.

Ironisnya, seperti di daerah Kalimantan Timur, yang merupakan salah satu basis penghasil batu bara dan migas, masih mengalami pemadaman bergilir. Pemprov Kalimantan Timur mengalami persoalan kelistrikan yang berkepanjangan, di samping membebani rakyat tapi juga telah mengganggu perputaran ekonomi.

Pemerintah yang selama ini berorientasi pada bahan tambang lebih menjadikannya sebagai komoditi ekspor daripada digunakan untuk mencukupi ketahanan energi dalam negeri. Cukup sering kita mendengar dan menyaksikan antrian panjang masyarakat akibat krisis BBM. Begitu juga dengan pembangkit listrik



yang kekurangan pasokan batu bara, dan sebagainya.

Melirik ke negeri Cina misalnya, boleh dibilang sebagai negara penghasil minyak, jauh di atas Indonesia, masih saja mengimpor minyak untuk kebutuhan dalam negeri. Karena Cina menyadari betul, untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, penyediaan infrastruktur energi tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan terbukti, ketahanan energi dalam negeri tersebut telah menjadikan negara itu memiliki nilai plus untuk menarik investor-investor asing yang ingin menanamkan modalnya di sana.

Dan sebagai konsekuensinya, semua menyaksikan, mereka kini hadir sebagai raksasa Asia dalam ekonomi dan mulai diperhitungkan. Krisis ekonomi global yang menimpa negara-negara di dunia tidak terlalu signifikan untuk menghambat laju pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Bahkan Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi China di 2009 akan naik jadi 8,4 persen dibandingkan sebelumnya sebesar 7,2 persen. Di samping semakin membaiknya infrastruktur, hal ini juga diakibatkan negeri tersebut mampu merangsang permintaan domestik.

Bila dibandingkan dengan Indonesia yang hanya memproduksi batubara kira-kira 230 juta ton per tahun dimana hanya sebesar 20-25 persen yang diserap di dalam negeri selebihnya di ekspor. Padahal China yang produksi batu baranya 2,2 miliar ton dan India 800 juta ton tidak



bisa memenuhi permintaan ekspor karena dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi dalam negeri. Memang pemerintahan yang baru sekarang ini sudah mengatakan akan lebih memprioritaskan kebutuhan dalam negeri melalui kebijakan pasokan ke domestik (*domestic market obligation/DMA*) yang akan dimulai pada 2010. Hal ini menurut pengamat dinilai sebagai langkah yang tepat, walau separuhnya masih diekspor. Pemerintah akan membatasi ekspor batu bara maksimal 150 juta ton. Dari 230 juta ton tahun ini, sebesar 68,5 juta ton untuk domestik dan 45-46 juta ton untuk menjamin tersedianya batu bara bagi pembangkit listrik yang masuk dalam proyek 10.000 MW tahap I dan II.

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 7-8% tahun 2014. Sementara untuk mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen saja, pertumbuhan listrik harus tumbuh di atasnya yakni sebesar 9 persen. Sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut, diperkirakan peningkatan kebutuhan listrik juga akan terus bertambah. Pada periode 2009-2018 saja, kebutuhan listrik Jawa dan Bali diperkirakan akan tumbuh rata-rata sebesar 9,5 persen per tahun. Sedangkan untuk luar Jawa dan Bali, akan tumbuh rata-rata 10,3 persen per tahun. Dan pada saat itu sektor industri akan mendominasi pemakaian listrik.

Tingkat konsumsi listrik total pada

tahun 2020 misalnya dengan skenario optimis akan mencapai 585.000 GWH. Jika mengacu pada skenario moderat, konsumsi listrik mencapai 364.000 GWH dan untuk skenario pesimis mencapai 227.000 GWH. Sedangkan peningkatan pasokan listrik hanya kurang dari 4 persen. Cadangan listrik pun jauh dari memadai. Dari kebutuhan cadangan 30 persen, yang kini tersedia cuma 20 persen. Dengan kondisi ini, sudah pasti PLN kewalahan memenuhi permintaan listrik.

Konsumsi listrik Indonesia yang begitu besar akan menjadi suatu masalah bila dalam penyediaannya tidak sejalan dengan kebutuhan dan tidak segera diatasi. Atas kebutuhan yang mendesak ini pemerintahan SBY menempatkan pengadaan energi listrik di urutan kedua dari 15 prioritas utama dalam program 100 hari setelah perbaikan infrastruktur.

Pengembang Listrik Swasta

Direktur PLN, Fahmi Mochtar mengatakan untuk memperbaiki sistem kelistrikan nasional, Perusahaan Listrik Negara (PLN) membutuhkan dana sebesar 32 triliun untuk membenahi segala sumbatan yang terjadi di gardu, transmisi dan pembangkit listrik yang direncanakan diambil dari APBN, kredit ekspor dan *soft loan*.

Namun, seperti yang diharapkan banyak pihak, penyedia energi listrik nasional tidak hanya dimonopoli PLN saja, tetapi juga melibatkan pihak swasta. Hal itu dirasakan sangat perlu untuk mengejar defisit listrik yang sedang dihadapi negara saat ini. Mochtar, tidak mempersalahkan jika ada investor lain yang ingin bergerak di bidang listrik. Pihaknya sangat bergembira jika ada investor yang ingin menanamkan modalnya. Untuk mempercepat tersedianya pasokan listrik untuk memperbaiki perekonomian Indonesia.

Sementara itu, mengenai perhitungan anggaran PLN, menurut Menko Perekonomian Hatta Radjasa, masih dibicarakan. Yang pasti menurutnya, pemerintah tidak menginginkan pemadaman secara nasional. Pemerintah akan menanganinya karena tidak bisa hanya dari PLN. Sementara mengenai keterlibatan kelistrikan dari swasta masih mencari formulanya.

Sekarang yang menjadi kendala dalam melibatkan investor swasta datang dari pengembang listrik swasta (*independent power producer/IPP*) itu sendiri. Investor swasta masih khawatir akan keberlangsungan bisnis di sektor listrik terkait dengan jaminan proyek. Padahal pemerintah sudah memberikan jaminan proyek terhadap kontribusi IPP pada proyek 10.000 MW tahap I. Sementara untuk proyek 10.000 MW tahap II belum disediakan. Untuk mengatasi hal tersebut, Departemen Energi dan Sumber Daya Mine-

ral tengah menyusun kebijakan optimalisasi pengembang listrik swasta tersebut, untuk pembangunan listrik 10 ribu MW tahap II.

PT PLN juga telah meminta proses renegosiasi 50 proyek listrik swasta yang akan dilakukan pemerintah bisa dipercepat. Karena kebutuhan pembangkit listrik tidak bisa dari PLN saja, apalagi masih banyak wilayah Indonesia yang masih mengalami defisit listrik. Namun, para kontraktor listrik swasta meminta *term and condition* (syarat) kontrak yang telah disepakati dengan PLN diubah. Mereka meminta kenaikan harga dan adanya jaminan dari pemerintah.

Di sisi lain, pemerintah harus segera mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan. Indonesia mempunyai sumber panas bumi dengan potensi sekitar 27.000 MW atau sebesar 40% cadangan dunia yang merupakan terbesar di dunia. Namun demikian, pemanfaatan energi panas bumi baru mencapai 900 MW atau 4% dari kapasitas terpasang nasional. Pengembangan energi panas bumi tahun 2020 diharapkan dapat menjadi 6.000 MW.

Pemerintah sendiri sedang mengalokasikan anggaran untuk penggunaan panas bumi (*geothermal*) guna proyek percepatan listrik 10.000 MW tahap II dalam anggaran pendapatan belanja (APBN) 2010. Dalam tahap II ini, komposisi penggunaan panas bumi akan mendominasi sekitar 48 persen dan 12 persen untuk tenaga air, batu bara 26 persen, dan gas 14 persen. Sejumlah pembangkit berbahan bakar batu bara akan diubah menjadi pembangkit berenergi panas bumi.

Selain itu, upaya penghematan untuk menekan konsumsi listrik perlu digalakan. Di antaranya, mencabut subsidi listrik untuk sektor-sektor yang tidak perlu, seperti perumahan mewah, hotel, dan pusat belanja. Lewat cara ini, dana hasil penghematan pun bisa dialokasikan untuk menggenjot percepatan pembangunan pembangkit listrik yang terbengkalai gara-gara krisis ekonomi.

Bila dibandingkan dengan negara-negara lain, tingkat konsumsi pemakaian listrik Indonesia relatif lebih besar. Hal ini mengindikasikan tidak efisiennya konsumsi listrik nasional. Sehingga perlu dilakukan audit energi, khususnya untuk sektor industri. Dibandingkan dengan Perancis, AS, Kanada, Jepang, Inggris, Jerman yang merupakan negara industri, Indonesia masih negara paling boros energi, bahkan dibanding Malaysia dan Thailand. Sebagai negara yang boros, 51,66 persen kebutuhan energi dipasok oleh minyak, akibatnya Indonesia sering kelimpungan bila terjadi kenaikan harga minyak dunia. ■ HTS, RB

KURANG MEMUASKAN: Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary (tengah) saat jumpa pers



Demi Yang Terbaik

Guna mengatur masa kerja menghadapi pemilu yang akan datang, ditambah kinerja yang dinilai buruk, KPU direncanakan akan diberhentikan sebelum habis masa kerjanya.

Masa tugas anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2007-2012 seyogianya baru berakhir tiga tahun lagi. Namun, lantaran kinerjanya dinilai kurang baik selama menyelenggarakan Pemilu Legislatif 9 April 2009 dan Pemilu Presiden 8 Juli 2009 lalu, di samping untuk mengatur masa kerja KPU menghadapi Pemilu 2014, baru-baru ini banyak pihak menginginkan mereka diganti sebelum berakhir masa kerjanya. Bahkan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga Panitia Hak Angket DPR periode 2004-2009, juga telah memberi rekomendasi penggantian.

Keinginan ini belakangan semakin mengerucut setelah sebagian anggota Komisi II DPR 2009-2014 juga menginginkan hal yang sama. Depdagri juga diberitakan sedang menyiapkan RUU berkaitan dengan pemberhentian tersebut.

Sebelum hingga sesudah penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, kinerja KPU memang selalu menjadi sorotan akibat berbagai kekurangan lembaga ini dalam melaksanakan tugasnya. Dari sekian banyak kekurangan, nota yang paling mendapat protes adalah masalah daftar pemilih tetap (DPT). Ketika itu, di berbagai daerah, banyak ditemukan penyimpangan berupa, banyak warga yang tidak masuk DPT, adanya pemilih ganda, pemilih di bawah umur, dan pemilih misterius.

Di samping itu, KPU juga pernah dinilai melakukan pelanggaran kode etik, seperti ketika komisinya ini membuat spanduk

kampanye pemilu presiden yang bertanda conteng nomor 2—nomor urut pasangan SBY-Boediono. Dan yang terbaru, KPU juga dinilai lambat dalam merumuskan aturan mengenai pengisian kursi anggota DPRD di daerah pemekaran. Padahal, sesuai UU 10/2009 tentang Pemilu Legislatif dan UU 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, komisinya inilah yang berwenang membuat aturan tentang pengisian kursi legislatif itu.

Menyikapi berbagai pelanggaran kode etik dan kekurangan yang dilakukan KPU pusat maupun KPU daerah itu, sebelumnya juga sudah banyak tuntutan untuk memeriksa dan mengontrol kinerja KPU ini. Bawaslu misalnya, jauh-jauh hari sudah mengusulkan agar dibentuk Dewan Kehormatan (DK) KPU. Namun dengan berbagai alasan, dewan itu tidak pernah jadi dibentuk KPU.

Terkait DPT yang simpang siur, DPR periode 2004-2009 bahkan sempat membentuk panitia Khusus Hak Angket Penghilangan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu Legislatif 2009 (Angket DPT). Belakangan, rekomendasi panitia khusus inilah kemudian dilanjutkan oleh Komisi II DPR periode 2009-2014 pada rapat internalnya 2 November lalu yang menyepakati rencana pemberhentian komisioner KPU. Selanjutnya, desakan Komisi II ini pulalah diyakini yang menggerakkan pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri menyiapkan beleid tentang tata cara pemberhentian KPU.

Walau dengan alasan sedikit berbeda, Mendagri Gamawan Fauzi mengakui se-

dang menyiapkan RUU berkaitan dengan pemberhentian anggota KPU secara serentak. Ia menegaskan, hal itu dilakukan agar masa jabatan KPU lebih banyak menjelang pelaksanaan pemilu daripada pasca-pemilu. "Kalau pergantian seluruh anggota KPU baru dilakukan tahun 2012, itu terlalu mepet," katanya. Lebih lanjut ia mengatakan, RUU tentang pemberhentian anggota KPU itu diharapkan selesai akhir tahun 2010. Dengan begitu, pergantian anggota KPU secara serentak bisa dilakukan.

Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo juga mengakui, pihaknya telah menyiapkan tiga alternatif pergantian KPU, yakni mengganti ketua komisioner saja, mengganti ketua dan beberapa komisioner, atau mengganti seluruh komisioner.

Komisinya sendiri, kata Ganjar, sudah menyiapkan tiga alternatif dasar hukum penggantian komisioner KPU itu. Pertama, pencabutan Keppres pengangkatan oleh presiden. Kedua, mendorong presiden mengeluarkan perppu percepatan masa jabatan. Ketiga, revisi terbatas UU 22/2007/pasal 29. Namun menurutnya, yang paling elegan adalah revisi UU. "Karena permasalahannya tidak semata-mata mengganti komisioner, melainkan juga menata kembali infrastruktur pelaksanaan pemilu," katanya.

Hadar N. Gumay, pemerhati pemilu dari Cetro juga sepakat dengan Ganjar. Ia mengatakan, selain untuk mengganti anggota KPU, amandemen terbatas UU Pemilu penting untuk mengatur masa kerja KPU agar lebih sinkron dengan periode pilkada dan pemilu.

Mengenai apakah pergantian anggota KPU hanya di tingkat pusat saja atau ikut KPU daerah, Ganjar mengatakan, sekarang para anggota Komisi II masih berpegang pada rekomendasi hak angket DPR periode sebelumnya untuk mengganti komisioner KPU di tingkat pusat. Namun nantinya akan dipertimbangkan juga untuk mengganti anggota KPU di daerah. "Untuk sampai di daerah, kami menghitung betul akan ada ratusan pilkada pada 2010," katanya.

Menanggapi hal itu, Hadar memberi saran agar dilakukan penundaan pilkada pada 2010, supaya seluruh agenda pilkada bisa berlangsung dalam satu kali pelaksanaan. Karena itu, dia juga menyarankan agar dilakukan amandemen terbatas pada UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah.

Menimbang berbagai pendapat di atas, tanpa bermaksud 'menghukum' anggota KPU sekarang, tapi demi perbaikan pelaksanaan pemilu 2014 nanti dan demi efisiensi waktu dan materi terkait pelaksanaan pemilu dan pilkada di negeri ini, kiranya pergantian anggota KPU melalui revisi UU Pemilu perlu didukung. ■ JK

Kekuatan Baru dari Dunia Maya



Dari dunia maya, facebooker kemudian melakukan aksi di dunia nyata

Gencarnya dukungan media dan berbagai kalangan di dunia maya kepada KPK terbukti membuat penguasa tidak bisa berbuat sesuka hatinya.

Pesatnya perkembangan teknologi internet dewasa ini, telah mempercepat dan mempermudah orang dalam mengakses informasi. Baik yang bersumber dari dalam negeri ataupun mancanegara sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Semua orang juga makin saling terhubung di dunia maya lewat Twitter, blog-blog, dan situs jejaring sosial dan pertemanan, *Facebook* yang saat ini sangat diminati oleh masyarakat.

Tanpa mengenal batas, tidak lagi disekat oleh status sosial, semua menyatu dan berbaur dalam situs tersebut. Seseorang yang telah memiliki akun, bebas menggunakannya untuk berinteraksi.

Kehadiran *Facebook* ini memang sempat mendapat penolakan bahkan dikabarkan akan dihapuskan. Namun, Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring membantah rumor yang melarang *facebook* digunakan. "Facebook itu kan tidak bertentangan, tidak akan dilarang," katanya usai dilantik 22 Oktober di Istana Merdeka, Jakarta. Seperti diketahui mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga merupakan salah satu politisi yang dikenal aktif di dunia maya. Tifatul memiliki akun sendiri di *Facebook*, bahkan ia juga memiliki laman di situs yang mirip, Twitter dan menuliskan banyak pantun untuk menyapa para fansnya.

Di sisi lain, *Facebook* juga dijadikan

sarana untuk menyuarakan pendapat dan dukungan terhadap seseorang atau kelompok. Peristiwa penahanan dua Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit dan Chandra, misalnya, mengundang simpatik dan keprihatinan para *facebooker* terhadap keduanya. Pasalnya, *facebooker* melihat ada upaya mengerdilkan lembaga pemberantas korupsi Tanah Air tersebut.

Ketika dua wakil pimpinan tersebut ditahan, gelombang simpati 1.000.000 *Facebookers* Dukung Chandra Hamzah & Bibit Samad terus mengalir. Apalagi setelah keluarnya pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudoyono yang tidak akan mengintervensi proses hukum. Padahal publik sangat menginginkan Presiden bisa turun tangan meredam gejala di masyarakat menyusul polemik antara KPK dan Polri yang kini terus bergulir. Ditambah lagi dengan keterangan Kapolri yang belum juga bisa meyakinkan publik, dukungan di *facebook*-pun semakin melonjak.

Bak gayung bersambut, riak-riak demonstrasi di dunia nyata semakin meluas di berbagai kota. Seperti diketahui pada tanggal 8 November diperkirakan 500-an *facebookers* turun ke jalan untuk menggelar aksi damai seperti long march menuju gedung KPK dengan kostum pakaian putih dan memakai pita hitam di lengan.

Fakta ini menunjukkan bahwa dukung-

an terhadap Chandra dan Bibit dari berbagai kalangan yang sangat besar, yang mungkin di luar dugaan otoritas pemerintah yang menahan kedua wakil KPK tersebut. Kemudian dukungan yang datang telah melintas batas, tidak hanya di dunia riil tetapi juga datang dari dunia maya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia telah berubah menjadi masyarakat multimedia yang tidak hanya mengandalkan media cetak, televisi, radio untuk mendapatkan informasi. Seperti komentar seseorang yang dituliskan dalam laman komentar sebuah situs ternama di Jakarta. "Melawan tidak mesti lewat parlemen jalanan, lewat langit ternyata lebih cepat pada masa maju ini. Tiba saatnya rakyat bangkit bergerak." Walau terdengar sangat blak-blakan, terkesan semangat yang sangat heroik. Diucapkan dengan tulus, mengalir tanpa ada tekanan atau paksaan, menyikapi situasi yang sedang terjadi. Sejauh ini, pengguna *facebook* di Indonesia terus bertambah. Dari 240 juta penduduk Indonesia saat ini, *facebooker* sudah lebih dari 3 juta orang.

Pada dasarnya, suguhan informasi yang secara terus menerus telah membuat masyarakat harus bersikap. Perkembangan informasi yang kian terbuka, telah merubah perilaku masyarakat semakin kritis. Setelah pemutaran rekaman di Mahkamah Konstitusi, yang diduga sebagai barang bukti adanya rekayasa kriminalisasi KPK yang dibuka kepada umum semakin meyakinkan bahwa media yang disebut sebagai pilar keempat demokrasi, telah menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol terhadap penguasa.

Melihat fenomena gelombang dukungan yang datang terhadap KPK baik dari dunia maya ataupun dari media lainnya, mengindikasikan bahwa media dapat mengarahkan bahkan merubah opini masyarakat. Seperti yang diungkapkan praktisi dan teoritis pers Prof Dr Tjipta Lesmana MA, tidak ada yang tahu persis apa yang menyebabkan 90 persen media berdiri di belakang KPK. Bahkan, para Jenderal di Markas Besar Polri sempat merasa jengkel dan marah dengan sekap terjang media.

Keberpihakan media kepada KPK telah membuat pemberitaan di media cetak ataupun radio dan televisi yang terkadang tidak *fair*, kurang obyektif. Ia mengatakan, banyak kampiun pers Amerika, bahwa media dalam menghadapi kasus-kasus besar erat hubungannya dengan kepentingan publik tidak bisa bersikap netral. Kebenaran dan keadilan haruslah menjadi pedoman berpijak media. ■ BS

Alex Noerdin Rapat Pemprov Wajib Pakai Bahasa Inggris

Sejak menjabat sebagai gubernur Sumatera Selatan, 7 November 2008 untuk periode 2008-2013, Alex Noerdin terus bekerja keras untuk memajukan daerahnya. Seperti diketahui, mantan Bupati Banyuasin dua kali berturut-turut (2001-2006 dan 2007-2012) ini, berhasil menerapkan program berobat gratis bagi seluruh warganya hingga membawa Sumsel sebagai provinsi pertama yang melaksanakan program tersebut. Dan sesudah itu, pria kelahiran Palembang 9 September 1950 ini juga menjalankan program pendidikan gratis mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, Madrasah baik negeri atau swasta. Kini, lagi-lagi ide segar kembali terlontar dari pikirannya. Ia meminta para pejabat di Pemprov untuk mempersiapkan diri menguasai Bahasa Inggris yang kini telah dimulai dari eselon II, bahkan nantinya akan diterapkan dalam seluruh eselon. Alex Noerdin mewacanakan untuk tahun 2010, akan menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam rapat. Ia mengatakan bahwa rapat dalam Bahasa Inggris bukan mau sok-sokan tapi tuntutan era globalisasi. Ia mengingatkan bahasa global salah satunya Bahasa Inggris, jika tidak dikuasai akan rugi sendiri. ■



Prof. Dr. Mohammad Mahfud Dicemooh Cari Muka

Keberanian dan keteguhan Ketua Mahkamah Konstitusi yang sudah teruji beberapa kali ini patut diacungi jempol. Contohnya, ia berani memutar rekaman, barang bukti yang diduga terkait dengan adanya rekayasa kriminalisasi KPK atas penangkapan dua pimpinan Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah pada awal November lalu. Dalam rekaman tersebut disebutkan keterlibatan sejumlah nama pejabat petinggi penegak hukum di kepolisian dan kejaksaan agung bahkan mencatat nama presiden. "Saya tidak ada beban apapun untuk membuka rekaman itu. Semua bisa saja," kata Mahfud yang lahir di Sampang Madura, Jawa Timur, 13 Mei 1957. Langkah berani Mahfud tidak sedikit menuai pujian. Tapi ada juga pesan yang masuk yang tidak setuju dengan sikap MK dari orang yang tidak dikenal. Yang menilai MK mencari muka kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menanggapi hal tersebut ia mengatakan, "Sikap begitu ya saya biarkan saja. Siapapun boleh berpendapat," katanya. ■



Regenerasi Tiga Pemimpin TNI

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik dan mengambil sumpah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) yang baru di Istana Negara awal November lalu. Pelantikan dihadiri Wakil Presiden Boediono, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, serta seluruh Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. Ketiganya diangkat sebagai kepala staf TNI berdasarkan Keppres 49/TNI tahun 2009.

Jenderal TNI George Toisutta – Meneruskan Kodim Papua dan Kalimantan

Jenderal George Toisutta resmi menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang ke-26 menggantikan Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo. Toisutta kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan, 1 Juni 1953 sebelumnya menjabat sebagai Panglima Kostrad (2007-2009). Selesai serah terima jabatan dari Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo di Mabes TNIAD, Jakarta (11/11) lulusan dari Akademi Militer, Magelang (1976) ini mengatakan, pihaknya akan meneruskan rencana pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) di Kalimantan Barat dan Papua. Menurut dia, tidak ada kebijakan baru terkait pergantian pimpinan di matra darat. "Saya akan teruskan apa yang telah ditetapkan oleh pejabat lama," kata mantan



Pangdam III/Siliwangi 2006. Ia juga menegaskan keberadaan komando teritorial tetap diperlukan agar seluruh wilayah Indonesia dapat diawasi dan dijaga dari kemungkinan masuknya penyusup. Di bawah kesatuannya, George berkomitmen TNI Angkatan Darat akan membantu Polri dalam pemberantasan terorisme.

Marsekal TNI Imam Sufaat – Usul Ganti Pesawat Tempur

Lahir di Wate, Yogyakarta, 27 Januari 1955,

Marsekal TNI Imam Sufaat menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara menggantikan Marsekal TNI Soebrandio. Lulusan Akademi Militer 1976 ini sebelum menjabat sebagai KSAU adalah Panglima Komando Angkatan Udara. Selesai serah terima jabatan (12/11), ia mengatakan, TNI Angkatan Udara akan terus berupaya meningkatkan kemampuan alat utama sistem persenjataan. Dengan rencana mengganti pesawat tempur Hawk MK-53 dan OV 10 Bronco. Sedangkan dua pesawat angkut Hercules sedang

Nila Djuwita Moeloek Biasa Hidup Dalam Tekanan

Setelah sempat mengikuti audisi Cikeas pada 18 Oktober 2009, Nila Djuwita Moeloek disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk menjadi Menteri Kesehatan pada Kabinet Indonesia Bersatu II menggantikan Siti Fadilah Supari, pejabat lama. Namun apa daya, ia dinyatakan tidak lolos tes kesehatan (kejiwaan), tidak mampu menghadapi tekanan beban kerja (gampang stres). Ahli bedah mata yang juga istri mantan Menkes Farid Anfasa Moeloek, ini menjadi bertanya-tanya. Selain merasa tidak punya penyakit apapun, ia mempertanyakan definisi stres. Sebagai seorang dokter kanker mata, Nila menuturkan ia justru biasa hidup dengan tekanan dan menjadi bagian hidupnya. "Bagaimana jadinya jika saya tidak bisa menghadapi stres," katanya. Ketua Umum Dharmawanita Pusat (2004-2009) ini mengaku tidak merasa dipermainkan, hanya saja ia bingung pola rekrutment calon menteri. "Saya merasa bingung dengan pola calon rekrutmen menteri. Orang sudah dipanggil dan dipublikasikan. Berbagai ucapanpun datang dari seluruh Tanah Air," ujarnya. ■



diperbaiki di Amerika Serikat dan Bandung.

Laksamana Agus Suhartono – Target Mencapai Zero Accident

Laksamana TNI Agus Suhartono resmi menjadi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) menggantikan Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno. Agus Suhartono, lahir di Blitar, 25 Agustus 1955, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1978. Dan sebelum menjadi KSAL, dia menjabat sebagai Irjen Departemen Pertahanan. Dia juga pernah menjabat sebagai Pangarmabar dan Komandan Gugus Tempur Laut Koarmatim dan Asisten Operasi KSAL. Upacara serah terima jabatan berlangsung di Dermaga Koarmatim, Ujung, Surabaya (13/11). Sesaat setelah serah terima, Panglima TNI Djoko Santoso dalam kata sambutannya berharap zero accident di tubuh TNI AL. Dia juga berharap di dua kesatuan TNI lainnya yaitu AD dan AU juga tidak ada kecelakaan. Ia mengatakan, meski kemampuan negara masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan alutsista, jangan pernah dijadikan alasan untuk tidak meningkatkan profesionalisme dalam mencapai target zero accident. ■

Tiga Pahlawan Nasional Baru

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahkan gelar pahlawan nasional dan bintang mahaputera adipradana kepada Alm. Laksda TNI (purn) Jahja Daniel Dharma (John Lie) di Istana Negara, Jakarta. Pada kesempatan yang sama, Presiden pun menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional untuk Alm. Prof. Dr. Herman Johannes, dan Alm. Prof. Dr. Achmad Subardjo. Bersama dengan itu, ada sepuluh orang yang meraih bintang kehormatan. Mereka yang meraih Bintang Mahaputera Adipradana adalah Alm. K.H. Ahmad Sanusi, Alm. Sutan Muhammad Amin (Kroeng Raba Nasution), Alm. Sutan Muhammad Salahuddin dan Alm. Sri Susuhunan Pakubuwono X. Sementara itu, Bintang Mahaputera Nararya dianugerahkan kepada Heruri Kartiwoastro. Bintang Jasa Utama dianugerahkan kepada Alm. Gorlap Sitompul, Alm. Frans Mendur, Alm. Alex Mendur. Terakhir, Bintang Budaya Parama Dharma dianugerahkan kepada Alm. Usmar Ismail dan Alm. Dr. RM. Saptohoedoyo.

Laksamana Muda TNI (Purn) Jahja Daniel Dharma (John Lie) – Pahlawan Nasional Indonesia dari Etnis Tionghoa

Lahir di Manado, Sulawesi Utara, 9 Maret 1911, Jahja Daniel Dharma atau yang lebih dikenal sebagai John Lie adalah salah seorang perwira tinggi di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dari etnis Tionghoa. Sebelum masuk Angkatan Laut RI, ia adalah seorang muallim kapal pelayaran niaga milik Belanda KPM. Ketika itu ia bertugas di Cilacap dengan pangkat Kapten. Ia berhasil membersihkan ranjau yang ditanam Jepang untuk menghadapi pasukan Sekutu dan pangkatnya dinaikkan menjadi Mayor. Selama ia menjadi perwira Angkatan Laut, ia sering ditugasi untuk mengamankan pelayaran kapal yang mengangkut komoditas ekspor Indonesia untuk diperdagangkan di luar negeri, karena saat itu kas negara sedang menipis. Kemudian ia juga pernah ditugaskan menjadi komandan kapal perang Rajawali (1950). Dan aktif dalam penumpasan RMS (Republik Maluku Selatan) di Maluku lalu PRRI/Permesta. Hingga akhirnya ia pensiun dari AL, Desember 1966 dan meninggal pada usia 87 tahun (27 Agustus 1998). Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.



Herman Johannes – Cendekiawan, Politikus, dan Ilmuwan

Prof. Dr. Ir Herman Johannes yang lahir di Rote, NTT, 28 Mei 1912 merupakan lulusan Technische Hogeschool (THS) Bandung (ITB). Kepriha-



tinannya kepada bangsa dan negara, terutama rakyat kecil di mana saat itu harga minyak bumi sangat tinggi mendorongnya untuk mencari bahan bakar alternatif untuk bisa dipakai masyarakat secara luas. Pada akhir hayatnya ia masih melakukan penelitian yang menghasilkan kompor hemat energi dengan briket arang biomassa. Herman Johannes juga pernah meneliti kemungkinan penggunaan lamtoro gung, nipah, widuri, limbah pertanian, dan gambut sebagai bahan bakar. Selain sebagai pendidik dan ilmuwan, Herman Johannes yang pernah mengemban berbagai jabatan penting di negara ini, mulai dari Rektor UGM (1962-1966), Koordinator Perguruan Tinggi (Koperti) tahun 1966-1979, anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) RI (1968-1978), dan Menteri Pekerjaan Umum (1950-1951), juga pernah berkarir di militer. Pada saat pemerintah mengalami krisis persenjataan, ia diminta untuk membangun laboratorium persenjataan bagi TNI dan berhasil memproduksi berbagai bahan peledak, seperti bom asap dan granat tangan. Sebagai fisikawan dan kimiawan, peranannya dalam perang melawan Belanda adalah menjadi spesialis meledakkan berbagai jembatan. Hingga pada Serangan Umum 1 Maret 1949, Herman Johannes juga ikut menyerbu kota Yogyakarta dan menduduki ibukota Republik selama enam jam.

Achmad Subardjo – Menteri Luar Negeri Indonesia Pertama

Achmad Soebardjo lahir di Karawang, Jawa Barat, 23 Maret 1896 dan meninggal pada usia 82 tahun (15 Desember 1978). Dia adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama pada masa Kabinet Presidential (1945) dan pada Kabinet Soekiman Soewirjo (1951-1952) yang diangkat langsung Presiden Soekarno sesudah kemerdekaan. Pada saat itu, ia mengemban tugas dan tanggung jawab yang berat. Karena sesudah kemerdekaan ia bertugas untuk menyampaikan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh dunia dan mendapatkan pengakuan dari negara-negara di seluruh dunia. Ia menamatkan sekolahnya 1917 dari HBS setingkat SMA. Dan meraih gelar Sarjana Hukum atau Meester in de Rechten dari Universitas Leiden, Belanda (1933). Sejak menjadi mahasiswa ia telah aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan bergabung di organisasi kepemudaan seperti Jong Java dan Perkumpulan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Pada saat proklamasi Indonesia, jasa Achmad Subardjo sangat dirasakan atas keberaniannya meyakinkan para pemuda guna membebaskan Bung Karno dan Bung Hatta dari penculikan di Rengasdengklok, sehingga akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 1945. ■



Pat-gulipat di Bank Century

Setelah setahun bailout LPS masuk ke Bank Century, hasil audit BPK akhirnya membongkar adanya 'pat-gulipat' dalam pengelolaannya. Kasus ini diharapkan bisa terbongkar dengan transparan demi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional.

Gagal mengikuti kliring pada tanggal 13 November 2008 menjadi awal dari terbongkarnya berbagai penipuan di Bank Century. Walau obat penawar sudah dikururkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui dana talangan (bailout), namun hingga setahun berselang, bank yang kini berganti nama menjadi Bank Mutiara itu belum jua sembuh. Uang nasabah tetap tidak kembali, uang negara malah ikut raib. Kasus ini pun melebar ke area politik. Sementara beberapa nama petinggi negara ikut terseret-seret.

Gagal kliring itu sendiri karena Bank Century kekurangan dana di Bank Indonesia (BI) sebagai syarat mengikuti kliring. Sementara penyebab awal persoalan keuangan di bank ini menurut hasil pemeriksaan, adalah adanya surat berharga valuta asing (valas) bank ini yang bermasalah. Surat berharga yang dibeli pada 2003 yang seluruhnya (sekitar US\$203,4 juta) diterbitkan oleh bank asing itu tergolong macet karena tidak memiliki rating.

Berawal dari situ, berbagai kebobrokan bank ini, termasuk dalam kegiatannya akhirnya terbongkar. Misalnya, diketahuilah bahwa dana cadangan bank ini di BI sudah di bawah saldo minimal. Di samping itu, selama ini bank ini ternyata melakukan penjualan reksadana walau tidak mempunyai izin. Bahkan, salah satu reksadana itu merupakan reksadana 'bodong'. Alias, dibuat tanpa seizin Badan Pengawas Penanaman Modal (Bapepam). Reksadana tersebut dijual dengan nama Investasi Dana Tetap Terproteksi dan dikeluarkan oleh PT. Antaboga Delta Sekuritas.

Belakangan dikabarkan, sekitar Rp 1 triliun - 1,5 triliun uang nasabah terkena masalah seputar produk yang dikabarkan sudah dijual sejak tahun 2001 itu. Uang itu diberitakan mengalir ke rekening Robert Tantular sebagai pemilik bank dan rekannya di Antaboga.

Modus kasus yang boleh disebut pembobolan secara sistematis ini adalah dengan cara mengiming-imingi para nasabah dengan bunga tinggi di atas bunga deposito yang berlaku saat itu. Nasabah yang percaya, akhirnya memindahkan

dananya dari Bank Century ke rekening Antaboga yang ada di Century juga. Setelah dana masuk ke rekening Antaboga, uang itu kemudian ditarik oleh Robert. Selain melalui cara itu, pembobolan dengan modus pinjaman juga dilakukan Robert. Yaitu, beberapa kredit dikururkan manajemen lama ke berbagai nama yang ternyata ujungnya ke Robert juga.

Untuk berbagai tindakan itu, pengadilan telah menghukum Direktur Utama PT Bank Century Tbk, Hermanus Hasan Muslim, tiga tahun penjara. Sementara Robert Tantular sebagai Direktur Utama PT Century Mega Investama dijera hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp50 miliar. Namun, dengan diukumkannya mereka itu, tidak sendirinya menyelesaikan masalah bank ini. Karena seperti disebutkan di atas, kasus bailout Rp 6,7 triliun telah menyeret berbagai instansi dan oknum.

Kasus bailout sendiri berawal dari masalah kesulitan likuiditas dan modal Bank Century. Untuk mengatasi masalah keuangan itu, pada tanggal 15 Oktober 2008, bank central sebenarnya telah memerintahkan tiga pemegang saham mayoritas bank ini, yakni Robert Tantular, Rafat Ali Rizfi, dan Hesyam Al Waraq menandatangani letter of commitment yang isinya memuat janji ketiganya untuk membayar surat berharga yang jatuh tempo dan menambah modal bank. Selain itu, mereka juga berjanji mencari investor baru untuk menyelesaikan permasalahan bank paling lambat 31 Maret 2009. Namun, mereka tidak menepati janjinya sehingga Bank Century tidak bisa memenuhi kewajibannya pada nasabah.

Melihat kenyataan demikian, BI akhirnya memberikan fasilitas pendanaan jangka pendek pada bank ini sebesar Rp502 miliar pada 14 November 2008. Seiring dengan itu, BI juga kembali memerintahkan Robert, Hesyam dan Rafat menepati komitmennya yang dituangkan kemudian dalam letter of commitment pada 16 November 2008. Surat itu antara lain berisi komitmen untuk memindahkan surat berharga Bank Century ke bank kustodian di Indonesia, mengembalikan hasil pembayaran surat berharga yang jatuh tempo dan tidak akan



menjamin surat berharga ke pihak lain. Tapi, letter of commitment ini juga tidak ditepati. BI pun kembali mengururkan fasilitas pendanaan jangka pendek sebesar Rp187 miliar pada 18 November 2008.

Lantaran kondisi Bank Century makin memburuk, pada 21 November 2008 penanganan bank itu pun akhirnya diserahkan pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pada saat itu juga, LPS menyuntikkan dana Rp2,77 triliun agar kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Century 10 persen. Kemudian pada 5 Desember 2008, LPS kembali menyuntikkan dana Rp2,20 triliun untuk memenuhi tingkat kesehatan bank. Ketiga, pada 3 Februari 2009 LPS memberi lagi dana sebesar Rp1,15 triliun. Dan keempat, pada 21 Juli 2009 LPS kembali menyuntikkan dana sebesar Rp630 miliar. Jadi, total LPS telah menyuntikkan dana Rp6,7 triliun kepada

Century



Bank Century setelah pengelolaan bank tersebut diambil alih.

Alasan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Menkeu, BI, dan LPS melakukan penyertaan modal sementara di bank ini melalui LPS, selain mengganti manajemen bank, karena BI menilai kondisi yang dialami Bank Century saat itu bisa berdampak sistemik yang bisa menimbulkan penyebaran masalah ke bank lainnya.

Dari segi legalitas, pengambilalihan pengelolaan Bank Century ini diperbolehkan sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/31/PBI/2008 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat Bagi Bank Umum. PBI ini merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Perppu JPSK).

Namun kasus ini menjadi ramai karena setahun setelah LPS menalangi dan

memasuki manajemen Bank Century, bank ini belum juga bisa sehat. Sebaliknya, permasalahan makin melebar hingga area politik, bahkan menyeret beberapa nama pejabat.

Pada Kamis (27/8/09) misalnya, Komisi XI DPR 2004-2009 telah memanggil Menkeu Sri Mulyani, pejabat BI, dan LPS untuk dimintai keterangan terkait lonjakan suntikan modal yang diberikan LPS. Dalam rapat itu, DPR menanyakan dasar hukum dikeluarkannya dana tambahan senilai Rp5,4 triliun kepada Bank Century, karena pemerintah awalnya hanya meminta persetujuan Rp1,3 triliun. Sementara itu, anggota dewan juga curiga atas ketidakjelasan pencairan deposito nasabah-nasabah tertentu. Dimana ada perlakuan khusus terhadap nasabah tertentu, sementara nasabah lainnya harus rela berdemo, tapi itu pun tetap terabaikan.

Menjawab pertanyaan anggota dewan, Menkeu Sri Mulyani, yang terkesan ingin membela diri menjelaskan kronologis penyelamatan Bank Century. Menurutnya, pada 13 November 2008, BI yang ketika itu masih dipimpin oleh Boediono mengundang dirinya untuk rapat konsultasi. Rapat itu berlanjut pada 16 November 2008, khusus membicarakan persoalan Bank Century. Kemudian 20 November 2008, BI menyampaikan surat bernomor 10/232/GBI/Rahasia tentang Penetapan Status Bank Gagal Bank Century dan penanganan tindak lanjutnya kepadanya. Di dalam surat itu, BI mengusulkan langkah penyelamatan Bank Century oleh LPS sesuai dengan Pasal 18 Perpu Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Dengan dasar itulah kemudian pada 21 November 2008, rapat KSSK menetapkan Bank Century sebagai bank gagal dan menyerahkannya ke LPS. Hal itu diputuskan karena BI menyatakan, jika tidak ditangani dengan benar maka akan berdampak sistemik.

Sementara itu, Kepala Eksekutif LPS Firdaus Djaelani mengatakan, lembaganya terpaksa menyertakan modal sebesar Rp6,7 triliun karena sebagian deponas-deposan besar yang telah jatuh tempo tidak lagi bertahan di Bank Century. Dia mengakui, 60 persen dari total suntikan modal kepada bank tersebut digunakan untuk membayar deponas yang telah jatuh tempo.

Berbagai penjelasan pemerintah saat itu tidak begitu saja diterima oleh DPR. Dewan pun kemudian meminta BPK melakukan audit investigasi atas penyertaan modal pemerintah melalui LPS ke Bank Century yang membengkak menjadi Rp6,7 triliun. belakangan, sesuai hasil audit BPK yang diserahkan ke DPR tertanggal 23 Nov 2009 menunjukkan adanya paling tidak lima bagian dugaan pelanggaran di dalam kasus Bank Century yang dilakukan oleh pemilik lama, BI,

hingga KSSK. Mulai dari proses merger tiga bank menjadi Bank Century, tidak tegasnya BI terhadap pelanggaran Bank Century selama tahun 2005-2008, hingga pengucuran dana bailout.

Melihat tanda-tanda tidak adanya perbaikan di bank ini, pengucuran dana triliunan itu pun semakin marak dipertanyakan publik. Apalagi, sebenarnya tidak ada landasan hukum yang sah bagi LPS untuk melanjutkan pengucuran dana setelah Perpu JPSK ditolak DPR pada tanggal 18 Desember 2008.

Untuk mendorong penyelesaian kasus ini, dari anggota DPR bahkan sempat terdengar usulan agar kewenangan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum yang dibentuk Presiden untuk menyelesaikan kasus Bibit dan Chandra (Tim 8) diperluas, termasuk untuk masalah Century, karena awal kisruh di KPK dengan Polri juga disebutkan berawal dari kasus Century terkait pencairan deposito valuta asing sebesar ASS 18 juta milik Boedi Sampoerna yang menyeret nama Kabareskrim Susno Djuaji

Di DPR sendiri, diprakarsai oleh Fraksi PDIP muncul usulan menggunakan hak angket untuk masalah ini. Setelah hasil audit BPK keluar, angket yang telah resmi diusulkan kepada pimpinan DPR itu belakangan didukung oleh semua fraksi, setelah sebelumnya Fraksi Partai Demokrat tidak mengambil sikap. Bahkan, sempat empat Wakil Ketua DPR telah menandatangani usulan tersebut, namun Ketua DPR Marzuki Alie yang dari Partai Demokrat tidak bersedia membubuhkan tandatangan.

Sementara itu, Wakil Presiden Boediono sendiri pun sebelumnya telah menyatakan kesediaannya memberikan keterangan mengenai kasus ini.

Menyimak apa yang terjadi dalam kasus ini, wajar jika timbul pertanyaan pada pemerintah dan BI sebagai pemegang otoritas moneter. Antara lain, bagaimana bisa sampai terjadi sebuah bank menjual reksadana tanpa mempunyai izin sebagai Agen Penjual Reksadana (APERD)? Bahkan, bagaimana sebuah reksadana 'bodong' bisa lolos dari pengawasan Bapepam? Bagaimana pertanggungjawaban BI sebagai pengatur dan pengawas lembaga perbankan. Kenapa pula pemerintah tetap ngotot menggunakan Perppu yang sudah ditolak oleh DPR? Dan pertanyaan terbesar adalah, apakah kasus ini hanya terjadi pada Bank Century, atau justru merupakan cerminan perbankan nasional?

Berbagai pertanyaan itu hendaknya bisa terjawab dengan keluarannya hasil audit BPK. Pemerintah pun diharapkan jujur membuka masalah ini agar kepercayaan publik terhadap perbankan nasional tidak terganggu.

■ MS, RIE

PR di Bidang Pendidikan



Efektivitas penggunaan dana pendidikan, pemerataan jumlah dan kualitas tenaga pengajar, dan ketegasan hukum merupakan beberapa kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Berbagai program sudah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Sebanyak 20 persen dari APBN untuk pendidikan juga sudah direalisasikan. Selain itu, Departemen Pendidikan juga sudah meluncurkan banyak program seperti program Kejar Paket A dan Paket B, pendidikan wajib sembilan tahun, kemudian program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta menerbitkan UU BHP, yang semuanya dimaksudkan untuk mencerdaskan masyarakat.

Di bawah kepemimpinan Presiden SBY, masalah pendidikan tetap menjadi salah satu fokus pembangunan. Kini, di bawah pimpinan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh, Depdiknas menetapkan tiga prioritas pendidikan nasional untuk lima tahun mendatang, yakni memperluas akses masyarakat ke pendidikan bermutu, pendidikan terjangkau, dan sekolah berkualitas.

Mengenai program 100 hari dan program lima tahun, Mohammad Nuh berjanji akan memberikan 20.000 beasiswa bagi anak SMA atau SMK dari keluarga kurang mampu. Dan membagikan 17 ribu komputer yang terhubung internet.

"Semua aspirasi dari masyarakat kita tumpang, begitu besar harapan masyarakat terhadap kemajuan dunia pendidikan kita. Berbagai usulan, tentu ada skala prioritas dan disesuaikan dengan kondisi saat ini maupun kepentingan yang lebih besar. Dan yang penting, program nasional dengan target pertumbuhan 7 persen yang dicanangkan tercapai. Dengan adanya pertumbuhan sebesar itu, diharapkan berbagai program terealisasi, sesuai harapan masyarakat," kata Mo-

hammad Nuh di sela-sela acara Pertemuan Nasional (*National Summit*) 29-31 Oktober 2009 lalu kepada *Berita Indonesia*.

Mengenai tenaga pengajar, Mendiknas menegaskan tidak akan menambah jumlahnya. Sebab menurutnya, jumlah guru yang ada saat ini sudah lebih dari cukup. Hanya saja, yang menjadi persoalan adalah pola sebarannya yang tidak merata. "Jumlah guru kita sudah cukup, tapi masalahnya distribusi tidak merata. Ada daerah yang kelebihan guru dan ada yang kekurangan," katanya.

Di samping itu, kualitas dan kompetensi guru juga menurutnya belum merata. M. Nuh lebih jauh menjelaskan, selama ini terjadi disparitas dari segi kewilayahan dan status sosial. "Depdiknas ke depan akan memperkecil disparitas itu tanpa mengorbankan guru yang sudah berkualitas," katanya.

Sementara menyinggung persaingan global, M Nuh menjelaskan, globalisasi adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Maka, dampak globalisasi memacu lembaga pendidikan tinggi untuk meningkatkan kualitasnya. Dan pendidikan tinggi, kata Mendiknas, merupakan kunci dalam proses selanjutnya.

Karena ini akan sangat menentukan peran dalam meningkatkan daya saing ekonomi suatu bangsa, maka sistem pendidikan tinggi yang dihasilkan diharapkan dapat menciptakan lulusan yang berdaya saing global.

Itulah harapan Mendiknas M Nuh dan harapan seluruh masyarakat Indonesia. Namun, seperti disebutkan di atas, berbagai kendala masih menyertai pembangunan pendidikan ini, termasuk persoalan yang melekat pada berbagai program

disebutkan tadi. Program BOS misalnya. Program yang diluncurkan mulai tahun ajaran 2005/2006 ini, memang dirasa sudah memberi kontribusi positif pada peningkatan prestasi sekolah. Namun, tidak adanya aturan proporsi peruntukan dan penggunaannya, membuat pola dan penggunaannya tidak sama pada setiap provinsi. Akibatnya, dalam beberapa kasus, penggunaannya tidak tepat sasaran.

Seperti diberitakan, hampir di setiap provinsi, dana BOS malah digunakan untuk gaji guru dan tenaga administrasi honorer yang proporsinya 20-40 persen. Dana BOS itu sendiri pada awal anggarannya (2006) senilai Rp235.000 per siswa/tahun untuk SD/MI, dan tahun 2008 naik lagi menjadi Rp400.000 untuk siswa di perkotaan serta Rp397.000 untuk siswa di kabupaten, sedangkan untuk SMP perkotaan Rp575.000,00 dan SMP kabupaten Rp570.000,00.

Akibat salah sasaran, dana BOS yang dapat dinikmati siswa miskin jadi berkurang. Padahal, walau diperbolehkan, mestinya gaji guru dan pegawai honorer dialokasikan dari dana pemerintah daerah, bukan dari BOS. Adapun dana BOS, mestinya diprioritaskan untuk biaya operasional sekolah, seperti membeli buku referensi, buku teks, kegiatan ekstrakurikuler, serta untuk bantuan siswa miskin.

Permasalahan lain terjadi dalam hal penetapan pendidikan sebagai badan hukum. Kehadiran Undang Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) di satu pihak dianggap merupakan pencerahan bagi dunia pendidikan sekaligus sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pendidikan formal di Indonesia. Namun di sisi lain, UU ini dianggap sebagai bentuk kapitalisme dunia pendidikan yang berdampak pada liberalisasi penyelenggaraan pendidikan, dan menggambarkan penghindaran tanggung jawab kewajiban pemerintah pada dunia pendidikan.

Permasalahan berikutnya, mengenai program wajib belajar. Secara nasional, kini diterapkan program wajib belajar 9 tahun. Program ini cukup positif karena bisa mengurangi masyarakat putus sekolah akibat kekurangan biaya dan lain sebagainya. Namun, sejumlah daerah belakangan ini mulai menggalakkan wajib belajar 12 tahun, membuat iri daerah lainnya yang tidak mempunyai APBD yang besar.

Inilah beberapa persoalan pembangunan pendidikan sekarang ini. Masyarakat sangat menyambut baik program pembangunan pendidikan yang ditetapkan pemerintah sekarang ini, namun beberapa permasalahan disebutkan di atas perlu juga terus mendapat perhatian dari pemerintah. ■ RI, RB



Proyek tender yang diduga bermasalah

Permainan Tender di Purwakarta

Dugaan adanya pengaturan tender proyek dan beking oknum penegak hukum dinilai akan mengurangi kualitas proyek.

Proyek infrastruktur yang diluncurkan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi SH untuk Kabupaten Purwakarta pada APBD tahun 2009 mencapai Rp150 miliar. Jika ditambah program dari APBD provinsi dan pemerintah pusat, seluruhnya diperkirakan mencapai Rp200 miliar. Jumlah ini meningkat tajam dibanding tiga tahun terakhir.

Seiring dengan itu, proyek ini pun menjadi bahan rebutan bagi para rekanan di daerah ini. Disinyalir, berbagai upaya untuk mendapatkan proyek pun dilakukan. Pertama, berkembang sinyalemen adanya pengaturan tender antara Asosiasi dengan Pengguna Anggaran (PA), dengan pengaturan, setiap pemenang lelang menyeter 10% dari nilai proyek kepada oknum tertentu.

Selain itu, ada lagi indikasi keterlibatan oknum penegak hukum. Indikasi ini seakan menjawab keheranan publik selama ini, dimana proyek di daerah ini selalu luput dari kasus hukum. Sehingga kini ada rumor, bahwa jika mengandalkan penegak hukum lokal sepertinya sudah tidak mungkin menyingkap kasus pelanggaran proyek di daerah ini.

Situasi ini diduga terus terjadi sejak pelelangan tahap I pada pertengahan tahun anggaran hingga pelelangan tahap III November 2009. Suasana tender pun sering berlangsung panas. Bahkan, adu jotos di arena pelelangan pun pernah terjadi.

Bahkan, broker-broker proyek pun telah tumbuh di daerah ini. Selain itu, muncul juga oknum gerilyawan proyek dengan modus membawa pengusaha luar daerah ikut bertarung dalam tender proyek.

Suasana proses tender ini tidak luput membuat pusing Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi SH sehingga sampai dua kali mengganti ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan). Namun, sesuai pemantauan *Berita Indonesia*, pergantian itu pun toh tak memberi dampak yang positif.

Sementara itu, Kepala ULP Drs. Titop Firman, MSi membantah pihaknya terlibat permainan proyek. Menurutnya, ULP hanya memfasilitasi proses tender yang ada pada setiap unit kerja daerah. Sementara evaluasi dan pemenang tender dilakukan panitia dan PA setiap proyek.

Permainan tender ini diduga paling sering terjadi dalam proyek dengan anggaran besar. Seperti proyek *fly over* perlintasan kereta api di jalan KNPI dengan anggaran APBD Rp 3,376 miliar yang dimenangkan PT Pangkho Megah dari Jakarta. Kemenangan itu diduga karena ada yang membekinginya. Adanya sinyalemen itu mengingit pendaftaran lelang proyek ini awalnya hanya diikuti 7 perusahaan. Tapi anehnya, dalam pemasukan dokumen, terdaftar lebih 15 perusahaan. Ironisnya, hasil evaluasi panitia lelang hanya merekomendasikan PT

Pangkho Megah yang lolos evaluasi administrasi dan teknis. Sebagai pemenang tender tunggal, penawaran perusahaan ini mendapat perbaikan aritmatika dari penawaran yang diajukan sebelumnya. Dalam pengumuman pemenang (12/10/2009), tercantum penawaran Rp 3.240.900.000,00, jauh di atas HVS yang membuat publik balik tercengang walaupun harga itu diakui tak mencapai pagu proyek.

Selain proyek APBD, proyek APBN juga diduga tak luput dari permainan. Proyek lanjutan tahap II Rawat Inap RSUD Bayu Asih yang dimenangkan PT Andisam Putra yang berkantor di Jakarta, misalnya. Lelang proyek ini diikuti puluhan pengusaha lokal berpengalaman namun dalam proses penilaian administrasi maupun teknis semua berguguran. Ironisnya, sejak dimulainya pelaksanaan proyek ini, sesuai pemantauan *Berita Indonesia* di lokasi proyek, secara visualisasi banyak pekerjaan tak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Contohnya, tidak ditemukannya papan proyek, tak ada kantor proyek dan konsultan, pengecoran lantai II pada malam hari tanpa mempergunakan vibrator alat perata atau pemadat adukan. Pemakaian tulang beton di lantai II ditemukan pakai besi ulir tulangan tiang beton dengan 2 jenis ukuran berbeda.

Namun, ketika hal itu dikonfirmasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sarifudin yang juga menjabat direktur RSUD Bayu Asih, dia justru berlaku kurang menyenangkan pada wartawan *Berita Indonesia*. Dia bukannya memberi penjelasan sesuai pertanyaan mengacu temuan di lapangan, namun marah dengan suara bentakan dan kata-kata yang tak pantas diucapkan.

Apakah proyek itu tidak boleh diliput pers? Tidakkah sebaiknya proyek itu dikawal bersama demi tercapainya kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan RAB agar selesai sesuai yang diinginkan? Atau apakah memang benar adanya indikasi bahwa proyek ini dibekingi oknum penegak hukum sehingga KPA tak berkutik dan tak mampu memberi pengawasan pada pelaksanaannya?

Menanggapi masalah ini, Kepala Inspektorat Purwakarta Drs Dadan Koswara MSi ketika mendengar ucapan Sarifudin itu melalui rekaman wartawan *Berita Indonesia* menilai ucapan itu tidak manusiawi dan tak wajar disampaikan dalam kapasitas sebagai pejabat pemerintah. Karena itu, ia pun berjanji akan membicarakan hal itu dengan Sarifudin.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Purwakarta melalui Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan Endang Suratman, usai audiensi ke RSUD atas perilaku itu, juga mengecam Sarifudin sebagai sosok yang tak pantas dan layak menjadi pejabat publik. ■ BND

Agathis Menjadi Pilihan

Seluruh areal tambang migas Tarakan, yang selama ini gundul akan dihijaukan. Pemerintah Kota Tarakan bekerja sama Pertamina, kini bahkan sudah mulai menanam ribuan bibit pohon agathis. Penanaman perdana dilakukan Menteri Dalam Negeri.

Simson (48), petugas Security PT Pertamina EP Unit Bisnis Eksplorasi dan Produksi (UBEP) Tarakan merasa kesal karena tidak berhasil mencegah penggarap liar yang berkebon dekat sumur minyak.

“Terus terang, kami kewalahan menghadapi masyarakat,” kata pria kelahiran Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan itu. Apalagi kalau yang menggarap itu oknum-oknum tertentu. Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) yang mestinya terlarang untuk dimasuki, kini tak sejengkal pun yang tersisa.

Kebutuhan ruang untuk sebuah kota seperti Tarakan, memang tidak dapat dipungkiri. Dan, itu juga alasan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan, mengantisipasi ke depan dengan Pertamina bekerjasama melakukan penghijauan di seluruh kawasan WKP Pertamina Tarakan. Ini dimulai di lahan seluas 8-9 Hektare (Ha) pada lokasi Tanki Induk (TIN) Lingkas dengan menanam 2.000 bibit pohon agathis. “Penghijauan ini bukan program pusat atau daerah, tapi merupakan kebutuhan yang harus kita laksanakan,” ujar H Udin Hianggio, Walikota Tarakan, seusa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto, melakukan penanaman perdana, Kamis pertengahan Oktober lalu.

Udin Hianggio mengungkapkan, keikutsertaan pejabat negara yang saat itu Mendagri dijabat Mardiyanto, berdampak sangat positif. “Kebetulan beliau (Mardiyanto, Red) melakukan kunjungan kerja ke wilayah Utara Kalimantan Timur. Sebelum kembali ke Jakarta kita daulat



GM PT Pertamina EP UBEP menanam pohon agathis di TIN Lingkas Tarakan disaksikan Mardiyanto, dan Walikota Tarakan H Udin Hianggio.

bergabung bersama kita pagi ini,” kata Udin Hianggio kepada wartawan. Penghijauan yang dilakukan di TIN Lingkas itu sendiri merupakan permulaan, dan akan terus bertahap di seluruh WKP minyak dan gas (migas) Tarakan.

Penghijauan dengan menanam bibit pohon agathis dimaksudkan bukan untuk tujuan komersial, tetapi mengembangkan kembali pohon asli Kalimantan yang sudah punah itu di “Paguntaka” Tarakan.

Tujuan ini layak didukung mengingat sudah sulit menemukan agathis di Tarakan. Padahal, kayu berserat halus ini beberapa puluh tahun lalu pernah menjadi maskot Pulau Tarakan.

“Saya pernah terharu ketika jalan-jalan di hutan kota negara tetangga,” ujar Satoto Agustono, General Manager PT Pertamina EP UBEP Sanga-sanga Tarakan. Yang membuatnya terharu karena hampir semua jenis pohon yang ada di taman hutan kota di negara tetangga yang enggan disebut nama ini merupakan kayu asal Indonesia. “Setiap pohon diberi label nama dan asalnya, termasuk pohon agathis dari Tarakan,” ujarnya kepada *Berita Indonesia*.

“Masak negara lain dapat membudidayakan pohon yang selama ini tumbuh di Kalimantan, sementara di tempat asalnya sendiri pohon ini sudah langka. Sayang kalau tidak dilestarikan. Itu sebab, lahan yang ada kita manfaatkan untuk agathis,” ujar Satoto Agustono.

Tapi, penanaman kayu agathis di lahan Pertamina, atau WKP belum merupakan jaminan akan terwujudnya rencana Pemkot Tarakan dan Pertamina. Di sinilah biasanya muncul masalah. Masyarakat akan bersikukuh menyatakan tanah yang telah mereka kuasai itu miliknya. Dan Pemerintah Kota Tarakan dengan PT Pertamina EP UBEP Tarakan, berdasarkan “*Mijn Politie Reglement*” *Staatsblad 1930 No – 341*, menganggap semua kegiatan yang dilakukan masyarakat di WKP dilarang.

“Asal ada ganti rugi ongkos penggarapan,” kata Suwarno, 53, seorang penduduk Kelurahan Kampung Enam, Tarakan Timur. Nah, kalau itu yang terjadi, lantas siapa yang harus bertanggung jawab. Memang, sulit dibayangkan apa jadinya bangunan-bangunan yang berdiri dekat sumur migas itu. ■ SLP

Jambi Mampu, Maju dan Mandiri

Persatuan dan kesatuan merupakan modal dasar membangun Jambi ke depan. Silaturahmi merupakan salah satu upaya memperkuat rasa persatuan dan kesatuan itu, guna membangun Jambi menuju Mampu, Maju dan Mandiri. Demikian benang merah yang sering disampaikan Gubernur Jambi H. Zulkifly Nurdin dalam beberapa kali kesempatan, termasuk dalam sambutannya pada Sholat led 1430 H lalu.

Di bawah kepemimpinannya, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi terbilang cukup bagus. Tahun 2008 misalnya, provinsi ini meraih pertumbuhan ekonomi 7,16%. Di atas rata-rata

pertumbuhan ekonomi nasional yang 6,1% dan merupakan yang tertinggi di Sumatera. Menganggapi pertumbuhan yang otomatis akan mengurangi angka pengangguran sebesar 2,4% di provinsi itu, Zulkifly Nurdin dengan rendah hati hanya menyebutkan, hal tersebut patut disyukuri.

Sementara untuk tahun 2010, suami dari Ratu Munawaroh ini mengatakan, Jambi menargetkan akan menanam karet seluas 1.300 hektare untuk meningkatkan ekonomi berbasis kerakyatan. Untuk pembangunan sarana pendidikan agama dan pesantren, gubernur ini juga menaruh perhatian yang tinggi. Untuk tahun 2009 ini,



H. Zulkifly Nurdin

Pemda Jambi mengalokasikan dana sebesar Rp116 milyar. ■ sw



Bersama: Dirjen Perkeretaapian Tunjung Inderawan (kesembilan dari kiri) didampingi Abraham Mose dan pengurus Hikkipi Pusat.

Menuju Hikkipi Profesional

Profesionalitas merupakan obsesi dan spirit yang dibangun oleh kontraktor perkeretaapian Indonesia. Berbagai kiat sedang dirumuskan, termasuk dukungan penuh terhadap berbagai program pemerintah.

Pembangunan perkeretaapian semakin mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik prasarana yang menyangkut single track, double track (jalur ganda), maupun modernisasi peralatan, seperti elektrifikasi otomatis produk LEN.

Tujuan yang ingin dicapai adalah transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau. Untuk mewujudkan itu, pekerjaan bukan hanya di pundak pemerintah, seperti regulator dan operator. Peran serta dan dukungan masyarakat juga turut menentukan keberhasilan.

Di antara pendukung itu, lahir organisasi bernama Hikkipi (Himpunan Kontraktor Perkeretaapian Indonesia). Kelahiran himpunan ini dianggap pada saat yang tepat, sebab lahir pada saat geliat pembangunan perkeretaapian semakin berkembang, baik di Jawa, Sumatera, dan terus menggeliat ke berbagai provinsi yang selama ini belum tersentuh armada di atas bantalan baja itu. Dengan adanya

UU 23/2007, memberi peluang kepada sektor swasta dan Pemda untuk turut berperan membangun perkeretaapian.

Meningkatkan keselamatan, pembangunan infrastruktur perkeretaapian, berpengaruh kepada keselamatan perjalanan kereta api. Untuk itu, terbentuknya HIKKAPI yang berdiri pertengahan tahun 2009 lalu, ini akan menjadi bagian yang strategis.

Dirjen Perkeretaapian Departemen Perhubungan, Tunjung Inderawan mengatakan, sangat respek dan mendukung terbentuknya lembaga tersebut (Hikkipi). Sebab, pertama, dengan adanya Hikkipi ini, pekerjaan yang dihasilkan harus jauh lebih baik dan profesional. Untuk meningkatkan keselamatan perkeretaapian sebagai penerapan UU no. 23/2007, diperlukan kelayakan prasarana dan sarana. Sehubungan dengan itu, wadah ini diharapkan dapat memberi kontribusi, baik yang menyangkut faktor keselamatan maupun keamanan dalam penyediaan

prasarana, sarana, persinyalan, dan lainnya.

Kedua, asosiasi ini dia harapkan bisa menjadi wadah berinteraksi untuk meningkatkan kemampuan masing-masing, baik kualitas maupun sumber daya manusia dan modernisasi alat-alat yang sesuai dengan tuntutan dan tantangan yang ada, di samping aspek lain, seperti etika berkompetisi.

"Kita selalu membuka diri terhadap berbagai masukan, termasuk dari Hikkipi, dengan tujuan meningkatkan pembangunan perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi massal yang aman," kata Tunjung. Di sisi lain, turut mendukung secara maksimal lalu lintas perekonomian masyarakat agar semakin sejahtera, antar daerah dalam satu provinsi maupun antar provinsi.

Profesional

Sementara itu, Ketua Umum Hikkipi Abraham Mose mengatakan, Hikkipi bertujuan agar pembangunan prasarana perkeretaapian di Indonesia lebih memadai dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara teknis maupun profesionalitas. "Dengan terbentuknya lembaga ini, akan terbangun pula iklim persaingan yang sehat, sehingga setiap kontraktor lebih fokus dan profesional dalam menjalankan pekerjaannya," kata Abaraham.

Organisasi ini, ungkapnya, secara sistem maupun kelembagaan selalu berusaha secara maksimal, agar semua anggota dapat menghasilkan kinerja jauh lebih baik dan mendorong setiap kontraktor untuk meningkatkan kualitas. Menurutnya, itulah di antaranya salah satu tujuan menjadikan organisasi profesional ini.

Setelah Pengurus Pusat Hikkipi terbentuk, rencananya, sebelum akhir tahun 2009 telah berdiri 7 pengurus daerah (Pengda), baik di Jawa, Sumatera dan berkembang ke provinsi yang belum memiliki lintas kereta, tapi memiliki prospek dan memiliki rencana pembangunan perkeretaapian. "Kita siapkan pembentukan Pengda ke arah itu, seperti di Sulawesi maupun Kalimantan," ujarnya.

Anggota Hikkipi di mana pun berada, agar selalu beradaptasi dengan kebijakan pemerintah dan turut menyukseskan program pemerintah serta UU No.23/2007 dengan mensinergikan sesama anggota, sehingga satu sama lain bekerja sama demi menyukseskan berbagai kebijakan itu.

Sementara sasaran dan target yang ingin dicapai, menurut Abraham, jangka pendek, menengah dan panjang adalah menjadikan Hikkipi sejajar dengan asosiasi-asosiasi yang lain dan diakui secara nasional. ■ RI/DEN

Modernisasi Persinyalan Kereta

Kata modernisasi semakin sering disebut dan menjadi ukuran kemajuan. Begitu pula dengan pembangunan perkeretaapian Indonesia, baik sarana maupun prasarana kereta menjadi bagian yang tak terpisahkan.

Sebagai salah satu BUMN, PT LEN Industri terus mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan dan tantangan masa kini. Baru-baru ini, perusahaan ini kembali menghasilkan produk yang terbilang baru di negeri ini, yaitu sistem persinyalan otomatis elektrifikasi melalui modifikasi yang kini digunakan di Parung Panjang.

Menurut Adi Sufiadi Yusuf, General Manager Transportation System Business Unit dari PT LEN, lingkup pekerjaan PT LEN Industri dalam elektrifikasi Serpong-Parung Panjang terdiri dari 3 bagian. Pertama, modifikasi sistem persinyalan untuk operasional KRL, dimana peralatan yang lama tanpa aliran listrik atas.

Kedua, membangun gardu traksi baru sebagai suplai daya listrik pada jaringan aliran atas untuk keperluan di Parung Panjang. Berikutnya, membangun sistem backbone telekomunikasi berbasis fiber optik pada lintas tersebut.

Ketiga, setelah berfungsinya listrik aliran atas dan sistem backbone di jalur itu, ke depan, kata Adi, akan dibangun gardu traksi di stasiun Maja pada lintas yang sama. Dari sisi persinyalan tidak ada perubahan, namun perlu modifikasi yang terintegrasi dengan peralatan baru sebagai suplai listrik aliran atas. PT LEN sendiri siap mendukung pelaksanaan dan tugas satuan kerja (satker) dalam pembangunan sistem persinyalan, baik kebutuhan *single track* maupun jalur ganda.

Kompetitif

Selain produk yang disebutkan sebelumnya, ada pula beberapa produk LEN sedang dalam proses pengembangan di antaranya, Inter Locking System dan Computer Based Interlocking. Seperti diketahui, pekerjaan engineering sampai



Adi Sufiadi Yusuf

aplikasi produk yang digunakan di Serpong-Parung Panjang adalah buatan dalam negeri dan dikerjakan oleh tenaga dari PT LEN sendiri.

Menurut Adi, pengembangan dan rancang bangun, sepenuhnya buah karya bangsa sendiri, namun tetap memiliki standar internasional. "Tenaga ahli kita bila diberi kesempatan, tidak kalah dibanding dengan vendor-vendor asing," kata Adi bangga.

Persinyalan yang terpasang di Serpong-Parung Panjang misalnya, kualitasnya memiliki standar yang sama dengan produk yang dihasilkan negara maju. Seperti operasional kereta, karena hal itu terkait dengan faktor keselamatan, maka produk LEN yang digunakan di Serpong-Parung Panjang atau di tempat lain (negara maju), sesuai standar keselamatan internasional.

Sebagai pembanding dari proses dan teknologi, jika dibandingkan dengan kontraktor asing, dihitung dari cost dan kualitas yang sama, perbedaannya sekitar 35 persen lebih efisien. Sementara dari sisi waktu, lebih singkat 50 persen dari waktu yang dibutuhkan. Sebagai contoh, pekerjaan sejenis yang diikuti kontraktor asing perlu 2-3 tahun, sementara di PT LEN penyelesaian pekerjaan itu hanya

butuh waktu 1 tahun. Jadi, biaya lebih rendah dan waktu lebih cepat dengan standar safety yang berlaku universal.

Produk LEN, kata Adi, tidak akan mengorbankan safety terhadap pengurangan waktu dan biaya, akan tetapi tetap mempertahankan kualitas produk maupun spesifikasi sesuai standar internasional. Di Indonesia, pekerjaan membangun sistem persinyalan yang diberikan pemerintah kepada LEN merupakan kepercayaan, peluang sekaligus tantangan, dimana setiap produksi LEN selalu mengacu kepada standar kualitas yang tinggi.

Secara kompetitif, bila dibanding dengan *signaling* di negara lain, produk yang dihasilkan LEN tidak kalah, baik kualitas maupun teknologi yang dikembangkan. Dalam produknya, PT LEN juga selalu memaksimalkan kandungan lokal dan melakukan proses transfer teknologi kepada sumber daya lokal. PT LEN juga secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap produk asing. Meningkatkan daya saing dan kompetitif di pasar global juga terus dilakukan.

Perubahan, ungkap Adi disesuaikan dengan dinamika perkembangan yang ada. Adanya revitalisasi Perkeretaapian selama 3 tahun misalnya, dilihat dari sejauhmana PT LEN mempersiapkan diri dan mengembangkan diri terhadap tuntutan penggunaan produk dalam negeri. Serta kesiapan berbagai produk LEN turut mendukung program pemerintah.

Sebagai gambaran, ungkap Adi, berbagai inovasi produk dan rekayasa rancang bangun yang dihasilkan, kualitas dan desainnya sesuai perkembangan global. Tapi yang terpenting menurutnya adalah terus memperluas pasar sesuai dinamika yang berkembang.

Bagaimana memberi kepuasan kepada pelanggan, menjadi komitmen PT LEN. Oleh karena itu, perusahaan mempunyai komitmen kuat untuk senantiasa menyediakan produk yang memiliki teknologi, kualitas dan desain seperti keinginan pelanggan. ■ RI

Pengurus Aspekas Banyuwasin Periode 2009-2013

Kepedulian Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional (Aspekas) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Propinsi Sumatera Selatan (Sumsel) akan kualitas pembangunan di Kabupaten Banyuwasin patut mendapatkan dukungan. Demi menciptakan pengusaha yang berkualitas dan bertanggung jawab Aspekas Sumsel sengage menggelar Kongres Cabang (Koncab) Aspekas Kabupaten Banyuwasin di Rumah Makan Sari Alam Pangkalan Balai awal November lalu.

Koncab sekaligus pemilihan dan pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang di hadiri oleh Asisten III Pemkab Banyuwasin, Drs Isnaini MPd, beserta perwakilan dari Dinas PU Bina Marga dan PU Cipta Karya tersebut, Hj Sri Windayani SH akhirnya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Aspekas Banyuwasin Periode 2009-2013. Sedangkan Wakil Ketua I Aspekas diembankan kepada Kartika Sandra Desi, Sekretaris Umum

Syamsuri H Anang Jahri dan Bendahara M Joni.

Ketua Umum DPC Aspekas Banyuwasin terpilih, Hj Sri Windayani, mengatakan dengan kehadiran Aspekas di Banyuwasin berarti pengusaha putra daerah mampu bersaing dengan pengusaha yang berasal di luar Kabupaten Banyuwasin. "Sesuai dengan apa yang diamanahkan, saya akan berbuat maksimal untuk kemajuan pembangunan di Banyuwasin. Terutama kualitas untuk proyek jasa konstruksi," ujar Sri. ■ sw

Tak Sekadar Melindungi

Jasa Raharja menyantuni korban kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang umum. Upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas juga dilakukan.

Lebaran memang sudah berlalu. Sebanyak 16,25 juta orang yang hiruk-pikuk di jalan saat mudik, sudah kembali pada aktivitas keseharian mereka.

Jasa Raharja berusaha untuk terus memperkokoh kepeduliannya terhadap keselamatan para pengguna jalan, terutama saat arus mudik. Berbagai kegiatan dilakukan, termasuk mudik bareng gratis dengan bus yang ditujukan khusus bagi pengendara sepeda motor. Melalui kegiatan ini, Jasa Raharja berusaha ikut menekan angka kecelakaan, mengingat sepeda motor merupakan penyumbang terbesar angka kecelakaan lalu lintas.

Tahun 2009 ini, Jasa Raharja mengerahkan 150 bus untuk memberangkatkan sekitar 7.000 pemudik dari dua titik, Jakarta dan Surabaya. Di Jakarta, pemberangkatan langsung dilakukan Menhub RI Kabinet periode 2004-2009, Jusman Syafii Djamal, dan dihadiri Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, Kapolda Metro Jaya, Irfan Pol. Wahyono, Kababinkam, dan Deputi Meneg BUMN.

Selain mengadakan mudik bareng gratis, Jasa Raharja juga memberi dukungan kepada Polri dalam rangka mengamankan jalannya mudik. Secara riil, dukungan diwujudkan melalui penyerahan delapan ambulans, 50 unit sepeda motor patroli, jaket rompi, dan barikade, yang diserahkan langsung oleh Direktur Utama Jasa Raharja, Diding S. Anwar kepada Kapolri, Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri.

Excellent Service

Sebagai pemegang amanah Undang-Undang Nomor 33 dan 34 tahun 1964, Jasa Raharja memiliki tugas utama memberikan perlindungan bagi pengguna jalan. Dengan demikian, jika terjadi kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang umum, Jasa Raharja akan memberikan santunan sesuai ketentuan yang berlaku.



Saat penyerahan bantuan kepada korban gempa di Padang, Sumatera Barat beberapa waktu lalu.



Menhub RI Kabinet periode 2004-2009 bersama Dirut Jasa Raharja, Kapolda Metro Jaya, Gubernur DKI Jakarta, Kababinkam, dan Deputi Meneg BUMN saat pelepasan Mudik Bareng Gratis 2009 di Parkir Timur Senayan, Jakarta.

Memiliki motto "Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan," Jasa Raharja terus berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Diantaranya dengan membuka Kantor Pelayanan Jasa Raharja (KPJR) sejak 2008. Hingga kini sebanyak 30 KPJR sudah dioperasikan di berbagai kota di Indonesia. Keberadaan KPJR ini untuk mendukung 28 Kantor Cabang dan 58 Kantor Perwakilan Jasa Raharja.

Di luar tugas pokoknya, Jasa Raharja juga *concern* dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Untuk Program Program Kemitraan, Jasa Raharja memberikan bantuan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki kualitas tinggi dan menjadi potensi unggulan di daerah. Sementara untuk Program Bina Lingkungan, Jasa Raharja memberikan bantuan kepada masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan kepada korban musibah bencana alam.

Tahun ini, Jasa Raharja telah menyalurkan Program Kemitraan sebesar Rp34,3 miliar,

dan Program Bina Lingkungan sebesar Rp3 miliar. Jumlah mitra binaan yang telah dibina mencapai 53.089 kelompok usaha yang tersebar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia.

Bantuan Program Bina Lingkungan Jasa Raharja diwujudkan dalam kegiatan proaktif membantu korban gempa yang terjadi di Padang, Jambi, dan sekitarnya.

Seluruh rangkaian kegiatan tersebut adalah wujud perhatian dan kepedulian Jasa Raharja yang tiada henti terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. □

PERSYARATAN PENGAJUAN SANTUNAN

Meninggal Dunia:

1. Laporan Kepolisian/Syahbandar/PT. KAI
2. Surat Keterangan Dokter
3. Surat Keterangan Ahli Waris
4. Copy KTP Ahli Waris

Perawatan / Cacat Tetap:

1. Laporan Kepolisian/Syahbandar/PT. KAI
2. Surat Keterangan Dokter
3. Kwitansi Asli Rumah Sakit / Apotik
4. Copy KTP Korban

* Pengurusan santunan tidak dipungut biaya.

■ Nilai Santunan bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Darat/Laut/Udara

Jenis Santunan	Nilai Santunan (Rp)	
	Darat, Laut	Udara
Meninggal	25.000.000	50.000.000
Cacat tetap (maks)	25.000.000	50.000.000
Perawatan (maks)	10.000.000	25.000.000
Biaya pemakaman*	2.000.000	2.000.000

* Bagi yang tidak ada ahli waris

KANTOR PUSAT
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-2Kuningan,
Jakarta 12920
Telp. (021) 5203454
Fax. (021) 5220284
Website : www.jasaraharja.co.id

Panduan Sebelum Hijrah ke W

Windows 7 menawarkan semua kelebihan yang ada di Windows XP dan Vista sekaligus. Namun sebelum Anda hijrah ke Windows 7, ada baiknya mengetahui lebih dalam persyaratannya.

Para pakar dan pengguna komputer di seluruh dunia banyak memberikan kritikan pedas terhadap Windows Vista. Padahal, awalnya, Vista digadang-gadang sebagai sistem operasi yang mengalami perubahan besar dalam keluarga Windows. Dari segi tampilan lewat fitur Aero-nya, Vista memang tampil mengesankan. Celah-celah keamanan yang kerap dikritik pada Windows XP sudah berhasil ditutup.

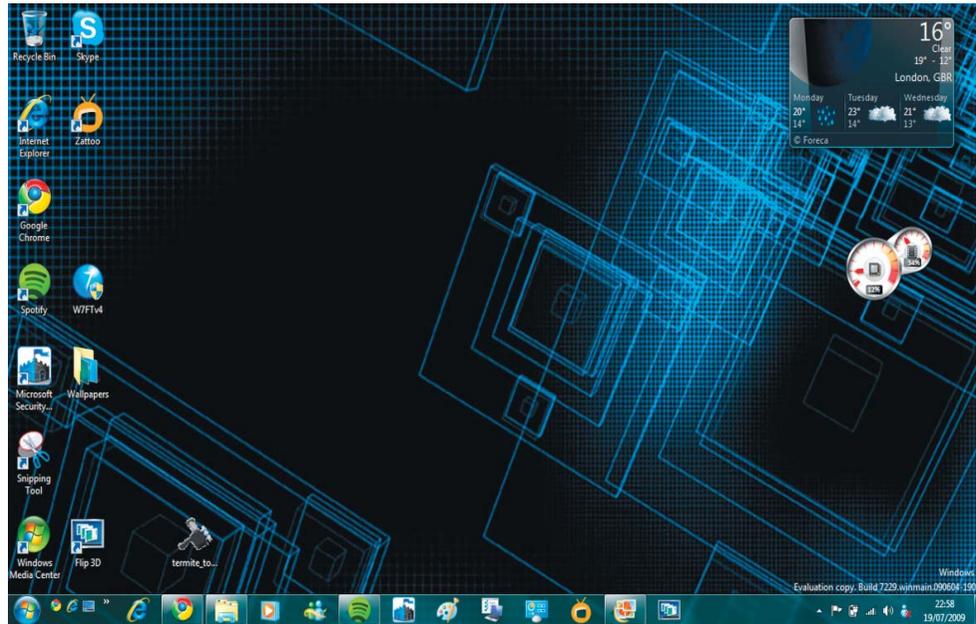
Namun, dari sekian banyak perubahan dan perbaikan yang ditawarkan Vista, sejumlah kelemahan justru menenggelamkan kelebihan tersebut. Misalkan, Vista membutuhkan perangkat keras (kartu grafis, motherboard) dengan kemampuan tinggi, memakan ruang harddisk yang sangat besar, dan rakus memori. Kelemahan lainnya seperti banyaknya bug, mahalnya harga lisensi, banyaknya masalah kompatibilitas dengan hardware dan software, dan fitur User Account Control yang menyebalkan.

Sebagai respon atas rendahnya apresiasi pengguna Windows terhadap Vista, Microsoft mencoba memperbaiki sistem operasinya dengan menghadirkan Windows 7. Pada dasarnya, antarmuka sistem operasi yang resmi diluncurkan 22 Oktober 2009 ini tidak jauh berbeda dengan Vista.

Yang membuatnya agak beda adalah taskbar Windows yang diperluas menjadi lebih lebar. Ikon-ikon di taskbar diperbesar dan area untuk aplikasi aktif diperluas dengan menyembunyikan nama aplikasi atau judul jendela. Notification area juga diubah agar tak seramai sebelumnya. Hanya ikon-ikon penting saja yang ditampilkan di tray.

Windows Flip mengalami sedikit perubahan. Kalau di Vista, Anda beralih jendela dengan shortcut [Alt] + [Tab], jendela aplikasi baru akan terbuka setelah Anda menentukan pilihan. Di Windows 7 tidak begitu. Begitu Anda memilih jendela dengan [Alt] + [Tab], Windows akan menampilkan preview dari jendela tersebut di belakang layar. Jadi, Anda bisa langsung melihat isi jendela yang sebenarnya sebelum menentukan pilihan.

Bagi yang sering berpresentsasi, tersedia shortcut baru yang dapat diakses dengan menekan tombol [Windows] + [P]. Shortcut ini akan memudahkan pengguna mengubah tampilan layar di layar desktop antarmonitor, atau dari monitor ke



Tampilan desktop Windows 7

proyektor. Selain shortcut [Windows] + [P], ada pula shortcut [Windows] + [Panah atas] untuk memaksimalkan tampilan jendela, [Windows] + [Panah bawah] untuk meminimalkan jendela, [Windows] + [Panah kiri] dan [Windows] + [Panah kanan] untuk menggeser jendela ke pojok kiri atau pojok kanan jendela. Shortcut [Windows] + [G] akan menampilkannya semua gadget di desktop, atau [Windows] + [Home] untuk meminimalkan semua jendela kecuali jendela yang sedang aktif atau mengembalikannya ke kondisi awal jika ditekan sekali lagi. Menekan [F5] selama beberapa detik akan membuat Windows secara otomatis merapikan ikon-ikon yang bertebaran di desktop.

Fasilitas Disk Defragmenter mengalami perbaikan. Kini, Anda tidak perlu lagi melakukan defrag harddisk satu persatu saat melakukan maintenance sistem. Windows 7 bisa melakukan defragmentasi beberapa harddisk pada waktu yang bersamaan. Anda juga bisa menentukan prioritas harddisk mana yang didahulukan untuk di-defrag.

Windows Explorer hadir dengan menu baru, 'Libraries', yang mempunyai empat kelompok besar yaitu dokumen, musik, gambar, dan video. Libraries akan berfungsi sebagai folder virtual yang akan mengelompokkan berbagai dokumen pengguna ke dalam satu jendela untuk

memudahkan pengelolaan file. Contohnya, Anda mengakses Library Pictures. Dengan satu klik saja, Anda bisa melihat semua file gambar yang ada di komputer dan jaringan di satu jendela. Jadi, Anda tidak perlu mengakses file gambar dengan cara tradisional melalui drive/folder di mana gambar itu diletakkan.

Untuk mengatasi masalah kompatibilitas, Windows 7 menyertakan XP Mode. Fitur ini sebenarnya hanyalah software Microsoft Virtual PC yang ditanamkan ke Windows 7, dan di dalam Virtual PC tersebut ter-install Windows XP. Jadi, kalau Anda memiliki aplikasi yang hanya bisa bekerja di Windows XP (Pagemaker 7.0 misalnya), Anda dapat membuat aplikasi itu tetap bisa berjalan dengan mengeksekusinya di XP Mode.

Mengingat banyaknya penyebaran virus melalui USB flashdisk, Windows 7 tidak akan menjalankan fasilitas autorun bagi flashdisk. Autorun hanya tersedia untuk CD dan DVD saja. Sebenarnya, masih banyak fitur dan aplikasi baru di Windows 7, tapi karena keterbatasan halaman fitur-fitur tersebut tidak bisa disebutkan semuanya.

Hijrah ke Windows 7

Sebelum Anda hijrah ke Windows 7, ada baiknya Anda mengetahui beberapa hal penting. Contohnya, apakah komputer Anda saat ini bisa mengoperasikan Win-

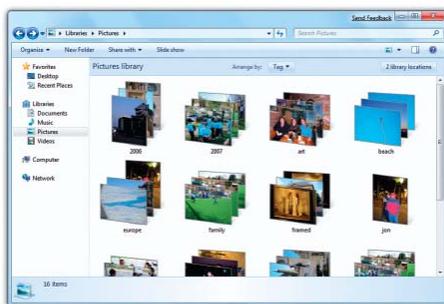
Windows 7

dows 7? Atau bisakah melakukan upgrade dari Windows XP ke Windows 7?

Jika merujuk spesifikasi minimal yang dirilis Microsoft, Windows 7 tidak memerlukan hardware yang canggih. Prosesor hanya butuh kecepatan minimal 1 GHz, memori cukup dengan kapasitas 1 GB dan ruang harddisk minimal 16 GB. Kebutuhan hardware dengan spesifikasi minimal ini benar adanya. Terbukti dari berbagai tes yang dilakukan oleh pengguna komputer di seluruh dunia. Sebagai contoh, Windows 7 bisa berjalan lancar di netbook berbasis Intel Atom N270 (1,6 GHz). Sedangkan Vista berjalan tersendat-sendat di netbook tersebut. Ini artinya, netbook atau PC yang Anda beli 3-4 tahun lalu seharusnya bisa menjalankan Windows 7.

Namun jika ingin lebih yakin, Anda bisa menjalankan Windows 7 Advisor. Aplikasi ini tersedia pada saat instalasi Windows 7. Namun ada juga versi download-nya di

Variasi Windows 7	
Starter	Versi ini hanya akan tersedia secara pre-installed. Tanpa fitur Windows Aero, maksimal tiga aplikasi yang bisa berjalan bersamaan dan lebih menekankan pada fasilitas yang berhubungan dengan dunia internet.
Home Basic	Windows 7 Home Basic hanya akan dipasarkan di negara berkembang seperti China, India, Brazil, dan Indonesia. Mendukung prosesor 64 bit, bisa menjalankan banyak aplikasi sekaligus, dan sebagian Aero namun tidak dilengkapi dengan Multi Touch dan Windows Media Center. Direkomendasikan bagi pengguna rumahan.
Home Premium	Versi ini memiliki seluruh fitur grafis dan multimedia di Windows 7 termasuk Aero, Media Center, MultiTouch, DVD Playback, Internet Connection Sharing dan premium games. Namun versi ini tidak dilengkapi fasilitas kelas bisnis seperti Remote Desktop host dan Encrypting File System.
Professional	Versi ini memiliki seluruh fitur Windows 7 Home Premium ditambah fasilitas kelas bisnis seperti Remote Desktop, offline folders, Windows Server domain dan Windows XP Mode. Yang tidak ada adalah aplikasi BitLocker (untuk mengenkripsi seluruh isi harddisk).
Enterprise	Memiliki semua fitur Windows 7 termasuk BitLocker dan DirectAccess. Versi ini hanya tersedia melalui mekanisme volume licensing.
Ultimate	Versi merupakan sistem operasi terlengkap. Jika Anda pengguna Windows Vista Ultimate, Windows 7 Ultimate ini adalah padanannya. Di sini Anda bisa menggunakan fasilitas jaringan yang super lengkap, fasilitas backup dan restore yang semakin baik, premium games, dan banyak lagi.



Windows Explorer hadir dengan menu baru, 'Libraries'

situs Microsoft. Aplikasi ini akan memindai hardware dan software di komputer Anda dan mengecek apakah hardware tersebut memenuhi syarat menjalankan Windows 7 dan software tersebut bisa berjalan dengan baik di Windows 7. Bagi Anda yang memiliki PC atau notebook dengan Vista di dalamnya, sudah dapat dipastikan, PC atau notebook tersebut bisa menjalankan Windows 7.

Setelah mengetahui kompatibilitas hardware dan software di PC atau notebook dengan Windows 7, saatnya memilih versi Windows 7. Sama seperti Vista, Windows 7 hadir dengan berbagai varian yang menasar segmen berbeda. Setidaknya ada 6 varian yang tersedia, yaitu Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise dan Ultimate. Dari 6 varian ini, ada beberapa yang hanya tersedia pada kondisi khusus. Windows 7 starter misalnya, hanya tersedia dalam bentuk pre-installed (telah terpasang) pada PC yang mendapat ijin untuk itu. Sementara Windows 7 Enterprise hanya

akan tersedia melalui format Volume Licensing melalui software Assurance. Artinya, versi Enterprise tidak akan tersedia dalam bentuk retail maupun pre-installed.

Windows 7 Home Premium menjadi versi yang direkomendasikan bagi mayoritas konsumen karena menyajikan pengalaman komputasi yang komplik dan tampilan visual yang memikat. Sedangkan Windows 7 Professional direkomendasikan untuk perusahaan kecil dan individu yang membutuhkan sistem keamanan dan produktivitas yang tinggi. Sedangkan Windows 7 Ultimate diperuntukkan bagi power user yang ingin menikmati semua fitur di Windows 7 plus premium game.

Install Ulang atau Upgrade?

Ada kabar buruk bagi Anda pengguna

Windows XP karena Windows 7 tidak bisa di-install melalui mekanisme upgrade. Anda harus install ulang dari awal (fresh install). Selain itu, pengguna Windows Vista tidak semua bisa menempuh cara upgrade. Kalaupun bisa di-upgrade, durasi upgrade akan sangat lama. Chris Hernandez, seorang Microsoft Software Engineer, pernah mencoba menghitung durasi yang diperlukan untuk instalasi ulang atau upgrade pada tiga konfigurasi komputer (low-end sampai high-end). Hasilnya waktu untuk melakukan instalasi ulang hanya 30 menit, sementara upgrade bisa mencapai 20 jam.

Jadi upgrade cuma direkomendasikan bagi pengguna Vista dengan catatan sebagai berikut: Windows Vista Home Basic bisa di-upgrade ke Windows 7 Home Premium atau Ultimate; Windows Vista Home Premium bisa di-upgrade ke Windows 7 Home Premium atau Ultimate; Windows Vista Business bisa di-upgrade ke Windows 7 Profesional atau Ultimate; Windows Vista Ultimate bisa di-upgrade ke Windows 7 Ultimate. Di luar rekomendasi ini, sangat disarankan Anda menginstall ulang dari awal (fresh install). Kalau jalan yang harus Anda tempuh adalah install ulang, pastikan Anda punya banyak waktu dan komputer tersebut bukan komputer utama untuk bekerja atau setidaknya tidak sedang digunakan untuk bekerja.

■ **LOR**

Membaca Cepat ala Google Fast Flip

Raksasa search engine, Google, kembali tampil dengan debutan barunya bernama Fast Flip. Feature baru dari Google ini merupakan aplikasi web yang memungkinkan pengguna mencari dan berbagi artikel berita secara online. Alhasil, proses pencarian artikel dan berita di web dapat dilakukan lebih cepat dan mudah. Fast Flip memungkinkan pengguna melihat thumbnail situs-situs berita sehingga berita dapat diketahui secara langsung. Jadi, Anda tak perlu repot membuka situs tersebut secara langsung. Ditambah lagi dengan kemampuan untuk membolak-balik halaman online secepat membolak-balik majalah. Dari sisi visualisasi, Fast Flip juga mampu menampilkannya dalam bentuk gambar. Ketika Anda memilih salah satu artikel dari situs berita, artikel ini akan ditampilkan dalam bentuk gambar seperti halaman-halaman pada majalah. Layaknya majalah, Google Fast Flip juga membundel berita terbaru (recent news), berita utama (headline news), dan topik terpopuler (popular topics). Di sana terdapat lebih dari tiga lusin penerbit yang mengizinkan Google untuk menggunakan logo grafis dalam konten Fast Flip, seperti New York Times, the Atlantic, the Washington Post, Salon, Fast Company, Newsweek, dan sebagainya. Rencananya, Google berencana akan mengadopsi teknologi layar sentuh (touch screen) untuk iPhone. Jadi selain melalui PC, Fast Flip juga dapat dinikmati melalui iPhone.



Android Mulai Menggebrak

CEO Google, Eric Schmidt, di sela konferensi pers berkaitan pencapaian Google di kuartal tiga mengatakan bahwa Android akan meledak di pasaran. Keyakinan Schmidt didasari semakin banyaknya produk berbasis Android yang kini diadopsi 32 operator di 23 negara. Android sendiri adalah sistem operasi smartphone yang dirilis Google sejak 2 tahun lalu. Dengan sifatnya yang terbuka dan bisa dikembangkan siapa saja, Android dianggap memiliki kelebihan khusus dibanding Symbian, Windows Mobile, maupun Blackberry yang bersifat tertutup. Google sendiri berkepentingan mempelopori Android karena ingin mengembangkan pasar mesin pencariinya ke perangkat mobile. Produk pertama yang mengadopsi Android adalah HTC Dream yang dirilis sekitar Oktober 2008, disusul dengan HTC Magic. Namun kini HTC tidak sendiri. Pertengahan Oktober lalu Motorola Samsung telah merilis Motorola Cliq, sementara Samsung akan merilis Samsung i7500 (Galaxy). Nama-nama lain seperti Sony Ericson, Acer, Lenovo, dan LG tengah mempersiapkan perangkat berbasis Android. Pangsa pasar sistem operasi smartphone saat ini masih dipegang oleh Symbian (50%), disusul Blackberry (21%), dan Apple iPhone (13,7%). Gartner memperkirakan, Android akan merebut posisi iPhone di tahun 2012.



HTC HD2 – Sentuhan Berkualitas Tinggi

Ponsel bernama HTC seperti halnya banyak diincar oleh para pebisnis atau pun orang-orang yang tidak bisa lepas dari komputer. Ponselnya, kecanggihannya tersebut memang hampir menyerupai kinerja dari komputer. Yang terbaru, HTC mengeluarkan HD2 dengan kelebihan yang sangat berkualitas. HTC HD2 hadir dengan layar berukuran 4,3 inch touchscreen sehingga memungkinkan lebih cepat, lebih efisien dan akurat saat mengetik menggunakan layar, serta memiliki resolusi sebesar 480 x 800 pixels. Ponsel yang berbasis Windows mobile versi 6,5 memiliki segudang fitur di antaranya kamera 5 megapiksel yang dilengkapi dengan dual LED Flash, untuk musik terpasang 3.5mm headphone jack dan untuk jaringan koneksi, ponsel di suport oleh HSDPA. Sedangkan untuk Wireless networking, terpasang Bluetooth, GPS dan sensor untuk mendeteksi gerakan dan cahaya, HTC Sense user interface atau TouchFLO 3D, memori 512MB, microSD card slot termasuk aplikasi untuk Facebook, YouTube dan Twitter. ■



Remaja 16 tahun Saingi Obama di Twitter

Daniel Brusilovsky bukanlah artis remaja yang sedang naik daun. Namun kesuksesannya dalam bidang teknologi di usia yang masih belia, menuntunnya menjadi 'selebriti' Twitter dengan ratusan ribu follower. Sebanyak lebih dari 150.000 follower telah digaeat Brusilovsky dalam akun situs mikrobloggingnya. Selain karena menjadi salah satu akun yang direkomendasikan, profil remaja 17 tahun ini juga mendapat label 'verified' dari Twitter. Hal ini tentu saja mengundang decak kagum, karena biasanya label tersebut diberikan pada sosok selebriti atau politisi terkenal, seperti Oprah Winfrey dan Presiden AS Barack Obama. Namun jika melihat daftar pencapaian dan kehidupan profesionalnya di bidang teknologi, ternyata semua itu pantas disandang Brusilovsky. Brusilovsky sendiri adalah seorang CEO dari perusahaan miliknya, TeensinTech.com, serta menjadi penulis di blog teknologi TechCrunch. Selain masih menyangand status sebagai pelajar, ia juga adalah entrepreneur dan produser, serta telah dipekerjakan sebagai penasihat di dua perusahaan lain.



Microsoft Merilis Antivirus Gratisan

Antivirus gratisan itu bernama Microsoft Security Essentials (MSE). Dengan MSE, pengguna komputer akan mendapatkan pengamanan untuk PC seperti antivirus dan anti-spyware. Microsoft mengklaim aplikasinya ini mampu berjalan lebih cepat dan lebih ringan dibanding produk-produk

antivirus lain yang ada di pasaran, seperti Norton dan McAfee. Aplikasi yang bisa diunduh dari situs Microsoft ini mendukung sistem operasi Windows XP, Vista, dan Windows 7 dengan besar installer antara 4,7 MB – 8,61 MB (tergantung pilihan OS). Munculnya MSE

menandai berakhirnya 'masa tugas' produk ke a m a n a n keluaran Microsoft sebelumnya, Windows Live OneCare.





Julia Roberts (kanan) di sela-sela syuting film *Eat, Pray, Love*

Setumpuk Berkah di Pulau Dewata

Pengambilan gambar film “Eat Pray Love” melahirkan julukan baru bagi Pulau Bali.

Sesi pengambilan gambar film yang dibintangi aktris cantik Hollywood Julia Roberts dalam film “Eat, Pray, Love (EPL)” telah membawa berkah bagi dunia pariwisata Indonesia. Betapa tidak, suksesnya film ini di pasaran, akan mengundang perhatian masyarakat dunia untuk dapat menyaksikan keindahan Indonesia. Lewat Pulau Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata, semakin menarik para wisatawan mancanegara dan memutuskan berkunjung ke Bali, Indonesia.

Dari sejumlah deretan nama yang diberikan kepada Bali, mulai dari Pulau Dewata, Pulau Khayangan, dan Pulau Seribu Pura, kehadiran bintang film Hollywood melahirkan julukan baru ‘Island of Love’ bagi Bali dan akan semakin mendukung promosi pariwisata Indonesia. Gubernur Bali Made Mangku Pastika di Denpasar mengatakan julukan baru sebagai ‘Pulau Cinta’, akan langsung memberikan kesan kepada siapapun bahwa Bali ini damai dan aman. Seperti diketahui sebelumnya Pulau Bali pernah diguncang aksi teroris. Setidaknya dengan pembuatan film EPL ini, dapat menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia sudah sangat nyaman untuk dikunjungi.

Gubernur Pastika mengharapkan dukungan tak sengaja yang muncul dari proses pengambilan gambar film yang diproduksi Plumbia Pictures ini akan mendorong partisipasi masyarakat luas dari berbagai kalangan untuk turut mewujudkan ‘Bali

Mandara’, aman, damai dan sejahtera. Proses pengambilan yang telah dilangsungkan sejak 15 Oktober lalu dilakukan di beberapa lokasi seperti di Pasar Seni Ubud, Kabupaten Gianyar, Pelabuhan Benoa, Kota Denpasar, Pantai Padang, Pecatu dan Ungasan, Kabupaten Badung, serta di Kintamani, Kabupaten Bangli.

Menurut Claire Raskind dari Plumbia Pictures, Bali (Indonesia) menjadi tempat terakhir proses pengambilan gambar film. Dimulai di New York (Amerika Serikat) awal Agustus, lalu berlanjut ke Roma (Italia) serta Mirzapur (India) sebelum ke Bali.

Sukses pembuatan film ini nantinya bukan tidak mungkin akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu tempat tujuan *shooting* pembuatan film bertaraf internasional. Tinggal bagaimana respon dan tindakan kooperatif dari masyarakat untuk menyikapi pembuatan film tersebut. Hendaknya keramahan dan ketulusan masyarakat yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia jangan tercederai hanya karena masalah sepele.

Seperti yang diberitakan media, saat shooting perdana dilakukan, warga protes terkait perbedaan harga sewa lokasi shooting. Hal itu sangat disesalkan Bupati Gianyar yang juga tokoh Puri Ubud, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati. “Kita justru harus malu karena Ubud dan juga Bali terkenal dan diterima oleh wisatawan dunia bukan karena harganya tapi ketulusannya. Semua harus sadar

bahwa kegiatan seperti ini justru untuk semakin mengenalkan Bali,” kata Cok Ace nama panggilan sang Bupati meyakinkan.

Harus diakui, sedikit atau banyak, proses pembuatan film yang disutradarai Ryan Murphy telah membawa keuntungan bagi penduduk setempat. Seperti yang dituturkan salah seorang warga yang menjadi pemain figuran, I Made Rediana seorang pak guru yang menyambi sebagai nelayan musiman. Ia mengaku mendapatkan uang sebesar Rp 20 juta setelah terlibat sebagai pemain figuran selama empat hari. Bersama teman-temannya, mereka hanya diminta melakoni kegiatannya sehari-hari sebagai seorang nelayan. Selama empat hari, 19 jukung milik nelayan disewa dengan nilai kontrak Rp 10 juta. Ditambah lagi, bilamana jukung dilepaskan ke tengah laut akan mendapatkan kompensasi Rp 1,5 juta per hari, sedangkan yang disandarkan di pasir saja Rp 500.000 per hari. Rediana yang mengaku akan mempergunakan hasil yang ia peroleh sebagai figuran untuk membangun rumah yang belum selesai serta membiayai hidup sehari-hari itu, berharap ada lagi kegiatan pengambilan gambar yang melibatkan masyarakat.

Di samping itu, pembuatan film ini juga melibatkan aktris lokal. Seperti Christine Hakim yang berperan sebagai Wayan dalam film yang mengambil lokasi di Jimbaran, Sanur, Candidasa dan perkampungan seniman Ubud. Sosok Wayan, pemilik toko obat tradisional Bali di Jl Jembawan, Ubud, Bali, merupakan teman curhat Elizabeth Gilbert, karakter yang diperankan Julia Roberts. Serta terpilihnya Hadi Subiyanto, seorang pegawai di Hotel Darmawangsa, Jakarta, untuk memerankan dukun dan guru spiritual Ketut Liyer, yang menolak bermain karena mengidap penyakit kencing batu. Yang sedianya jika berkenan, pihak pembuat film telah menyediakan honor sebesar Rp200 juta.

Kisah Nyata

Film *Eat, Pray, Love* yang dibintangi Julia Roberts diambil dari kisah yang dialami Elizabeth Gilbert saat berusia 32 tahun. Ia seorang jurnalis yang resah mencari makna kehidupan setelah bercerai dengan suaminya. Perceraian telah membuat jiwanya kalut dan sedih serta kecewa atas kegagalannya membina hubungan baru dengan pria lain. Kemudian ia mengambil keputusan berke-lana ke berbagai negara demi mencari pengalaman spiritual dengan harapan menemukan cinta baru. Ia memulainya dari Italia, India, dan berakhir di Bali (Indonesia), dan menemukan nikmatnya makan di Italia, kekuatan doa di India, serta kedamaian dan keseimbangan cinta di Bali. Gilbert bertemu dengan Filipe, pria asal Brasil yang usianya jauh lebih tua darinya. Bersama Filipe, Gilbert menemukan kembali cinta sejatinya yang sempat hilang. ■ BS, PAN



Banyak gedung di Jakarta tidak memiliki ruang terbuka hijau

Pilih Hutan Kota Atau Beton?

Berkaitan dengan isu pemanasan global (*global warming*), pembangunan gedung beton di kota-kota kini menjadi salah satu penyumbang pemanasan bumi di samping pembabatan hutan.

Gedung-gedung di kota, baik yang berbentuk horizontal maupun vertical, pada intinya memberi dampak kerusakan lingkungan apabila para pengelola tidak memerhatikan keseimbangan lingkungan, baik dalam penyediaan lahan hijau maupun pemanfaatan air tanah. Kerusakan akan semakin cepat jika hal ini tidak diatur dengan jelas oleh undang-undang atau peraturan lain. "Kota merupakan daerah yang didominasi oleh bangunan gedung. Kalau bangunan itu tidak kita atur, maka kota akan menjadi semakin tidak teratur, sementara sumber daya alamnya terkuras untuk membangun," demikian kata Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Cipta Karya, Antonius Budiono di Banjarmasin, Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu.

Undang-undang tentang bangunan gedung sebenarnya jelas mengatur tentang syarat pembuatan bangunan yang ramah lingkungan, antara lain persyaratan administrasi, persyaratan teknis, proses penyelenggaraan, serta hak dan kewajiban pemilik dan peggunaannya. Namun di setiap daerah, UU tersebut masih memerlukan Perda sebagai peraturan pelaksanaan yang disesuaikan dengan daerah masing-masing. Hal inilah salah

satu kendala yang dialami Indonesia saat ini dalam hal pembangunan gedung ramah lingkungan ini. Menurut Antonius, dari 400-an kabupaten/kota yang ada di Indonesia, baru 36 daerah yang sudah menyelesaikan Peraturan Daerah (Perda) tentang Bangunan Gedung (*PUSDATA Departemen Pekerjaan Umum*). Padahal, UU Bangunan Gedung ini tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya Perda. Apalagi, bangunan gedung merupakan private domain (milik pribadi) sehingga relatif tidak mudah untuk diatur.

Sayangnya, banyak Pemerintah Daerah (Pemda) di era otonomi kurang memahami makna desentralisasi, sehingga sering muncul Perda yang bermasalah dan kontraproduktif. Perda yang dibuat sering lebih berdasarkan kepentingan pemasukan keuangan bagi daerah (PAD) ketimbang kepentingan yang lebih luas. Demikian halnya dengan Perda bangunan gedung ini, Perda yang dibuat lebih hanya mengatur retribusi saja tanpa mengatur persyaratan teknis, apalagi tentang aspek lingkungan.

Pada hal sudah menjadi realitas, meningkatnya perkembangan dunia usaha, jumlah penduduk, dan kebutuhan efisiensi pelayanan pemerintahan, membuat kebutuhan prasarana gedung di perkotaan juga turut meningkat. Berbanding

terbalik dengan hal tersebut, persediaan lahan justru semakin menyempit karena digunakan untuk berbagai prasarana. Karena itu, demi efisiensi lahan, pembangunan gedung bertingkat kini menjadi suatu pilihan mutlak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Antara bangunan vertikal dengan horizontal, sebenarnya bangunan vertikal lebih banyak memberi peluang bagi para pengelola untuk membuka lebih banyak ruang terbuka dalam keseimbangannya bagi penghijauan. Artinya, perbandingan luas lahan yang ada antara bangunan beton bertingkat dengan ruang terbuka hijau bisa memberi lebih banyak ruang terbuka hijau.

Berbeda dengan Kota Tokyo di Jepang yang harga tanahnya sudah selangit dan kebutuhan gedung tinggi sudah amat mendesak sehingga sangat wajar jika jarak antar-gedung bertingkat sudah sangat berdekatan dan membuat sedikit peluang untuk menyediakan ruang terbuka hijau. Sedangkan kota-kota di Indonesia, mengambil Jakarta sebagai contoh, sebenarnya masih memiliki lahan yang lebih luas untuk gedung ideal, yakni gedung dengan ruang terbuka hijau (dan lebih ideal lagi jika dilengkapi dengan ketersediaan penampungan air dalam bentuk kolam atau danau kecil), apabila para pengelola gedung memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya keseimbangan lingkungan. Lebih ideal lagi, jika dalam satu kawasan tersedia lahan yang dijadikan hutan kota sebagai paru-paru kota yang akan banyak menyerap polusi udara. Namun sayangnya, meskipun ada perda yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta, banyak pengelola yang mengabaikannya.

Merujuk pada kasus Jakarta ini, melihat masih lemahnya kesadaran pemilik atau pengelola gedung dalam hal lingkungan ini, kiranya ketegasan penegakan hukum perlu ditingkatkan. Seperti disebutkan Nirwono Joga, Ketua Kelompok Studi Arsitektur Lansekap Indonesia (KASALI), UU Nomor 28 Tahun 2002 jelas mensyaratkan pembuatan bangunan yang ramah lingkungan. Di samping itu, pendirian bangunan hijau (*green building*) juga menurutnya merupakan tanggung jawab bersama. Apalagi dengan adanya pemanasan global yang ditandai anomali cuaca, kurangnya ketersediaan air, serta menyebarnya berbagai macam penyakit.

Sedangkan melihat beberapa permasalahan bangunan ramah lingkungan ini secara umum, kiranya perlu ada dorongan kepada Pemerintah Daerah agar menegerakan menyelesaikan Perda tentang bangunan lingkungan ini. Kemudian, perlu ada ketegasan pemerintah pusat untuk menegakkan perundangan yang ada. Dan yang tak kalah penting adalah perlunya sosialisasi kesadaran penyelamatan lingkungan demi keselamatan masyarakat. ■ DEN

TokohINDONESIA



MAJALAH BERBASIS WEBSITE

www.tokohindonesia.com

THE EXCELLENT BIOGRAPHY



Al-Zaytun



KARSA



PARAMADINA

BUDHY MUNAWAR-RACHMAN

ENSIKLOPEDI

Nurcholish Madjid

ENSIKLOPEDI

Nurcholish Madjid

Disunting oleh:

BUDHY MUNAWAR RACHMAN



**Untuk Pemesanan
Hubungi:**

**Mahad Al-Zaytun
(0234) 742815**

**Majalah Berita Indonesia
(021) 8292735**